



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

**PERATURAN WALIKOTA NOMOR
TENTANG**

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024**

BUKU I

- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- DINAS KESEHATAN
- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
- DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional menjadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
5. Rencana...

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. dinas...

- d. dinas perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - f. dinas sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - h. dinas pangan dan pertanian;
 - i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. dinas perhubungan;
 - k. dinas komunikasi dan informatika;
 - l. dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - m. dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - n. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - o. sekretariat daerah;
 - p. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - q. Bappeda;
 - r. badan pengelola keuangan daerah;
 - s. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - t. inspektorat;
 - u. kecamatan padang panjang timur;
 - v. kecamatan padang panjang barat; dan
 - w. badan penanggulangan bencana daerah, kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan.
- (2) Dalam hal RKPD berkenaan mengalami perubahan, Renja Perangkat Daerah harus mengikuti perubahan.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Oktober 2023

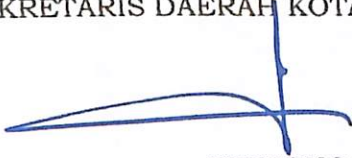
Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 20

NO	JABATAN	NAMA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten		
3.	Kepala Bappeda		





**PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	6
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	11
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III	26
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	28
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30
BAB IV	42
RENCANA KERJA DAN PENDAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	42
BAB V	51
PENUTUP	51

A f

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Padang Panjang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan rencana kerja (renja) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 merupakan perencanaan dari Rencana Strategis (Renstra) 2024 - 2026 dan mempedomani tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan Tahun 2024 yang telah dituangkan dalam Rencana Perangkat Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024. Dalam penyusunan juga mengutamakan penyelesaian program/kegiatan strategis Tahun Anggaran 2023 yang perlu ditindaklanjuti, mengintegrasikan pencapaian target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, merumuskan dari Program prioritas berdasarkan rumusan permasalahan prioritas dari isu strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing dan mengakomodir hasil musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota yang telah diinvestigasi dengan memperhatikan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Disamping itu Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan paparan di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu

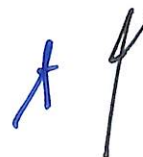


penyelenggara urusan wajib Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuat rencana kerja tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Secara legalitas formal, penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2024 menggunakan dasar hukum/regulasi diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- h. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
- i. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerj Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6); dan
- k. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12).



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah:

- a. Menjabarkan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah :

- a. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (pimpinan dan staf), khususnya penanggungjawab kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2024;
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024; dan
- d. Menetapkan kegiatan prioritas berdasarkan isu dan masalah yang mendesak agar lebih terarah.

1.4 Sistematika Penulisan

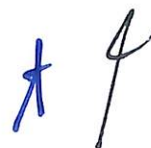
Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan



1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

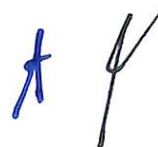
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB V Penutup



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pencapaian Renstra Dinas Pendidikan s/d tahun 2023 Kota Padang Panjang

TABEL 2.1
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023
Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/kegiatan (uotput)	Target Kerja capaian Program (renstraperangkat daerah) tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2022)			Target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun (2023)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan (2023)	
					Target renja perangkat daerah tahun (2022)	Realisasi renja perangkat daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan a/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1	Urusan Pendidikan									
1	Bidang Pendidikan									
1 01	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/Paket A	114,91%		114,91%	105,45%	91,77	107,91%	104,88%	97%
1 01 01		APM SD/MI/Paket A	99,41%		99,41%	99,03%	99,62	99,75%	96,81%	97%
		APK SMP/MTs/Paket B	104,90%		104,90%	95,06	91,13	101,57%	107,25%	108%
		APM SMP/MTs/Paket B	85,07%		85,07%	79,26	93,17	88,07%	85,66%	100%
		Sekolah yang mencapai Standar Nasional Pendidikan	100%		100%	100%	100	100%	100%	
1 01 01 01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun (media pendidikan) Sekolah	4 sekolah		4 sekolah	4 sekolah	100	3 unit		
1 01 01 01 01										
1 01 01 01 02	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Sedang/Berat	2 sekolah		2 sekolah	2 sekolah	100	2 unit		
1 01 01 01 03	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	8 paket		8 paket	8 paket	100	2 paket		
1 01 01 01 04	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Personil Peserta Didik Sekolah Dasar yang dibantu	2 orang		0	0	0	0		
1 01 01 01 05	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang dibina dalam menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta didik (jumlah sekolah yang melaksanakan asesmen nasional)	39 sekolah		39 sekolah	39 sekolah	100	32 sekolah		
1 01 01 01 06	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan dan apresiasi Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	8 keg		8 keg	8 keg	100	100 siswa		
1 01 01 01 07	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Non ASN pendidik dan Tenaga kependidikan SD yang pekerjaan dan guru non ASN yang diberi insentif	115 orang		115 orang	115 orang	100	100 siswa		
1 01 01 01 08	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD yang dilaksanakan	38 sekolah		38 sekolah	38 sekolah	100	70 orang		
1 01 01 01 09	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang Dibina Kelembagaan dan Manajemennya	39 sekolah		39 sekolah	39 sekolah	100	32 sekolah		
1 01 01 01 10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang menerima dan Mengelola Dana BOS	32 sekolah	0	32 sekolah	32 sekolah	100	32 sekolah		
1 01 01 01 11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pengelola Dana BOS yang Ditingkatkan Kapasitasnya	117 orang		117 orang	117 orang	100	78 orang		
1 01 01 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah yang mencapai Standar Nasional Pendidikan	100%		100%	100%	100			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Utilitas yang dibangun (media pendidikan) Sekolah	2 sekolah		2 sekolah	2 sekolah	100	1 unit		
1 01 01 02 01										
1 01 01 02 02	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Sedang/Berat	2 sekolah		2 sekolah	2 sekolah	100	0		

1	01	01	02	03	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang dibantu	3 orang		3 orang	3 orang	100	0		
1	01	01	02	04	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan	1 paket		1 paket	1 paket	100	0		
1	01	01	02	05	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang dibina dalam menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta didik (jumlah sekolah yang melaksanakan AN)	15 sekolah		15 sekolah	15 sekolah	100	3442 Peserta Didik		
1	01	01	02	06	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan dan apresiasi Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	8 keg		8 keg	8 keg	100	100 Peserta Didik		
1	01	01	02	07	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Non ASN pendidik dan Tenaga kependidikan SMP yang pekerjaan dan guru non ASN yang diberi insentif	64 orang	0	64 orang	64 orang	100	62 Orang		
1	01	01	02	08	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP yang dilaksanakan	1 keg		1 keg	1 keg	100	80 Orang		
1	01	01	02	09	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang Dibina Kelembagaan dan Manajemennya	15 sekolah		0	0	0	15 Satuan Pendidikan		
1	01	01	02	10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang menerima dan Mengelola Dana BOS	6 sekolah		6 sekolah	6 sekolah	100	6 Satuan Pendidikan		
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelola Dana BOS yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 orang		45 orang	45 orang	100	30 Orang		
1	01	01	03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD (5-6 tahun)	100%		100%	100%	100	100%		
						Rasio Lembaga PAUD Terakreditasi (diatas 1 Tahun)	90%		90%	90%	100	90%		
						Rasio PAUD Holistik Integratif	40%		40%	40%	100	40%		
1	01	01	03	01	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi Sedang/ Berat	1 paket		1 paket	1 paket	100	2 Unit		
1	01	01	03	02	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah proses belajar PAUD (bimbingan teknis) yang diselenggarakan	1 keg		1 keg	1 keg	100	500 Peserta Didik		
1	01	01	03	03	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik di Satuan PAUD yang diberi insentif	253 orang		253 orang	253 orang	100	270 Orang		
1	01	01	03	04	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	59 lembaga		59 lembaga	59 lembaga	100	120 orang		
1	01	01	03	05	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen PAUD (ormit) yang dibina	4 ormit		4 ormit	4 ormit	100	60 Satuan Pendidikan		
1	01	01	04		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan dan mengelola Dana BOP PAUD dan pemenuhan SPM	60 lembaga		60 lembaga	60 lembaga	100	57 Satuan Pendidikan		
1	01	01	04	01	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD	1 keg		1 keg	1 keg	100	57 Orang		
						Angka Kelulusan Pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C)	96%		96%	96%	100			
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan non formal yang memenuhi kebutuhan dasar SPM pendidikan (usia 7 s.d 18 tahun)	100%		100%	100%	100			
						Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang diadakan	14 paket		14 paket	14 paket	100	0		
					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah layanan di satuan Pendidikan non formal	3 jenis		0	0	0	30 Peserta Didik		
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal yang dibina kelembagaan dan manajemennya	3 sekolah		0	0	0	3 Satuan Pendidikan		
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dikelola dan pemenuhan SPM pendidikan	3 sekolah		3 sekolah	3 sekolah	100	3 Satuan Pendidikan		

				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelola dana BOP sekolah Nonformal/kesetaraan yang ditingkatkan kapasitasnya	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	100	30 orang	
									0		
									0		
					Pelaku Budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan di lembaga adat budaya Kota Padang Panjang	250 orang	250 orang	250 orang	100		
									100		
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Capaian Objek Pemajuan Kebudayaan	80%	80%	80%	100		
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat pengelola kebudayaan yang dibina	60	60	60	100		
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan (pendokumentasian, pembinaan /pelatihan)	4 objek	4 objek	4 objek	100	6 objek	
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata kebudayaan yang dibina melalui kegiatan bimtek dan workshop	50 orang	50 orang	50 orang	100	75 orang	
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional Masyarakat yang dilestarikan	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	100		
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan pranata tradisional yang dibina melalui sosialisasi dan bimtek	75 orang	75 orang	75 orang	100	0	
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	100		
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan (sinkronisasi kegiatan dengan lembaga adat)	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	100	3 lembaga	
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM, lembaga dan pranata adat yang dibina (bimtek dan rebug pemangku adat)	75 orang	75 orang	75 orang	100	75 orang	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat (KAN) yang disediakan	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	100	3 lembaga	
2				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	80	80	80	100		
2	1			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan tingkat kota	14 objek	14 objek	14 objek	100		
				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya baru yang didaftarkan	14 objek	0	0	0	0	
				Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang di tetapkan	10 objek	0	0	0	0	
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga cagar budaya yang dikelola dan dikembangkan tingkat kota	14 objek	14 objek	14 objek	100		
				Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi dengan pendokumentasian WBTB dan WBB	14 objek	14 objek	14 objek	100	0	
				Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan dengan tetap mempertahankan kekhasannya	14 objek	14 objek	14 objek	100	0%	
				Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan untuk fasilitasi studi pembelajaran masyarakat	14 objek	14 objek	14 objek	100	0	
				Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya surat izin terhadap cagar budaya yang dipromosikan	4 dokumen	0	0	0		
				Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin legalitas cagar budaya yang diterbitkan	4 dokumen	0	0	0	0%	
									0		

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%		100%	100%	100			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	580 orang		580 orang	580 orang	100	583 orang		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%		100%	100%	100			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 jenis		7 jenis	7 jenis	100	1 paket		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan ((ATK dan alat /bahan kebersihan)	2 jenis		2 jenis	2 jenis	100	3 paket		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 jenis		2 jenis	2 jenis	100	5 paket		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti SKPD	1 tahun		1 tahun	1 tahun	100	2 paket		
						Jumlah makan dan minum rapat	1500 OK		1500 OK	1500 OK	100	70 laporan		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%	100%	100			
					Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 jenis		3 jenis	3 jenis	100	127 unit		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Selesai Dilaksanakan	100%		100%	100%	100			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	2 jenis		2 jenis	2 jenis	100	2 laporan		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 rekening		4 rekening	4 rekening	100	36 laporan		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN (THL) dibayarkan dan ditingkatkan kapasitasnya	32 orang		32 orang	32 orang	100	12 laporan		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang Selesai dilaksanakan	100%		100%	100%	100	17 unit		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	17 unit		17 unit	17 unit	100			
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5 jenis		5 jenis	5 jenis	100	0		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	3 jenis		3 jenis	3 jenis	100	5 unit		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit		3 unit	3 unit	100	3 unit		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 jenis		3 jenis	3 jenis	100	0		

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendidikan SD dan SMP ditargetkan akan mencapai standard nasional pendidikan yang baik. Persentase objek pemajuan diperkirakan sama dengan tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada umumnya capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meningkat setiap tahunnya sesuai target yang sudah ditetapkan pada Renstra 2024 – 2026. Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan format Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang dibawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Padang Panjang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	7	8	7	8	9	10	11	10	13
1	APK SD/MI/Paket A			114.91%	116.91%	106,20%	106,10%	106.37%	105.45%	106,20%	106,10%	
2	APM SD/MI/Paket A			99.41%	100%	0.00%	0%	99.28%	99.03%	0.00%	0%	
3	APK SMP/MTs/Paket B			104.90%	105.57%	107,5%	107.00%	93.66%	95.06%	107,5%	107.00%	
4	APM SMP/MTs/Paket B			85.07%	86.07%	0.00%	0.00%	78.94%	79.26%	0.00%	0.00%	
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat			0.00%	0.00%	99,6%	99,7%	0.00%	0.00%	99,6%	99,7%	
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat			0.00%	0.00%	97,4%	97,5%	0.00%	0.00%	97,4%	97,5%	
7	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD			0.00%	0.00%	60%	61%	0.00%	0.00%	60%	61%	
8	Angka Melanjutkan SD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Angka Melanjutkan SMP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase sekolah Dasar (SD) dengan peringkat			92%	92%	92%	92%	74.36%	82%	92%	92%	
11	Persentase sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan peringkat akreditasi			48%	48%	48%	48%	40%	40%	48%	48%	
12	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar SPM pendidikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Literasi dan Numerasi SD sederajat			0	0	2,03 dan 1,73	2,04 dan 1,74	0	0	2,03 dan 1,73	2,04 dan 1,74	
14	Literasi dan Numerasi SMP sederajat			0	0	2,24 dan 1,88	2,25 dan 1,89	0	0	2,24 dan 1,88	2,25 dan 1,89	
15	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat			0	0	2,40/2,28/2,2	2,41/2,28/2,3	0	0	2,40/2,28/2,2	2,41/2,28/2,3	
16	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP			0	0	2,49/2,41/2,08	2,50/2,42/2,09	0	0	2,49/2,41/2,08	2,50/2,42/2,09	
17	Pelaku Budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan di lembaga adat budaya Kota Padang Panjang			250 orang	300 orang	250 orang	300 orang	150 orang	200 orang	250 orang	300 orang	

Pada tabel diatas diharapkan peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan realisasi angka melanjutkan SD dan SMP 100%.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kependidikan dan Kebudayaan, OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan memenuhi Standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Untuk perencanaan program/kegiatan akan datang, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan masih menjadi skala prioritas untuk memperbaiki kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Program prioritas pendidikan dan kebudayaan dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis. Berkaitan dengan hal itu, maka identifikasi dan rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis sangat memperhatikan cakupan efek dari masalah, intensitas kemunculan masalah dalam masyarakat dari efek beruntun yang berpengaruh pada kinerja sektor lain, dan adanya kecenderungan untuk meningkatkan pembangunan tapi menimbulkan dampak negative pada pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang.

Meskipun Kota Padang Panjang sudah sejak lama dijuluki sebagai kota Pendidikan dan angka Wajar Sembilan Tahun sudah dapat dipenuhi, akan tetapi permasalahan pokok pada urusan pendidikan adalah belum meratanya kualitas pendidikan dan belum terpenuhinya kebutuhan dunia kerja. Belum maksimalnya pemerataan pendidikan disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat untuk masuk sekolah dengan kualitas bagus dan berlokasi di pusat kota, sedangkan di sisi lain masih

banyak sekolah yang mengalami kekurangan siswa terutama sekolah swasta dan sekolah yang berada di lingkup Kementerian Agama.

Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan diperlukan tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga untuk pendidikan swasta terutama pendidikan swasta agama, sehingga pelayanan pendidikan terlihat tidak diskriminatif.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Tantangan Dan Peluang yang dihadapi dan Kebudayaan dalam meningkatkan pelayanan, yaitu:

- 1) Paradigma Pendidikan yang harus disikapi setiap saat;
- 2) Kebijakan pemerintah yang berubah termasuk di bidang pendidikan;
- 3) Tingkat selektifitas masyarakat yang masih rendah terhadap dampak globalisasi;
- 4) Kemajuan IPTEK yang begitu pesat; dan
- 5) Belum optimalnya kepedulian terhadap Kebudayaan daerah.

c. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Berdasarkan analisis pengelolaan pendidikan kota Padang Panjang dapat diidentifikasi berbagai Isu strategis yang menjadi tantangan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Menekankan keseimbangan antara pengembangan kecerdasan Akademis, Spiritual dan Emosional;
- 2) Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan, yang diperlukan dalam pengembangan sikap dan jiwa enterpreunership peserta didik;
- 3) Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan Satuan Perangkat Daerah Kota dan Propinsi, Kementerian/Lembaga lain; dan
- 4) Menata, memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas Sistem Penilaian dan Evaluasi dalam urusan pendidikan, dan kebudayaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja PD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak dimasukkan. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Kota Padang Panjang seperti tabel 2.4. di bawah ini.

TABEL 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kota Padang Panjang

Nama : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan											
Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Padang Panjang					Padang Panjang				
1-01-02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Padang Panjang	Angka Melanjutkan SD	100 %	24.832.772.997,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Melanjutkan SD	100%		
1-01-02			Angka Melanjutkan SMP	100 %				Angka Melanjutkan SMP	100%		
1-01-02			Persentase Sekolah Dasar dengan Peringkat Akreditasi A	95 %				Persentase Sekolah Dasar dengan Peringkat Akreditasi A	95%		
1-01-02			Persentase SMP dengan Peringkat Akreditasi A	53 %				Persentase SMP dengan Peringkat Akreditasi A	83%		
1-01-02			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar SPM	100 %				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar SPM	100%		
1-01-02			APK PAUD (5-6 tahun)	100 %				APK PAUD (5-6 tahun)	100%		
1-01-02			Persentase Lembaga PAUD yang memenuhi Kebutuhan Dasar SPM Pendidikan	100 %				Persentase Lembaga PAUD yang memenuhi Kebutuhan Dasar SPM	100%		
1-01-02			Rasio Lembaga PAUD Terakreditasi (diatas 1 tahun)	98 %				Rasio Lembaga PAUD Terakreditasi (diatas 1 tahun)	98%		
1-01-02			Rasio PAUD Holistik Integratif	60 %				Rasio PAUD Holistik Integratif	60%		
1-01-02			Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan (Paket A/ B/ C)	98 %				Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan (Paket A/ B/ C)	98%		
1-01-02			Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang memenuhi Kebutuhan	100 %				Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang memenuhi Kebutuhan	100%		
1-01-02-2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Padang Panjang			24.832.772.997,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				24.832.772.997,00	
1-01-02-2.04-02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Padang Panjang			11.716.285.047,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				11.716.285.047,00	
1-01-02-2.04-05	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	800.000.000,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	800.000.000,00	
1-01-02-2.04-14	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	200.000.000,00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	200.000.000,00	
1-01-02-2.04-18	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00	
2-22-02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2.564.373.047,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2.564.373.047,00	
2-22-02-2.01-01	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	310.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	310.000.000,00	
2-22-02-2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	150.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	150.000.000,00	
22-02-2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	200.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	200.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	32 Unit	771.900.000,00	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	32 Unit	771.900.000,00	
X-XX	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	380 Peserta Didik	520.000.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	380 Peserta Didik	520.000.000,00	
X-XX-01-2.01	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	150.000.000,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	150.000.000,00	
X-XX-01-2.02	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	104 Orang	2.017.840.000,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	104 Orang	2.017.840.000,00	

K-XX-01-2.01	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naisikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	645.822.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naisikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	645.822.000,00
XX-01-2.06	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	38 Satuan Pendidikan	45.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	38 Satuan Pendidikan	45.000.000,00
XX-01-2.06	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	190 Orang	30.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	190 Orang	30.000.000,00
X-XX-01-2.07	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	300.000.000,00	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	300.000.000,00
X-XX-01-2.07-11	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	250.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	250.000.000,00
XX-01-2.08	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38 Dokumen	16.275.000,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38 Dokumen	16.275.000,00
X-XX-01-2.08-03	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	400.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	400.000.000,00
X-XX-01-2.09	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang	1.400.000.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang	1.400.000.000,00
XX-01-2.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	445.075.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	445.075.000,00
XX-01-2.09	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	38 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	38 Satuan Pendidikan	100.000.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	200.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	200.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Padang Panjang		8.117.351.300,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			8.117.351.300,00
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	800.000.000,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	800.000.000,00
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	400.000.000,00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	400.000.000,00
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000,00	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.500.945.000,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.500.945.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	300.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	300.000.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300.000.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300.000.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	300.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	300.000.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	480.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	480.000.000,00
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	300.000.000,00	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	300.000.000,00
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	408.500.000,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	408.500.000,00

Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	290.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	290.000.000,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350 Peserta Didik	96.500.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350 Peserta Didik	96.500.000,00
Perlengkapan Belajar Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	250 Paket	125.000.000,00	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	250 Paket	125.000.000,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	28.000.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	28.000.000,00
Pembinaan Mnat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	160.000.000,00	Pembinaan Mnat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	160.000.000,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56 Orang	977.328.000,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56 Orang	977.328.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Pengkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	311.078.300,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Pengkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	311.078.300,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	15 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	15 Satuan Pendidikan	15.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang	30.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang	30.000.000,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen	20.000.000,00
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan	25.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan	25.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	250 Paket	150.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	250 Paket	150.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300.000.000,00
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Padang Panjang			4.232.430.000,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			4.232.430.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	50.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	50.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	148.540.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	148.540.000,00
Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	30.000.000,00	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	30.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan PAUD		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	20.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	20.000.000,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	20.000.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	20.000.000,00
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	500 Peserta Didik	80.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	500 Peserta Didik	80.000.000,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang	3.396.480.000,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang	3.396.480.000,00

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	342.410.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	342.410.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan	75.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	120 Orang	20.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	120 Orang	20.000.000,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	60 Dokumen	30.000.000,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	60 Dokumen	30.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	20.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	20.000.000,00
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Padang Panjang			766.706.650,00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				766.706.650,00
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	189.206.650,00	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	189.206.650,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	25.000.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	25.000.000,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Orang	49.500.000,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Orang	49.500.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	20.000.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	20.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	15.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	15.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	20.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	20.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	50.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	50.000.000,00
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	60 Peserta Didik	220.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	60 Peserta Didik	220.000.000,00
Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	50.000.000,00	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	50.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	80.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	80.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	49.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	49.000.000,00

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Padang Panjang			211.476.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			211.476.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Padang Panjang			211.476.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			211.476.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Padang Panjang			211.476.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			211.476.000,00
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				115.000.000,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			115.000.000,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	115.000.000,00	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek		115.000.000,00
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				76.700.000,00	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			76.700.000,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	46.700.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	46.700.000,00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	30.000.000,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	30.000.000,00
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				19.776.000,00	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			19.776.000,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	3 Unit	19.776.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	3 Unit	19.776.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1-01-02-2.01-18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Panjang			53.547.816.682,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Panjang		53.547.816.682,00
01-02-2.01-18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	553 Orang/bulan	53.547.816.682,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	553 Orang/bulan	53.547.816.682,00
01-02-2.01-18	Administrasi Umum Perangkat Daerah				459.720.650,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah			459.720.650,00
1-01-02-2.01-23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.670.650,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.670.650,00
1-01-02-2.01-24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	124.050.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	124.050.000,00
1-01-02-2.01-26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.000.000,00
1-01-02-2.01-28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	300.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	300.000.000,00
01-02-2.02-18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			200.000.000,00
01-02-2.02-18	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	150.000.000,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	150.000.000,00
1-01-02-2.02-37	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000,00
1-01-02-2.02-39	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.039.360.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.039.360.000,00

1-01-02-2.02-40	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00
1-01-02-2.02-43	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	150.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	883.360.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	883.360.000,00
1-01-02-2.03-04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			370.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			370.000.000,00
01-02-2.03-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	140.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	140.000.000,00
01-02-2.03-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	30.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	30.000.000,00
1-01-02-2.03-17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00
1-01-02-2.03-19								

Dari tabel diatas fokus pendidikan adalah pada program pengelolaan Pendidikan dasar yaitu Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan pada urusan kebudayaan terus melanjutkan program pengembangan kebudayaan yang ada di kota Padang Panjang.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

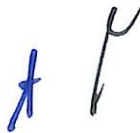
Berdasarkan telaahan program/kegiatan usulan dari berbagai pihak (*stakeholder*) mengenai berbagai isu pendidikan dan kebudayaan, maka program peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan menjadi prioritas utama disamping program fisik. Hal ini didasarkan dari kualitas mutu pendidikan yang belum merata pada setiap sekolah.

Mengingat terbatasnya sumber daya daerah, maka penetapan agenda dan prioritas pembangunan daerah di dalam Rencana kerja Tahun 2024, harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (*resources*) yang ada untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2024 disusun dengan beberapa pertimbangan berikut:

- Memiliki dampak yang signifikan, terukur dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat; dan
- Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 seperti pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5 (T-C.32.) Usulan Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Padang Panjang					
Nama Perangkat Daerah : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan sarana prasarana dan Utilitas sekolah				
	a. Penyelesaian bangunan fisik sekolah SDN 5 Padang Panjang Timur	Padang Panjang		155,000,000	Drs Aditiawarman
	b. Pembangunan lantai 2 LEMBAGA PAUD KASIH BUNDO	Padang Panjang		30,000,000	Drs Aditiawarman
	c. Pembuatan gerbang. Pagar dan pengecoran halaman sekolah	Padang Panjang		70,000,000	Yuda praselia
	d. Pemasangan canopy sekolah paud buda denisa	Padang Panjang		24,300,000	Herman
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
	a. Rehap kantor kepala SMP N 1 Padang Panjang	Padang Panjang		60,000,000	Imbral, SE
3	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar				
	a. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa ADAM AL FATIH	Padang Panjang		1,500,000	Hukemri
	b. Kurangnya biaya pendidikan/bantuan beasiswa RAZQA PUTERA ZODYA	Padang Panjang		1,500,000	Hukemri
	c. Kurangnya biaya pendidikan atas nama NAFIZA SYAKIRA	Padang Panjang		1,500,000	Hendra Saputra, SH



d. Bantuan beasiswa a.n ALFATIAH HIBATILLAH	Padang Panjang		1,500,000	Kiki Anugerah Dia, SE
e. Mohon bantuan pendidikan sekolahnak saya atas nama M GIBRAN	Padang Panjang		1,500,000	Puji Hastuti, A.Md
f. Masyarakat a.n Nada Ulya butuh bantuan dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
g. Kurangnya biaya pendidikan/bantuan beasiswa CELYSHA HAURA	Padang Panjang		1,500,000	Hukemri
h. Masyarakat a.n Muhammad Zhafran (SD), Zikri Akbar Perdana (SMP), dan Jihan Noviandra (SMP) butuh bantuan dana pendidikan	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
i. Dibutuhkan bantuan dana pendidikan untuk keluarga kurang mampu yang anaknya sedang sekolah di bangku SD a.n Alfian Oktarizal	Padang Panjang		1,500,000	Mahdelmi, S.Sos
j. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa QAIREEN AZZURA KAYANA	Padang Panjang		1,500,000	Hukemri
k. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa Muhammad Habibi	Padang Panjang		1,500,000	Hukemri
l. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa a.n Askana Sakhi Handra	Padang Panjang		1,500,000	Hukemri
m. Masyarakat a.n Aisyah Ramadani butuh bantaun dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
n. Masyarakat a.n Raditia Aryanto butuh bantaun dana sekolah (SMP)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
o. Masyarakat a.n Haura zaakia Suhenza butuh bantaun peralatan sekolah (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
p. Masyarakat a.n Rifki Pratama butuh bantaun dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
q. Masyarakat a.n Nabila shakila Haynes butuh bantaun dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
r. Masyarakat a.n Jihan Talita Ufa butuh bantaun dana pendidikan(SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
s. Masyarakat a.n Vergio Tri Putra butuh bantaun dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
t. Masyarakat a.n Yuvsko Ardion butuh bantaun dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
Masyarakat a.n Yoghi Prinatha butuh bantaun dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
Masyarakat a.n Gavriel Al Buqhoiri Noviandrie butuh bantaun peralatan sekolah (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
Masyarakat a.n Firly Zitania butuh bantaun dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
Masyarakat a.n Megan Lee Palar Quin butuh bantaun dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
Masyarakat a.n Abizar Khalfani Sulaiman butuh bantaun dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
Masyarakat a.n Titania Adeeva Androni butuh bantaun dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
Masyarakat a.n Abiansyah Nur Akbar butuh bantaun dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya

	Masyarakat a.n Nugie Pradinata butuh bantuan dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
	Masyarakat a.nKenzie Javas Nagendra butuh bantuan dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
	Masyarakat a.n Rafetio Dimintri Oktorio Gunawan butuh bantuan dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Padang Panjang			
	a. Masyarakat a.n Noviardy Kamil Adha butuh bantuan dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
	b. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa Zahara Putri Rahmadani	Padang Panjang		1,500,000	Hukemri
	c. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa a.n Putri Surya Aqila	Padang Panjang		1,500,000	Hukemri
	d. Masyarakat a.n khairinnisa Disni butuh bantuan dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
	e. Masyarakat a.n Alif Raihan butuh bantuan dana pendidikan (SD)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
5	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana dan Utilitas Sekolah	Padang Panjang			
	a. Musholla Al-Iklas tidak layak dan kekurangan fasilitas untuk menunjang kegiatan di SDN 15 Padang Panjang Barat	Padang Panjang		95,225,000	Idris
		Padang Panjang			
6	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana dan Utilitas Sekolah	Padang Panjang			
	a. Permohonan rehab gedung SMPN 4 Padang Panjang	Padang Panjang		180,000,000	Herman
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Padang Panjang			
	a. PKMB Mankazul Quran Padang Panjang kekurangan peralatan olahraga yang memadai yaitu alat tenis meja guna menunjang tercapainya prestasi di bidang olahraga	Padang Panjang		28,400,000	Idris
	b. SDIT Juara membutuhkan dana untuk pengadaan alat DRUM BAND untuk menunjang kegiatan di sekolah tersebut	Padang Panjang		30,000,000	Idris
	c. SMP Qu Cahaya Al-Quran Padang Panjang kekurangan peralatan olahraga yang memadai (Alat Tenis Meja)	Padang Panjang		10,100,000	Idris
	d. Pembangunan studio podcast dan mobiler studio podcast SMP N 1 Padang Panjang	Padang Panjang		40,000,000	Yandra Yane, SE
8	Penyediaan Biaya Personil Peserta didik Sekolah Menengah Pertama				
	a. Bantuan beasiswa a.n Hanifah Nabillah	Padang Panjang		3,000,000	Kiki Anugerah Dia, SE
	b. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa Rian Putra	Padang Panjang		3,000,000	Hukemri
	c. Bantuan beasiswa a.n Alisha Haura Nafiah (Musrianto)	Padang Panjang		3,000,000	Kiki Anugerah Dia, SE
	d. Masyarakat a.n Putra Junior. AM butuh bantuan peralatan sekolah (SMP)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
	e. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa an. Nadira Desna Devita	Padang Panjang		3,000,000	Hukemri
	f. Masyarakat a.n Devyta Maylani Putri butuh bantuan dana pendidikan (SMP)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
	g. Masyarakat a.n Naisya Syfitri butuh bantuan peralatan sekolah (SMP)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
	h. Dibutuhkan bantuan biaya pendidikan untuk membeli peralatan pendidikan bagi anak yang duduk di bangku SMP An. Waratu Hafiza	Padang Panjang		5,000,000	Mahdelmi, S.Sos
	i. Dibutuhkan bantuan biaya pendidikan untuk membeli peralatan pendidikan bagi anak yang duduk di bangku SMP An. Fatihatul Nadifa	Padang Panjang		1,500,000	Mahdelmi, S.Sos
	j. Bantuan beasiswa A.N M. Zaki Pratama (Syahroni Kama)	Padang Panjang		3,000,000	Kiki Anugerah Dia, SE
	k. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa an. Abdul Hafiz Hadi Baihaqi	Padang Panjang		3,000,000	Hukemri
	l. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa Alnira Reysya Mahami	Padang Panjang		3,000,000	Hukemri
	m. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa SMP an. Muhammad Revan Al Ghazali	Padang Panjang		3,000,000	Hukemri
	n. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa Lucky Yusuf	Padang Panjang		3,000,000	Hukemri
	o. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa Sonia Rajena	Padang Panjang		3,000,000	Hukemri
	p. Masyarakat a.n Nabil Alfarizi Suhenza butuh bantuan peralatan sekolah (SMP)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya

	q. Masyarakat a.n Alief Alfaitz Ariano butuh bantuan dana pendidikan (SMP)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
	r. Masyarakat a.n Aisyah Humeira butuh bantuan dana pendidikan (SMP)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
	s. Masyarakat a.n Khairun Nisya butuh bantuan dana pendidikan (SMP)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
	t. Masyarakat a.n Bintang Harelda butuh bantuan dana pendidikan (SMP)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
9	Penyiaian Biaya Peronil Didik Sekolah Menengah Pertama				
	a. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa Muhammad Ilham	Padang Panjang		3,000,000	Hukemri
	b. Kurangnya biaya pendidikan atas nama Syarif Putri Aulia	Padang Panjang		3,000,000	Hendra Saputra, SH
	c. Kurangnya biaya pendidikan/ bantuan beasiswa an. Annisa Rifdatul Husna	Padang Panjang		3,000,000	Hukemri
	d. Bantuan beasiswa a.n Muhammad Ikhsan Alfahrizy	Padang Panjang		3,000,000	Kiki Anugerah Dia, SE
	e. Masyarakat a.n Derid Chesya Amanda butuh bantuan dana pendidikan (SMP)	Padang Panjang		2,000,000	Yudha Prasetya
10	Pengembangan Karir Pendidikan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
	a. Pelahan peningkatan kompetensi Kepala sekolah, Tenaga pendidik, TENAGA Kependidikan dan peserta didik SMP se- Kota Padang Panjang	Padang Panjang		20,000,000	Idris
11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD				
	a. Diperlukan study bagi guru-guru PAUD se Kota Padang Panjang ke Kota Medan untuk meningkatkan pengetahuan dengan anggaran Rp. 100,000,000	Padang Panjang		20,000,000	Dr. H. NOVI HENDRI, SE, M.Si
12	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				
	a. Berikan training centre dan forum literasi adat Minangkabau meningkatkan pelatihan guna peningkatkan kapasitas di bidangnya	Padang Panjang		55,000,000	Idris
	b. Diperlukan pelatihan penambahan untuk masing-masing kelurahan se-kota Padang Panjang, anggaran Rp. 150,800,000	Padang Panjang		10,000,000	Dr. H. NOVI HENDRI, SE, M.Si
	c. Perlu diadakan festival seni tradisional untuk melestarikan adat istiadat dengan anggaran Rp. 150,000,000	Padang Panjang		10,000,000	Dr. H. NOVI HENDRI, SE, M.Si
13	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Kebudayaan				
	a. Diperlukan pelatihan peningkatan pemahaman adat istiadat bagi Bundo Kanduang anggaran Rp. 16,700,000	Padang Panjang		16,700,000	Dr. H. NOVI HENDRI, SE, M.Si
	JUMLAH			985,225,000	

Pada Tabel diatas pelayanan usulan masyarakat maupun pokok pikiran anggota DPRD kota Padang Panjang akan membantu peningkatan pendidikan bagi masyarakat secara umum. Peningkatan akses pendidikan akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya bantuan biaya pendidikan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Urusan Pendidikan dan urusan Kebudayaan. Urusan Pendidikan dan kebudayaan merupakan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang

bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- b. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- c. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan sebagai berikut:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus- utamaannya dalam pendidikan.
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan.

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevans pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.



3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan mengacu kepada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Definisi operasional	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024 (5)	2025 (6)	2026 (7)
(1)	(2)	(3)	(4)				
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Rata-rata lama sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	11.94	11.95	11.98
			Harapan lama sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	15.09	15.10	15.11
		Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar disatuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7-12 di kota Padang panjang	99,6%	99,7%	99,7%
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar disatuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 13-15 tahun di kota Padang panjang	97,4%	97,5%	97,5%
			Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	Persentase Peserta didik yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti PAUD terhadap seluruh anak yang sedang duduk dikelas 1 SD	60%	61%	62%
			APK PAUD (3-6 tahun)	Jumlah peserta didik di jenjang PAUD sederajat usia 3-6 tahun dibagi jumlah penduduk usia 3-6 di kota padang panjang	48%	49%	50%
			APK SD sederajat	Jumlah peserta didik jenjang SD sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun di kota Padang Panjang	106,20%	106,10%	106%
			APK SMP sederajat	Jumlah peserta didik jenjang SMP sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun di kota Padang	107,5%	107%	107%
			Literasi dan Numerasi SD sederajat	Persentase Peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksai dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasiional dan teks fiksi) dan Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	2,03 dan 1,73	2,04 dan 1,74	2,04 dan 1,74

			Literasi dan Numerasi SMP sederajat	Persentase Peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) dan Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	2,24 dan 1,88	2,25 dan 1,89	2,25 dan 1,89
			Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	Nilai komposit nilai indeks rasa aman, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan narkoba. Nilai rata rata guru, kepala sekolah, dan peserta didik terhadap iklim kebhinekaan disekolah. Nilai rata-rata layanan disabilitas, Cerdas Bakat Istimewa (CBI), sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas sekolah disabilitas disekolah.	2,40/2,28/2,2	2,41/2,28/2,3	2,41/2,28/2,3
			Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	Nilai komposit nilai indeks rasa aman, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan narkoba. Nilai rata rata guru, kepala sekolah, dan peserta didik terhadap iklim kebhinekaan disekolah. Nilai rata-rata layanan disabilitas, Cerdas Bakat Istimewa (CBI), sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas sekolah disabilitas disekolah.	2,49/2,41/2,08	2,50/2,42/2,09	2,50/2,42/2,09
	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat		Persentase objek pemajuan kebudayaan	Jumlah OPK yang dilestarikan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dibagi jumlah OPK dikali seratus persen	53%	59%	65%
		Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah OPK yang dilestarikan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan	49%	55%	65%
			Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	Jumlah OPK yang dilestarikan dibagi jumlah OPK yang ada dinagari kali seratus persen	60%	65%	70%
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah CB yang dilestarikan dibagi jumlah CB yang ada kali seratus persen	50%	55%	60%
			Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	Jumlah kelompok seni/komunitas budaya yang berkontribusi/bekerja sama dibagi jumlah kelompok seni/komunitas budaya yang ada kali seratus persen	54%	60%	54%

Tabel diatas menggambarkan tujuan yang akan dicapai tahun 2024, 2025 dan 2026 yang sesuai dengan tujuan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 antara lain adalah:

- a) Rancangan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026;
- b) Evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013-2018;
- c) Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Pendidikan sampai dengan Tahun 2023;
- d) Tema dan prioritas pembangunan tahun 2024;
- e) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- f) Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang untuk tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Padang Panjang										
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				80,861,146,329					70,084,379,613
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				80,449,670,329					69,834,603,613
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan		100 Persen	56,616,897,332			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan	100 Persen	63,889,438,261
1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		90 Persen	53,547,816,682			Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	90 Persen	61,473,306,661
1 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	580 Orang/bulan	53,547,816,682	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	580 Orang/bulan	51,473,305,561
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		90 Persen	469,720,650			Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	626,707,360
1 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	15,670,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20,670,650
1 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	124,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	129,050,000
1 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	76,986,700
1 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	300,000,000
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	200,000,000			Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	200,000,000
1 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	150,000,000

1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50,000,000
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		90 Persen	1,039,360,000			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 Persen	862,718,000
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	6,030,000
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	150,000,000
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	883,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	706,686,000
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		90 Persen	370,000,000			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 Persen	300,000,000
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	190,000,000
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	10,000,000
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100,000,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan		100 Persen	24,832,772,997			Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 Persen	15,945,165,262
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola		38 Satuan Pendidikan	11,716,285,047			Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan	6,808,128,000

1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Ruang	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SD N 7 Kec. Padang Panjang Timur - SD N 16 Kec. Padang Panjang Barat - SD N 2 Kec. Padang Panjang Timur - SD N 6 Kec. Padang Panjang Barat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	-
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SD N 2 Kec. Padang Panjang Timur - SD N 10 Kec. Padang Panjang Timur - SD N 14 Kec. Padang Panjang Barat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	227,000,000
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SD N 7 Kec. Padang Panjang Timur	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	450,000,000
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2,564,373,047	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SD N 2 Kec. Padang Panjang Timur - SD N 6 Kec. Padang Panjang Timur	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	400,000,000
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	310,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SD N 12 Kec. Padang Panjang Timur - SD N 15 Kec. Padang Panjang Timur - SD N 16 Kec. Padang Panjang Barat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	-
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SD N 13 Kec. Padang Panjang Barat - SD N 13 Kec. Padang Panjang Timur - SD N 15 Kec. Padang Panjang Barat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	-

1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SD N 1 Kec. Padang Panjang Timur - SD N 10 Kec. Padang Panjang Timur - SD N 13 Kec. Padang Panjang Timur	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	
1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	771,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	32 Unit	300,000,000
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380 Peserta Didik	520,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	380 Peserta Didik	456,000,000
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Peserta Didik	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	150,000,000
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104 Orang	2,017,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	104 Orang	2,017,840,000
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Orang	645,822,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	527,288,000
	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Satuan Pendidikan	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	38 Satuan Pendidikan	30,000,000
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190 Orang	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	190 Orang	30,000,000
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Ruang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SD N 2 Kec. Padang Panjang Timur - SD N 9 Kec. Padang Panjang Timur	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	300,000,000

1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SD N 6 Kec. Padang Panjang Barat - SD N 9 Kec. Padang Panjang Barat - SD N 10 Kec. Padang Panjang Timur	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	250,000,000
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Dokumen	16,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	20,000,000
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Paket	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Unit	300,000,000
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Ruang	1,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SD N 13 Kec. Padang Panjang Barat SD N 6 Kec. Padang Panjang Barat	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	650,000,000
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	445,075,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SD N 6 Kec. Padang Panjang Barat - SD N 11 Kec. Padang Panjang Barat - SD N 11 Kec. Padang Panjang Timur	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	300,000,000
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Satuan Pendidikan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	38 Satuan Pendidikan	100,000,000
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Ruang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SD N 10 Kec. Padang Panjang Barat - SD N 5 Kec. Padang Panjang Timur	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	300,000,000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola		15 Satuan Pendidikan	8,117,351,300			Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	14 Satuan Pendidikan	4,916,667,262
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SMP N 6	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	-

1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SMP N 6	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	-
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SMP N 3	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	-
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SMP N 6	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	-
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1,500,945,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Pembangunan MCK 1 Sekolah di SMP N 6	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	300,000,000
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Ruang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SMP N 1	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	300,000,000
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SMP N 2 - SMP N 5 - SMP N 6	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	250,000,000
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SMP N 1 - SMP N 2 - SMP N 5	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	400,000,000
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Ruang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Rehabilitasi Sedang/Berat Labor IPA dan Labor Komputer di SMP N 3	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	400,000,000
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	480,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SMP N 1 - SMP N 2 - SMP N 3	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	288,229,252
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SMP N 1 - SMP N 2 - SMP N 3	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	300,000,000
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	408,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SMP N 2 - SMP N 4	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	300,000,000
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	290,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SMP N 1 - SMP N 2 - SMP N 3 - SMP N 4 - SMP N 5 - SMP N 6	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	100,000,000

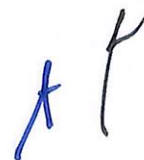
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350 Peserta Didik	98,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	350 Peserta Didik	30,000,000
1	01	02	2.02	0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Paket	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	650 Paket	15,000,000
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SMP N 1 - SMP N 2	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	30,000,000
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Peserta Didik	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	160,000,000
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Orang	977,328,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56 Orang	977,328,000
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350 Orang	311,078,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	300,000,000
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Satuan Pendidikan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	15 Satuan Pendidikan	15,000,000
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang	30,000,000
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen	20,000,000
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Satuan Pendidikan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	15 Peserta Didik	25,000,000
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Paket	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	375,000,000

1	01	02	2.02	0084	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lokasi: - SMP N 1 - SMP N 2 - SMP N 3	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300,000,000
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola		62 Satuan Pendidikan	4,232,430,000			Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	62 Satuan Pendidikan	4,036,480,000
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	50,000,000
1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	148,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	-
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	30,000,000
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	20,000,000
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	20,000,000
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Peserta Didik	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	500 Peserta Didik	80,000,000
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Orang	3,396,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang	3,396,480,000
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	342,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	325 Orang	300,000,000
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Satuan Pendidikan	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	61 Satuan Pendidikan	75,000,000
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	120 orang	15,000,000

1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	61 Satuan Pendidikan	30,000,000
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Paket	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	20,000,000
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola		3 Satuan Pendidikan	766,706,660			Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	186,000,000
1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	188,206,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0 Unit	-
1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	-
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Orang	49,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Orang	50,000,000
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	30 Orang	20,000,000
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	15,000,000
1	01	02	2.04	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Peserta Didik	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	3 Satuan Pendidikan	20,000,000
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		

1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	80,000,000	
1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	49,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					211,476,000			229,776,000	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina		2 Objek	211,476,000		Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	229,776,000	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola		2 Objek	115,000,000		Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola	2 Objek	130,000,000	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Objek	115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	130,000,000	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan		3 nagari	76,700,000		Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan	3 nagari	80,000,000	
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Objek	46,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	30,000,000	
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	50,000,000	
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina		3 lembaga	19,776,000		Jumlah lembaga adat yang dibina	3 lembaga	19,776,000	
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	19,776,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	3 Unit	19,776,000	

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan diatas akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang tahun 2024. Sub kegiatan yang ada telah mengakomodir urusan pendidikan dan urusan kebudayaan. Dengan adanya rumusan ini akan memberikan gambaran pendanaan pada rencana kerja dinas pendidikan untuk tahun 2024.



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDAAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rencana Kerja Tahun 2024 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran, beserta indikatornya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang. Penyusunan Rencana Kerja ini telah diupayakan sebaik – baiknya, terukur dan akuntabel. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan. Rencana kerja dan pendanaan OPD ini dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini



Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2024												
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				80,661,148,329						70,064,379,513
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				80,449,670,329						69,834,603,513
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				80,449,670,329						69,834,603,513
1 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan		100 Persen	55,616,897,332		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan produktif itas ekonomi sektor unggulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang	100 Persen	53,889,438,281
1 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah		90 Persen	53,547,816,682					90 Persen	51,473,305,561
1 01 01 2.02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	580 Orang/bulan	53,547,816,682	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				580 Orang/bulan	51,473,305,561
1 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah		90 Persen	459,720,650					90 Persen	626,707,350
1 01 01 2.06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	15,670,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	20,670,650
1 01 01 2.06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	124,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	129,050,000
1 01 01 2.06 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Paket	76,986,700
1 01 01 2.06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Laporan	300,000,000
1 01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	200,000,000					100 Persen	200,000,000
1 01 01 2.07 0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 unit	150,000,000
1 01 01 2.07 0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	50,000,000

1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		90 Persen	1,039,360,000					90 Persen	882,718,000
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan	- Kota Padang	1 Laporan	6,000,000	PENDAPATAN			15 Laporan	6,030,000
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan	- Kota Padang	3 Laporan	150,000,000	PENDAPATAN			3 Laporan	150,000,000
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan	- Kota Padang	12 Laporan	883,360,000	PENDAPATAN			12 Laporan	708,688,000
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		90 Persen	370,000,000				90 Persen	300,000,000
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	- Kota Padang Panjang, Semua	17 Unit	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			17 Unit	190,000,000
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13 Unit	10,000,000
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Unit	100,000,000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan		100 Persen	24,832,772,997				100 Persen	16,946,165,262
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola		38 Satuan Pendidikan	11,716,286,047				38 Satuan Pendidikan	6,808,128,000
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Ruang	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Ruang	-
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Ruang	227,000,000
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Ruang	450,000,000
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2,564,373,047	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Unit	400,000,000
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	310,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Ruang	-

1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	- Kota Padang Panjang, Semua	3 Unit	445,075,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			3 Unit	300,000,000
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Satuan Pendidikan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38 Satuan Pendidikan	100,000,000
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Ruang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Ruang	300,000,000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola		16 Satuan Pendidikan	8,117,351,300				14 Satuan Pendidikan	4,915,557,252
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	1 Ruang	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Ruang	-
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Ruang	-
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Ruang	-
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Ruang	-
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1,500,945,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Unit	300,000,000
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Ruang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Ruang	300,000,000
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Ruang	250,000,000
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Ruang	400,000,000

1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Ruang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Ruang	400,000,000
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	480,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	288,229,252
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	300,000,000
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	408,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	300,000,000
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	290,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	100,000,000
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350 Peserta Didik	98,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350 Peserta Didik	30,000,000
1	01	02	2.02	0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Paket	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				650 Paket	15,000,000
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	30,000,000
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Peserta Didik	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1000 Peserta Didik	160,000,000
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Orang	977,328,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				56 Orang	977,328,000
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350 Orang	311,078,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350 Orang	300,000,000
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Satuan Pendidikan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Satuan Pendidikan	15,000,000
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya	- Kota Padang Panjang, Semua	75 Orang	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				75 Orang	30,000,000

1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Dokumen	20,000,000
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Satuan Pendidikan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Peserta Didik	25,000,000
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Paket	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500 Paket	375,000,000
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	3 Ruang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Ruang	300,000,000
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola		62 Satuan Pendidikan	4,232,430,000					62 Satuan Pendidikan	4,036,480,000
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	50,000,000
1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	148,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	-
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	30,000,000
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	20,000,000
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	20,000,000
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Peserta Didik	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500 Peserta Didik	80,000,000

1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Orang	3,396,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250 Orang	3,396,480,000
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan,	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	342,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				325 Orang	300,000,000
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Satuan Pendidikan	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				61 Satuan Pendidikan	75,000,000
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120 orang	15,000,000
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				61 Satuan Pendidikan	30,000,000
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Paket	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150 Paket	20,000,000
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola		3 Satuan Pendidikan	766,706,650					3 Satuan Pendidikan	185,000,000
1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	188,206,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	-
1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan	Jumlah Alat Praktik dan	- Kota Padang	1 Paket	25,000,000	PENDAPATAN				0 Paket	-
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan	Jumlah Pendidik dan Tenaga	- Kota Padang	4 Orang	49,500,000	PENDAPATAN				4 Orang	50,000,000
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir	Jumlah Pendidik dan Tenaga	- Kota Padang	30 Orang	20,000,000	PENDAPATAN				30 Orang	20,000,000
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Orang	15,000,000
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket	0
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	0

1	01	02	2.04	0048	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Peserta Didik	220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Satuan Pendidikan	20,000,000
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	1 Unit	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	80,000,000
1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	49,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2	22								211,476,000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang		229,776,000
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi		2 Objek	211,476,000					4 Objek	229,776,000
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola		2 Objek	115,000,000					2 Objek	130,000,000
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Objek	115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Objek	130,000,000
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan		3 nagari	76,700,000					3 nagari	80,000,000
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Objek	46,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Objek	30,000,000
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	50,000,000
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina		3 lembaga	19,776,000					3 lembaga	19,776,000
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan yang Disediakan/Difasilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	19,776,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	19,776,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2024. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang selama tahun sebelumnya. Terlaksananya Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4 Kota Padang Panjang



Muji Sirwanto, S.Pd, M.Pd

NIP. 197102142002121004

4





**PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	29
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan....	39
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	41
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat	77
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN.....	78
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	78
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan	81
3.3 Program dan Kegiatan.....	86
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAN DINAS KESEHATAN	108
BAB V PENUTUP	123

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan pembangunan kesehatan dilaksanakan secara berkesinambungan serta dilakukan melalui proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah. Pedoman yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Kerja serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota No 62 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap

penyelenggaraan kegiatan Dinas serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan di tahun mendatang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja Dinkes) Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan periode 2024 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat di Kota Padang Panjang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Dinkes merupakan pedoman perubahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesehatan.

Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah yang sudah di prioritaskan pada Pembangunan Kota Padang Panjang di Tahun 2024, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dinas kesehatan melakukan penyusunan Renja Tahun 2024 yang berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD tahun 2024, yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kesehatan adalah :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- h. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

- i. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- j. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
- k. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12);
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; dan
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinkes adalah:

- 1) Sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun 2024 dengan mengacu pada RKPD Kota Padang Panjang dan berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan;
- 2) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja tahun berjalan;
- 3) Sinkronisasi dan optimalisasi pencapaian target kinerja Tahun 2024- 2026, khususnya untuk pencapaian target kinerja tahun 2024;
- 4) Akselerasi dalam pencapaian target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan kementerian;
- 5) Merumuskan prioritas dan sasaran dari Dinas Kesehatan Tahun 2024; dan
- 6) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Padang Panjang.

Tujuan Renja Dinas Kesehatan disusun adalah untuk:

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan bidang kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan untuk dilaksanakan pada Tahun 2024 sesuai dengan prioritas, kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat Kota Padang Panjang; dan
- 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kesehatan di dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang di bidang Kesehatan untuk mencapai target kinerja tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

BAB V Penutup

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinas Kesehatan adalah penjabaran perencanaan tahunan kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat diketahui berdasarkan laporan kinerja hasil yang disusun dapat diketahui berdasarkan laporan kinerja hasil dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran kinerja sasaran yang telah di capai atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selama tahun 2022.

Pencapaian kinerja selama tahun 2022 merupakan wujud dari kinerja secara menyeluruh dari Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan bersama masyarakat, Dalam pencapaian kinerja diatas Dinas Kesehatan juga mengacu kepada penetapan kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2022 serta Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kesehatan Tahun 2018 – 2023 yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari OPD.

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan terlaksana dengan baik dan memenuhi target (indikator) dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan dapat diukur dengan membandingkan indikator dan realisasi seperti pada tabel berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan
Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2023
Kota Padang Panjang

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output/Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatan tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								79.886.793.856	
1:02:0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								62.722.123.112	
1:02:0 1:2:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administarsi Keuangan Perangkat							60.522.325.312	

		Daerah										
1.02.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	500 Orang	1 Tahun	467 Orang	467 Orang	1 Orang	488 Orang	956	60.522.325.31 2	2	
1.02.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah								389.497.531		
1.02.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Jenis	5 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	1,25 Jenis	5 Jenis	15	24.890.510	3	
1.02.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian materai, jumlah dokumen yang dicetak/ digandakan dan alat tulis kantor yang disediakan	4 Jenis	5 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	1,25 Jenis	4 Jenis	14	114.406.390	4	
1.02.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	1 Jenis	4 Jenis	12	54.457.125	3	

1.02.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100 Kali	100 Kali	100 kali	100 kali	1 kali	100 Kali	300	195.743.506	3	
1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.262.068.030		
1.02.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	637 lembar	629 lembar	629 lembar	629 lembar	1 lembar	629 Lembar	188 7	5.820.000	3	
1.02.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan serta jumlah komponen listrik yang disediakan	600 tagihan	600 tagihan	600 tagihan	600 tagihan	1 tagihan	606 tagihan	180 6	183.878.006	3	
1.02.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor pegawai harian yang dibayarkan	37 orang	37 orang	37 orang	37 orang	1 orang	37 Orang	111	1.072.370.024	3	
1.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									548.232.239		

1.02.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 Unit	3	24.686.300	3	
1.02.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2, 3 dan 4 yang terpelihara	60 unit	60 unit	63 unit	60 unit	0,9523 81 unit	60 Unit	180	471.667.439	3	
1.02.0 1.2.09. 11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DKK)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dipelihara	7 gedung	7 gedun g	7 gedung	7 gedun g	1 gedun g	7 Gedung	21	51.878.500	3	
1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						#DIV/0 !				#DIV/ 0!	
	Pelayanan dan Penunjang BLUD	Pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	3		3	
1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP	100%				#DIV/0 !			16.914.215.81 9		

1.02.0 2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	60%					#DIV/0 1			1.518.062.834		
1.02.0 2.2.01. 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) di Puskesmas dan RSUD	5 Unit	4 Puskesmas	4 Puskesmas	4 Puskesmas	1	4 Puskesmas	12	649.229.130	2		
1.02.0 2.2.01. 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat dan vaksin pelayanan	2 paket	1 paket	2 paket	2 paket	1 paket	1 Paket	4	358.985.286	2		
1.02.0 2.2.01. 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah penyediaan bahan medis habis pakai, bahan kimia labor dan penunjang perbekalan kesehatan lainnya	3 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	3	407.819.424	1		
1.02.0 2.2.01. 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yg terpelihara	4 Puskesmas	4 Puskesmas	4 Puskesmas	4 Puskesmas	1 Puskesmas	4 Puskesmas	12	102.028.994	3		

1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal					#DIV/0 !			15.396.152.985		
1.02.0 2.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Ibu Hamil	35 Orang	50 Orang	50 Orang	1129 Orang	22,58 Orang	50 Orang	1229	29.343.550	35	
		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80 Kegiatan	80 Kegiatan			#DIV/0 !	80 Kegiatan	160		2	
		Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1010 Orang	1010 Orang	1010 Orang		0	1010 Orang	2020		2	
1.02.0 2.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	60 Nakes dan lintas sektor	60 Nakes dan lintas sektor	60 Nakes dan lintas sektor	1077 Orang	17,95 Orang	60 Nakes dan lintas sektor	1197	11.766.700	20	

		Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	102 3 orang		112 0 Orang	60 orang	0,0535 714 Orang	112 0 Orang	118 0		1	
1.02.0 2.2.02. 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	50 Orang nakes			102 6 orang	#DIV/0! Orang	60 Orang	108 6	21.505.500	22	
		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30 Kegiatan				#DIV/0! !	30 Kegiatan	30		1	
		Jumlah bayi baru lahir yang di SHK	300 bayi				#DIV/0! !	300 Bayi	300		1	
		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	102 3 Bayi				#DIV/0! !	102 3 Bayi	102 3		1	

ff

1.02.0 2.2.02. 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan Balita	80 Orang	4 Puske smas		504 2 orang	#DIV/0 ! Orang	48 Orang	509 4	7.255.247	64	
		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Balita	50 Kegiata n				#DIV/0 ! Orang	50 Kegiata n	50		1	
		Jumlah Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	399 7 Orang				#DIV/0 ! Orang	399 7 Orang	399 7		1	
1.02.0 2.2.02. 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Guru yang dilatih dan sekolah yang dimonev	10 Sekolah				#DIV/0 ! Orang	13 Sekolah	13	25.609.000	1	
		Jumlah anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan sesuai standar	134 46 Orang	13 Sekola h	134 46 orang	122 41 orang	0,9103 823 Orang	134 46 Orang	257 00		2	
1.02.0 2.2.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan	80 Orang	40 Orang	40 Orang	411 85 orang	1029,6 25 Orang	80 Orang	413 05	33.219.337	516	

06	Usia Produktif	strategi upaya pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif										
		Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	352 90 Orang		352 90 Orang		0	352 90 Orang	352 90		1	
1.02.0 2.2.02. 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	473 9 orang				#DIV/0 !	473 9 Orang	473 9	349.719.762	1	
		Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	110 Orang	50 Orang	50 Orang	492 8 Orang	98,56 Orang	50 Orang	502 8		46	
		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	35 Posyan du	35 Posya ndu	35 Posyan du	35 Posya ndu	1	35 Posyan du	105		3	

		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16 Kegiatan				#DIV/0!	16 Kegiatan	16		1	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	621 Orang		621 Orang		0	621 Orang	621		1	
1.02.0 2.2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	70 Orang	24 Orang	24 Orang	119 orang	4,9583 333 Orang	70 Orang	213	8.612.800	3	
		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan	16 Kali				#DIV/0!	16 Kegiatan	16		1	

		Jiwa Berat										
		Jumlah Penderita Gangguan jiwa berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	117 Orang		117 Orang		0	117 Orang	117		1	
1.02.0 2.2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah peserta sosialisasi orang terduga Tuberkulosis	70 Orang	80 Orang	70 Orang	233 1 Orang	33,3 orang	70 Orang	240 1	10.826 700	34	
		Jumlah Penderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	151 Orang		151 Orang		0	151 Orang	151		1	
1.02.0 2.2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100 Orang	1 Tahun	100 Orang	153 3 Orang	15,33 orang	100 Orang	163 4	20.558 500	16	

		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	24 Kegiatan					#DIV/0!	24 Kegiatan	24		1	
		Jumlah Penderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	1345 Orang		1345 Orang			0	1345 Orang	1345		1	
		Jumlah penemuan Penderita baru HIV	28 Orang					#DIV/0!	28 Orang	28		1	
1.02.0 2.2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita dan bumil kurang Gizi yang diberikan PMT	40 Orang	40 Orang	40 Orang	103 orang	2,575 orang	40 balita dan ibu hamil	183	120.792.115		5	
		Jumlah Sekolah yang mendapat kan PMT AS	20 sekolah	40 Orang	32 Sekolah		0	20 Sekolah	60			3	
		Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	150 Orang	137 Orang	137 Orang		0	137 Orang	274			2	

		program gizi										
		Jumlah pelaksanaan kegiatan surveilans	2 Kegiatan				#DIV/0!	2 Kegiatan	2		1	
		Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80 Orang				#DIV/0!	80 Orang	80		1	
1.02.0 2.2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Peserta Sosialisasi dan pemeriksaan Kebugaran CJH	160 Orang		150 Orang		0	150 Orang	150	23.315.300	1	
		Jumlah Peserta Sosialisasi dan pemeriksaan Kebugaran ASN,	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100 orang	1,6666 667 Orang	60 Orang	220		4	
		Jumlah Peserta Sosialisasi POS UKK	40 Orang	150 Orang	40 Orang		0	40 Orang	40		1	
		Jumlah peserta Sosialisasi Kes ker pada pekerja	40 Orang				#DIV/0!	40 Orang	40		1	

		informal										
1.02.0 2.2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pemusnahan obat kadaluarsa	500 kg	550 kg	500 kg	400 kg	0,8 kg	500 kg	145 0	130.192.960	3	
		Jumlah Penyemprotan	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	1 kali	50 Kali	150		3	
		Jumlah Sampah medis yang di bakar	300 kg		550 kg		0 kg	240 kg	240		1	
1.02.0 2.2.02. 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase pemantauan penyakit menular dan tidak menular	100 Kasus	100 Kasus	100 Kasus	100 Kasus	1 %	100 kasus	300	4.456.975	3	
1.02.0 2.2.02. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah pemantauan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza di wilayah kerja	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1		200		2	
1.02.0 2.2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah calon jemaah haji yang mendapat pembinaan	140 Orang	120 Orang	100 Orang	100 Orang	1 Orang	110 Orang	330	411.942.869	2	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan P3K	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1 kegiatan	5 Kegiatan	15		3	

		Persentase masyarakat yang terlayani oleh dokter warga dan pengaduan yang tertangani	100 persen		100 persen	100 persen	1	100 %	200		2	
1.02.0 2.2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta sosialisasi penyakit menular, dan penyakit tidak menular	80 Orang	50 Orang	120 Orang	240 Orang	2 Orang	40 Orang	330	337.577.900	4	
		Jumlah Posbindu PTM yang dilaksanakan	27 Posbindu	27 Posbindu	27 Posbindu	27 Posbindu	1 %	27 Posbindu	81		3	
1.02.0 2.2.02. 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan JKSS dan JKM PP	206 15 Orang	206 15 Orang	206 15 Orang	206 15 Orang	1 orang	206 15 Orang	618 45	11.073.810.63 6	3	
		Terlaksananya sosialisasi JKN	280 Orang	280 Orang			#DIV/0 !		280		1	
		Persentase pembayaran biaya operasional dan BMHP	100 Persen				#DIV/0 !		0		0	

		Persentase pembayaran jasa pelayanan	100 Persen				#DIV/0!		0		0	
1.02.0 2.2.02. 28	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan sekolah	Jumlah peserta sosialisasi (Anak Sekolah) tentang penyalahgunaan Napza	40 Orang	40 Orang	40 Orang	15 orang	0,375 orang	40 Orang	95		2	
		Jumlah Masyarakat yang yg dilakukan deteksi dini penyalahgunaan Napza	400 Orang	200 Orang	200 Orang	20 orang	0,1	400 Orang	620		2	
1.02.0 2.2.02. 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah tatanan dan kelembagaan kota sehat	7 Tatanan	7 Tatanan	7 Tatanan	7 Tatanan	1 tatanan	7 Tatanan	21	69.308.275	3	
1.02.0 2.2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yg melaksanakan Pelayanan Preventif, Promotif, Kuratif dan Rehabilitatif	4 Puskesmas	4 Puskesmas	4 Puskesmas	4 Puskesmas	1 puskesmas	4 Puskesmas	12	1.350.198.052	3	
1.02.0 2.2.02. 33	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan pelayanan fasilitas					#DIV/0!		0		#DIV/0!	

		kesehatan										
1.02.0 2.2.02. 34	Operasional PelayananKesehata n lainnya						#DIV/0 !	80 persen	80		#DIV/ 0!	
1.02.0 2.2.02. 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang dilakukan pemantauan mutu internal dan eksternal dengan survey Akreditasi	4 Puskes mas	4 Puskes mas	4 Puskes mas	4 Puskes mas	1	4 Puskes mas	12	63.441.275	3	
1.02.0 2.2.02. 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Penanganan Kejadian Luar Biasa	100 %	100 %	100 %	100 %	1	100 Persen	300	485.509.292	3	
1.02.0 2.2.02. 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan masyarakat yang terlayani pada SPGDT	100 %	100 %	100 %	100 %	1	100 Persen	300	787.322.065	3	
1.02.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDMK					#DIV/0 !		0	17.751.175	#DIV/ 0!	
1.02.0 3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah			80 Orang	50 Orang	80 Orang	1,6		160	17.751.175	#DIV/ 0!	

	Kabupaten/Kota												
1.02.0 3.2.03. 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang dilaksanakan peningkatan kopetensi melalui Uji Kopetensi	60 Orang	80 Orang	50 Orang	80 Orang	1,6	60 Orang	220	17.751.175	4		
1.02.0 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum					#DIV/0!				#DIV/0!		
1.02.0 4.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makan Minuman Tertentu yang dapat					#DIV/0!				#DIV/0!		

		diproduksi oleh industri Rumah Tangga										
1.02.0 4.2.03. 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Pelaku Usaha IRT yang diberikan Bimtek	75 Orang		100 Orang		0	45 Orang	45		#DIV/ 0!	
1.02.0 4.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						#DIV/0 !				#DIV/ 0!	
1.02.0 4.2.06. 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Sampel makanan dan minuman yang diuji	30 Sampel		30 Sampel		0	30 Sampel	30		1	

		Jumlah Sarana IRTP yang diawasi	70 sarana IRTP		70 sarana IRTP		0	70 sarana IRTP	70		1	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan masyarakat dengan PHBS					#DIV/0!			232.703.750	#DIV/0!	
		Persentase Upaya Promosi Kesehatan					#DIV/0!				#DIV/0!	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota					#DIV/0!			232.703.750	#DIV/0!	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah guru UKS yang ikut sosialisasi	10 Sekolah	50 Orang	50 Orang	50 Sekolah	1	15 Orang	115	232.703.750	12	
		Jumlah lembaga yang menerima hibah	1 Lembaga				#DIV/0!	1 Lembaga	1		1	

		Jumlah sekolah yang dilatih SBH	10 Sekolah	13 Sekolah	13 Sekolah	50 Sekolah	3,8461 538	15 Sekolah	78		8	
		Jumlah kelurahan yang dilakukan monev	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	1	16 Kelurahan	48		3	
		Jumlah masyarakat yang diberikan KIE Keamanan Pangan	300 Orang	16 Kelurahan	275 Orang	605 Orang	2,2	30 Orang	651		2	
		Jumlah kader/petugas yang ikut sosialisasi	50 Orang				#DIV/0!	50 Orang	50		1	
1.02.0 5.2.03. 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah tenaga penyuluhan yang ikut Bimtek, Jumlah kader UKBM, BATRA yang ikut Bimtek					#DIV/0!	3 Kali	3		#DIV/0!	



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Analisis kinerja dilakukan terhadap indikator tujuan dan sasaran. Untuk indikator kinerja sasaran yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut. Dari data capaian Indikator Sasaran/program yang masuk dalam indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diperoleh dari data pencapaian Kota dan dihitung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kota Padang Panjang
Tabel 2.2.1**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rasio Daya Tampung RumahSakit Terhadap Jumlah Penduduk											
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi											
1	PelayananHamil Kesehatan Ibu hamil	√	√	100%	100%	100%	100%		81,31	100%	100%	Terjadi peningkatan realisasi capaian kinerja yang cukup signifikan Penurunan realisasi dikarenakan pada saat covid-19, Ibu balita enggan membawa balitanya ke Posyandu
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	√	√	100%	100%	100%	100%		82,92	100%	100%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	√	√	100%	100%	100%	100%		82,65	100%	100%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	√	√	100%	100%	100%	100%		77,15	100%	100%	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	√	√	100%	100%	100%	100%		85,60	100%	100%	Terjadi peningkatan

ff

6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	√	√	100%	100%	100%	100%		61,32	100%	100%	realisasi capaian kinerja
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	√	√	100%	100%	100%	100%		94,36	100%	100%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	√	√	100%	100%	100%	100%		30,71	100%	100%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	√	√	100%	100%	100%	100%		100	100%	100%	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	√	√	100%	100%	100%	100%		100	100%	100%	
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis (TB)								66,32			
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV								87,67			

ff

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan 2018-2023
Tabel 2.2.2

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indek Keluarga sehat				0.45	0.55	0.35	0.45	0.55	0.33	0.337	0.39			94%	73,33	70,91		
2	Persentase Stunting				17.5	17	16,5	16	15.5	19,47	16,8	15.60			90%	101%	105,45%		
3	AKI				0	0	4	4	3	0	4	3			100%	0	0		
4	AKB				12	11	10	10	9		7	5	11			154%	90%		
5	Presentase UHC				96,25	97,17	98,9	95%	95	96,15	95,59	99,46			98,86%	98,37%	101,40%		

Capaian Renstra Revisi Dinas Kesehatan 2021-2023
Tabel 2.2.3

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase penurunan Kematian Ibu							25%	25%				33,30%					66,80%	
2	Persentase penurunan Kematian Bayi							20%	20%				18,20%					109%	
3	Indek Keluarga Sehat							0,45					0,44					97,78	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat							A					A					100	
5	Presentase UHC							95%					98,90%					104,11	

Dari Tabel diatas dapat dianalisa Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan sebagai berikut:

1. Persentase penurunan Kematian Ibu

AKI dan AKB merupakan indikator yang digunakan sebagai indeks pembangunan ekonomi, indikator kualitas hidup dan komponen utama penentu angka harapan hidup suatu masyarakat. Peningkatan AKI dan AKB menjadi masalah yang sangat mendasar, karena berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkannya, dan merupakan indikator utama yang harus dituntaskan permasalahannya. Tetapi belum saja bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Sehingga masih menjadi masalah mendasar dalam pembangunan di bidang kesehatan.

AKI merupakan indikator yang digunakan sebagai indeks pembangunan ekonomi, indikator kualitas hidup dan komponen utama penentu angka harapan hidup suatu masyarakat. Peningkatan AKI menjadi masalah yang sangat mendasar, karena berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkannya, tetapi belum saja bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Sehingga masih menjadi masalah mendasar dalam pembangunan di bidang kesehatan.

Penurunan AKI dan AKB juga merupakan penentu tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) yang merupakan urusan wajib di bidang kesehatan. Untuk Angka harapan hidup kita tidak dapat menggunakannya karena angka kematian memakai rumus per seribu kelahiran sedang untuk Kota Padang Panjang tidak mencapai 1000 kelahiran setiap tahunnya.

Untuk Tahun 2022 ini kita menggunakan Indikator kinerja dengan penurunan jumlah kematian ibu yaitu menargetkan setiap tahun jumlah kematian ini berkurang sebanyak 20% dimana ditahun 2021 jumlah kematian ibu sebanyak 3 orang maka untuk tahun 2022 ini untuk mencapai target 20% penurunan jumlah kematian ibu itu paling banyak 1 orang, tetapi pada tahun 2022 ini belum mencapai sesuai yg targetkan dimana jumlah kasus kematian pada tahun 2022 ini sebanyak 2 kasus kematian ibu dimana kematian ibu tersebut disebabkan oleh Preeklamsi .

2. Persentase penurunan Kematian Bayi

AKB merupakan indikator yang digunakan sebagai indeks pembangunan ekonomi, indikator kualitas hidup dan komponen utama penentu angka harapan hidup suatu masyarakat. Peningkatan AKB menjadi masalah yang sangat

mendasar, karena berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkannya, tetapi belum saja bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Sehingga masih menjadi masalah mendasar dalam pembangunan di bidang kesehatan. Untuk Angka harapan hidup kita dapat menggunakannya karena untuk angka kematian kita memakai rumus per seribu kelahiran sedang untuk Kota Padang Panjang tidak mencapai 1000 kelahiran.

Untuk Tahun 2022 ini kita menggunakan Indikator kinerja dengan penurunan jumlah kematian Bayi yaitu kita menargetkan setiap tahun jumlah kematian ini berkurang sebanyak 25% dimana ditahun 2021 jumlah kematian Bayi sebanyak 11 orang maka untuk tahun 2022 ini jumlah kematian Bayi sesuai target penurunnya paling banyak adalah 9 orang sehingga penurunan kematian sebanyak 25% bisa kita capai, jumlah kematian bayi sebanyak 9 orang (realisasi 18,2%) ini menunjukkan penurunan jumlah kematian dari tahun sebelumnya,

Faktor penyebab kematian pada bayi adalah Aspexia, BBLR dan kelaianan bawaan, meskipun demikian diharapkan tidak ada kematian pada bayi ditahun berikutnya .

3. Indeks Keluarga Sehat.

Kementerian Kesehatan telah merumuskan 12 indikator yang dipakai untuk menentukan indikator keluarga sehat dengan kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

- a) Keluarga mengikuti program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi.
- b) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, bidan praktek swasta).
- c) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi lengkap yaitu: HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio1, Polio2, Polio 3, Polio 4 dan Campak
- d) Bayi mendapat ASI eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7-23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0-6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif).

- e) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2-59 Bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/ buku KIA.
- f) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk dokter/petugas kesehatan.
- g) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.
- h) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya.
- i) Anggota keluarga tidak ada yang merokok adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang-kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau. Termasuk di sini adalah jika anggota keluarga tidak pernah atau sudah berhenti dari kebiasaan menghisap rokok atau produk lain dari tembakau.
- j) Keluarga sudah menjadi anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/ atau kartu kepesertaan asuransi kesehatan lainnya.
- k) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.
- l) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.

Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni Keluarga Sehat bila nilai IKS $> 0,8$, Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS $0,5 \leq 0,8$ dan Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS $< 0,5$.

Jika dilihat dari nilai IKS Padang Panjang masih termasuk keluarga tidak sehat untuk target Indeks Keluarga Sehat pada tahun 2022 adalah 0,45. Dengan capaian Tahun 2022 adalah 0,44 atau sebesar 97,78%. Dapat kita bandingkan dengan IKS tahun 2021 ditahun 2022 ini IKS di Kota Padang Panjang lebih baik dari tahun 2021 yaitu 0,39, sedangkan sampai dengan Tahun 2022 ini Indeks Keluarga Sehat Kota Padang Panjang dari target 0,45 tercapai 0,44 atau 97,78%.

Pencapaian Kota Padang panjang Tahun 2022 sebesar 0,44 terdapat peningkatan IKS penduduk Kota Padang Panjang dari tahun sebelumnya tetapi tidak tercapai sesuai dengan yang ditargetkan karena ada beberapa Indikator yg tidak tercapai disini lebih keprilaku karena untuk merubah kebiasaan merokok dimasyarakat sangatlah sulit, Penderita hipertensi yang enggan untuk memeriksakan kesehatan dan meminum obat secara rutin.

4. Persentase Universal Health Coverage (UHC)

UHC merupakan cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 95% dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN.

Seiring dengan dilaksanakannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014 semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, POLRI dan Jamkesmas) diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), demikian pula dengan Program JKMP dan JKSS.

Pemerintah bertanggung jawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan iuran (PBI). Selanjutnya dalam bentuk pengembangan sistem pembiayaan kesehatan sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial yang didalamnya termaktub dalam sistem jaminan kesehatan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang masih tetap mengembangkan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah, dengan 2 (dua) sasaran yang berbeda :

- a. Mengintegrasikan masyarakat miskin yang belum masuk dalam basis data pusat/ Basis Data Terpadu (BDT).
- b. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat kota Padang Panjang, Capaian Indikator Persentase Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2022 adalah 98,9% dari target 95% (104,11%) dimana Pemerintah Kota Padang Panjang sudah memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya melebihi dari yang ditargetkan ditahun 2022,hal ini dapat kita lihat keseriusan Pemko Padang Panjang untuk memberikan jaminan Kesehatan kepada Masyarakatnya.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Keberhasilan yang diperoleh dari suatu pelayanan kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan berhubungan erat dengan kepuasan pasien atau masyarakat.Indek Kepuasan Masyarakat menjadi Indikator Kinerja pada RSUD Kota Padang Panjang. Adanya perubahan paradigma baru pembangunan kesehatan, dimana pelayanan kepada masyarakat menjadi aspek penting untuk dikedepankan, maka pelayanan masyarakat dibidang kesehatan juga perlu semakin ditingkatkan.

Meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan ini membawa konsekuensi perlunya peningkatan tenaga kesehatan yang terampil. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Reformasi di bidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikan pelayanan kesehatan lebih efisien, efektif, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Indek Kepuasan masyarakat Kota Padang Panjang tahun 2022 dengan target A dimana capaian Indek Kepuasan masyarakat di Rumah sakit pada Tahun 2022 ini dengan Nilai A, dimana RSUD dari tahun ketahun berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dari sarana prasarana maupun pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan sumber data E-pggbm (Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) diketahui sekitar 419 balita stunting dari 3.330 balita yang diukur, dari perhitungan tersebut disimpulkan bahwa prevalensi stunting pada balita adalah sebesar 14,74% , kondisi tersebut menggambarkan bahwa pencapaian target prevalensi stunting telah melampau target Renstra Kota

Padang Panjang tahun 2022 yaitu 15,51%. dimana terjadi penurunan dari tahun 2021 yang terjaring balita stunting sebanyak 519 balita.

Beberapa faktor pendukung pencapaian target adalah :

1. Penguatan surveilans gizi dengan meningkatkan deteksi dini masalah gizi pada balita pada pemantauaun tumbuh kembang pada posyandu balita setiap bulan dengan dibuktikan peningkatan jumlah kunjungan balita ke posyandu dari tahun 2021 D/S sekitar 82,68% dan pada tahun 2022 sekitar 87,31%.
2. Pemberian makanan tambahan pabrian pada balita gizi kurang dan bumil KEK bertujuan menambahkan asupan gizi dalam upaya perbaikan status gizi yang didistribusikan pada saat sasaran di rujuk ke puskesmas.
3. Pembentukan Pos Gizi di beberapa kelurahan di wilayah kerja puskesmas, sebagai tempat penyelenggaraan makanan tambahan lokal (PMT Lokal) bagi balita dan bumil dengan mengkombinasikan peningkatan pengetahuan ibu balita dan ibu hamil.
4. Penguatan perluasan sasaran edukasi gizi sejak dari hulu (calon ibu) di mulai dari peningkatan edukasi gizi pada remaja putri dan calon pengantin agar pahami pentingnya gizi seimbang sesuai kebutuhan.
5. Penguatan kualitas pelayanan dan integrasi program dalam integrasi konseling dan penyuluhan gizi pada Pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita di setiap kelurahan.
6. Penguatan koordinasi lintas OPD terkait intervensi spesifik dan sensitive bagi sasaran ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita.
7. Optimalisasi kegiatan konvergensi stunting lintas OPD terkait pemetaan sasaran perwilayah

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Berisikan uraian mengenai:

Identifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Data/informasi Terkait	Isu Strategis
1	2	3	4
Masih adanya Kematian Ibu (AKI) di Kota Padang Panjang dibawah target yang Kementerian Kesehatan	Pencegahan kematian ibu tidak dilakukan secara terintegrasi dan tidak didukung oleh sumber dayayang maksimal.	Profil Kesehatan	Pencegahan Kematian Ibu secara terintegrasi
Masih adanya Kematian Bayi (AKB) di Kota Padang Panjang diatas target Renstra dinkes	Adanya kelainan bawaandari bayi, komplikasi neonatus, Aspexia.	Profil Kesehatan	Pencegahan Kematian Bayi
Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting	Metode pencegahan danpenanganan yang dilakukan masih kurang tepat sasaran	Profil Kesehatan	Pencegahan dan Penanganan Balita Gizi Buruk dan BalitaStunting Terintegrasi
Belum semua masyarakat Padang Panjang mempunyai Jaminan Kesehatan	kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftar sebagai pesertapeserta JKN	Profil Kesehatan	Penguatan system janiman social kesehatan Kota Padang Panjang
Masih belum terkendalnya penyakit menular, seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru dan Penyakit Menular Lainnya	Masih Kurangnya pengetahuan masyarakattentang penyakit menularserta pencegahannya	Profil Kesehatan	Peningkatan KIE kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok potensialdi masyarakat tentangpenyakit menular

Masih rendahnya pelayanan penderita penyakit tidak menular (Hipertensi, DM,	Masih belum maksimalnyaskrining pelayanan kesehatan di masyarakat	Profil Kesehatan	Penguatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga
Masih rendahnya capai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan		Laporan SPM Tahun 2022	
Masih rendahnya indeks keluarga sehat			

Derajat kesehatan merupakan salah satu sasaran prioritas pembangunan Kota Padang Panjang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang 23 Tahun 2004 bahwa kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur pencapaian keberhasilan program kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terpadu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Kesehatan, yang dapat diukur melalui umur harapan hidup (UHH).

Umur harapan hidup ditentukan oleh mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka kesakitan). Secara umum pelayanan dan pengelolaan kesehatan di Kota Padang Panjang cukup baik, namun masih perlu lebih dioptimalkan. Optimalisasi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat diperlukan dalam rangka tercapainya standar pelayanan minimal bidang Kesehatan sehingga dapat menekan kasus kematian ibu hamil dan kematian bayi. Belum optimalnya kualitas pelayanan maternal dan neonatal diindikasikan menjadi salah satu penyebab terjadinya kematian bayi, ibu hamil.

Disamping itu tingginya kasus gizi kurang juga menjadi penyebab perlunya penguatan pelayanan primer dan rujukan. Isu stunting merupakan isu nasional yang merupakan program nasional yang ditargetkan dapat mencapai 14 persen pada tahun 2024. Dalam hal ini isu stunting juga merupakan isu utama di Kota

Padang Panjang karena masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya terintegrasi antar berbagai pihak dalam penurunan stunting ini.

Anak stunting akan mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, kesulitan dalam belajar, daya tahan tubuh yang lemah, berat badan cenderung turun dan sering demam atau sakit-sakitan. Penyebab stunting dapat juga terjadi sejak dari usia dalam kandungan, sangat rentan pada usia 1000 hari masa kehidupan. Bila kecukupan gizi selama masa kandungan tidak mencukupi maka rentan dengan kelahiran dengan berat badan rendah, panjang fisik di bawah rata-rata anak yang kelahirannya sehat.

Derajat kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari angka indeks keluarga sehat, dimana untuk Kota Padang Panjang masih tergolong kategori rendah. Kebijakan intervensi perlu dilakukan termasuk pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan terutama sekali Puskesmas dan Poskeskel yang memenuhi standar mutu dan peningkatan kualitas sumber daya Kesehatan lainnya.

Upaya preventif melalui upaya promosi kesehatan masyarakat dalam meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), disamping itu juga kesehatan lingkungan yang belum diterapkan masyarakat secara maksimal. Selain itu cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) yang belum tercapai di Kota Padang Panjang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Padang Panjang kedepan.

Relatif masih tingginya penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi merupakan salah satu akibat belum lengkapnya imunisasi dasar. Sekaitan dengan itu maka masih perlunya optimalisasi upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk untuk mencapai *Universal Child Immunization* (UCI)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2024 sudah menuangkan fungsi dan tugas Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPD tahun 2024.

Secara garis besar program dan kegiatan sama dengan tahun sebelumnya tetapi ada program dan kegiatan yang baru menggunakan selain APBD. Ada perubahan jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD karena dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.4 TC 3.1

Tabel 2.4 TC.31

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Kesehatan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Sumber Dana
Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp 144,525,259,717	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp 144,322,759,217	APBD
1.02.0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang	100 %	Rp. 129,115,980,600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase pemenuhan urusan penunjang	100 %	Rp 128,913,435,535	

	KABUPATEN/ KOTA		dipenuhi			KABUPATEN/KOTA		yang dipenuhi			
1.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	Rp 60,051,653,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	Rp 60,051,653,000
1.02.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	493	Orang	Rp 60,051,653,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	493	Orang	Rp 60,051,653,000
1.02.0 1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Tahun	Rp 247,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Tahun	Rp 247,500,000
1.02.0 1.1.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	Rp 150,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	Rp 247,500,000
1.02.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat		Terlaksananya Administrasi Umum	1	Tahun	Rp 247,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	1	Tahun	Rp 247,500,000

ff

Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	
1.02.0 1.1.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	Rp 29,074,300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Dinas Kesehatan dan IFK		1 Paket	Rp 7,716,300	Dinas Kesehatan dan IFK
	Puskesmas Bukit Surungan		1 Paket	Rp 5,683,000	Puskesmas Bukit Surungan
	Puskesmas Kebun Sikolos		1 Paket	Rp 5,000,000	Puskesmas Kebun Sikolos
	Puskesmas Koto Katiak		1 Paket	Rp 5,000,000	Puskesmas Koto Katiak
	Puskesmas Gunung		1 Paket	Rp 5,675,000	Puskesmas Gunung

ff

1.02.0 1.1.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	Rp 99,758,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	Rp 99,757,450	
	Dinas Kesehatan dan IFK			1 Paket	Rp 38,606,600	Dinas Kesehatan dan IFK			1 Paket	Rp 38,606,500	
	Puskesmas Bukit Surungan			1 Paket	Rp 15,287,900	Puskesmas Bukit Surungan			1 Paket	Rp 15,287,900	
	Puskesmas Kebun Sikolos			1 Paket	Rp 15,287,900	Puskesmas Kebun Sikolos			1 Paket	Rp 15,287,150	
	Puskesmas Koto Katiak			1 Paket	Rp 15,287,900	Puskesmas Koto Katiak			1 Paket	Rp 15,287,900	
	Puskesmas Gunung			1 Paket	Rp 15,287,900	Puskesmas Gunung			1 Paket	Rp 15,287,900	
1.02.0 1.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	Rp 38,829,050	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	Rp 38,828,750	
	Dinas Kesehatan			1 Paket	Rp 24,999,850	Dinas Kesehatan dan IFK			1 Paket	Rp 24,999,550	

	dan IFK										
	Puskesmas Bukit Surungan			1 Paket	Rp 3,457,300	Puskesmas Bukit Surungan			1 Paket	Rp 3,457,300	
	Puskesmas Kebun Sikolos			1 Paket	Rp 3,457,300	Puskesmas Kebun Sikolos			1 Paket	Rp 3,457,300	
	Puskesmas Koto Katiak			1 Paket	Rp 3,457,300	Puskesmas Koto Katiak			1 Paket	Rp 3,457,300	
	Puskesmas Gunung			1 Paket	Rp 3,457,300	Puskesmas Gunung			1 Paket	Rp 3,457,300	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah lapran peneyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	Rp 300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah lapran peneyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	Rp 300,000,000	
	Dinas Kesehatan dan IFK				Rp 300,000,000	Dinas Kesehatan dan IFK				Rp 300,000,000	

1.02.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	80	%	Rp 419,434,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	80	%	Rp 419,434,000	
1.02.0 1.1.07 .01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraanPe rorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	Unit	Rp 300,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraanPer orangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	Unit	Rp -	
1.02.0 1.1.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9	Unit	Rp 119,434,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9	Unit	Rp 119,434,000	
1.02.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	Rp 1,428,896,188	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	Rp 1,428,896,188	

FA

1.02.0 1.1.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan surant menyurat yang disediakan	12 Lapor an	Rp 6,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan surant menyurat yang disediakan	12 Lapora n	Rp 6,000,000	
	Dinas Kesehatan dan IFK				Rp 2,000,000	Dinas Kesehatan dan IFK				Rp 2,000,000	
	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 1,000,000	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 1,000,000	
	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 1,000,000	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 1,000,000	
	Puskesmas Koto Katiak				Rp 1,000,000	Puskesmas Koto Katiak				Rp 1,000,000	
	Puskesmas Gunung				Rp 1,000,000	Puskesmas Gunung				Rp 1,000,000	
1.02.0 1.1.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Lapor an	Rp 240,510,113	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Lapora n	Rp 240,509,788	

	Dinas Kesehatan dan IFK				Rp 58,376,238	Dinas Kesehatan dan IFK				Rp 58,376,238	
	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 45,598,525	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 45,598,200	
	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 48,400,190	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 48,400,190	
	Puskesmas Koto Katiak				Rp 46,239,100	Puskesmas Koto Katiak				Rp 46,239,100	
	Puskesmas Gunung				Rp 41,896,060	Puskesmas Gunung				Rp 41,896,060	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 1,182,387,040	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 1,182,336,400	
	Dinas Kesehatan dan IFK				436,053,440	Dinas Kesehatan dan IFK				436,052,800	
	Puskesmas Bukit				212,478,400	Puskesmas Bukit Surungan				212,478,400	

	Surungan										
	Puskesmas Kebun Sikolos				210,019,200	Puskesmas Kebun Sikolos				210,019,200	
	Puskesmas Koto Katiak				108,182,400	Puskesmas Koto Katiak				108,182,400	
	Puskesmas Gunung				174,553,600	Puskesmas Gunung				174,553,600	
	Rumah Sakit				41,100,000	Rumah Sakit				41,100,000	
1.02.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 685,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 685,000,000	
1.02.0 1.1.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Rp 35,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Rp 35,000,000	

14

1.02.0 1.1.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya	75	Unit	Rp 500,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya	75	Unit	Rp 500,000,000	
	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya			Rp 280,000,000	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya			Rp 280,000,000	Rp -
	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak			Rp 55,000,000	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya			Rp 55,000,000	

			perizinannya								
	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		Rp 55,000,000	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		Rp 55,000,000	
	Puskesmas Koto Katiak		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		Rp 55,000,000	Puskesmas Koto Katiak		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		Rp 55,000,000	

24

	Puskesmas Gunung		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		Rp 55,000,000	Puskesmas Gunung		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		Rp 55,000,000	
1.02.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya Lainnya yang dipelihar	50 Unit	Rp 50,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya Lainnya yang dipelihar	50 Unit	Rp 50,000,000	
1.02.0 1.1.09 .11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	Rp 100,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	Rp 100,000,000	
1.02.0 1.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp 65,913,534,897	Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp 65,913,534,847	

f 4

1.02.0 1.1.10 .01	Pelayanan dan Penunjang BLUD		Junlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	Rp 65,913,334,897	Pelayanan dan Penunjang BLUD		Junlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	Rp 65,913,334,647	
1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	80 %	Rp 14,971,279,117	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	80 %	Rp 14,971,321,782	
1.02.0 2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	75 %	Rp 980,000,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	75 %	Rp 980,000,000	
1.02.0 2.2.01 .02	Pembangunan Puskesmas		Jumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang dibangun	1 Unit		Pembangunan Puskesmas		Jumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang dibangun	1 Unit		

ff

			Jumlah lahan Poskeskel yg diadakan	1 Lokasi	Rp 400,000,000			Jumlah lahan Poskeskel yg diadakan	1 Lokasi	Rp 400,000,000	
	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan Rumah sakit berdasarkan kelas rumah yang memenuhi rasio tempat tidur sakit	2 Unit		Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan Rumah sakit berdasarkan kelas rumah yang memenuhi rasio tempat tidur sakit	2 Unit		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan diadakan	1 Paket	Rp 100,000,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan diadakan	1 Paket	Rp 100,000,000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1 Paket	Rp 250,000,000	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1 Paket	Rp 250,000,000	

1.02.0 2.2.01 .17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1 Paket	Rp 150,000,000	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1 Paket	Rp 150,000,000	
1.02.0 2.2.01 .18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yg terpelihara	4 Pusk	Rp 80,000,000	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yg terpelihara	4 Pusk	Rp 80,000,000	
	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 20,000,000	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 20,000,000	
	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 20,000,000	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 20,000,000	
	Puskesmas Koto Katiak				Rp 20,000,000	Puskesmas Koto Katiak				Rp 20,000,000	
	Puskesmas Gunung				Rp 20,000,000	Puskesmas Gunung				Rp 20,000,000	
1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 %	Rp 13,991,279,117	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 %	Rp 13,991,321,762	

4

1.02.0 2.2.02 .01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	1129 orang	Rp 20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1129 orang	Rp 20,000,150
1.02.0 2.2.02 .02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	1077 orang	Rp 20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1077 orang	Rp 19,999,900
1.02.0 2.2.02 .03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	1026 orang	Rp 35,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1026 orang	Rp 35,040,000
1.02.0 2.2.02 .04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai	3957 orang	Rp 25,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3957 orang	Rp 25,005,000

			standar								
1.02.0 2.2.02 .05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	12241 orang	Rp 35,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12241 orang	Rp 35,000,500	
1.02.0 2.2.02 .06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah penduduk Usia Produktif yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	41185 orang	Rp 30,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41185 orang	Rp 29,979,000	
1.02.0 2.2.02 .07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	4928 orang	Rp 427,300,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4928 orang	Rp 427,312,000	

17

	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 84,700,000	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 84,712,000	
	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 93,000,000	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 93,000,000	
	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 76,800,000	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 76,800,000	

ft

	Puskesmas Koto Katiak		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 67,200,000	Puskesmas Koto Katiak		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 67,200,000	
	Puskesmas Gunung		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 105,600,000	Puskesmas Gunung		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 105,600,000	
1.02.0 2.2.02 .08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai standar	12234 orang	Rp 35,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai standar	12234 orang	Rp 34,999,800	
1.02.0 2.2.02 .09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan Kesehatan	950 orang	Rp 20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan Kesehatan	950 orang	Rp 19,999,750	

			Sesuai standar					Sesuai standar			
1.02.0 2.2.02 .10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah orang yang mendapat pelayanan Kesehatan orang gangguan jiwa berat Sesuai standar	117 orang	Rp 15,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah orang yang mendapat pelayanan Kesehatan orang gangguan jiwa berat Sesuai standar	117 orang	Rp 14,999,700	
1.02.0 2.2.02 .11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan Sesuai standar	2331 orang	Rp 35,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan Sesuai standar	2331 orang	Rp 34,999,950	
1.02.0 2.2.02 .12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1533 orang	Rp 30,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1533 orang	Rp 29,999,700	

ff

	pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	Rp 20,000,000	pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	Rp 19,999,700	
1.02.0 2.2.02 .15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	60 Dokumen	Rp 300,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	60 Dokumen	Rp 299,990,400	
	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah Balita Gizi Kurang dan Ibu hamil KEK dan Anemi yg diberikan PMT	60 Orang	Rp 100,661,600	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah Balita Gizi Kurang dan Ibu hamil KEK dan Anemi yg diberikan PMT	60 Orang	Rp 100,652,000	
	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Program Gizi	4 Kali	Rp 50,000,000	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Program Gizi	4 Kali	Rp 50,000,000	

	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 50,000,000	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 50,000,000		
	Puskesmas Koto Katiak				Rp 50,000,000	Puskesmas Koto Katiak				Rp 50,000,000		
	Puskesmas Gunung				Rp 49,338,400	Puskesmas Gunung				Rp 49,338,400		
1.02.0 2.2.02 .16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2	Doku men	Rp 20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2	Dokum en	Rp 19,999,950
1.02.0 2.2.02 .17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12	Doku men	Rp 75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12	Dokum en	Rp 75,000,000
			Jumlah Sampah Medis dan Obat Kadaluarsa yg di musnahkan	1,000	Kg				Jumlah Sampah Medis dan Obat Kadaluarsa yg di musnahkan	1,000	Kg	

ff

			Jumlah Pelaksanaan Fogging	50 Kali				Jumlah Pelaksanaan Fogging	50 Kali		
1.02.0 2.2.02 .23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	8 Dokumen	Rp 554,364,300	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	8 Dokumen	Rp 548,833,615	
	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah pelaksanaan pembinaan jemaah haji	5 Kali	Rp 177,520,300	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah pelaksanaan pembinaan jemaah haji	5 Kali	Rp 181,989,615	
	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah pelaksanaan kegiatan P3K	5 Kegiatan	Rp 96,620,400	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah pelaksanaan kegiatan P3K	5 Kegiatan	Rp 86,620,400	
	Puskesmas Kebun Sikolos		Persentase masyarakat yang terlayani oleh dokter warga dan pengaduan yang tertangani	100 %	Rp 97,466,200	Puskesmas Kebun Sikolos		Persentase masyarakat yang terlayani oleh dokter warga dan pengaduan yang tertangani	100 %	Rp 97,466,200	
	Puskesmas Koto Katiak				Rp 96,191,200	Puskesmas Koto Katiak				Rp 86,191,200	

	Puskesmas Gunung				Rp 86,566,200	Puskesmas Gunung				Rp 96,566,200	
1.02.10 2.2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 doku men	Rp 313,572,400	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokum en	Rp 319,122,200	
	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penyakit Menular dan tidak menular	40 Orang	Rp 124,772,400	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penyakit Menular dan tidak menular	40 Orang	Rp 124,722,200	
	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah pelaksanaan Pos Bindu PTM	27 Pos bindu	Rp 52,000,000	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah pelaksanaan Pos Bindu PTM	27 Pos bindu	Rp 57,600,000	
	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah pelaksanaan penjangkaran PTM	2 Kegiat am	Rp 50,400,000	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah pelaksanaan penjangkaran PTM	2 Kegiat am	Rp 50,400,000	
	Puskesmas Koto Katiak				Rp 43,200,000	Puskesmas Koto Katiak				Rp 43,200,000	

	Puskesmas Gunung				Rp 43,200,000	Puskesmas Gunung			Rp 43,200,000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	15 Dokumen	Rp 10,667,394,720	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	15 Dokumen	Rp 10,667,394,720
	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah Masyarakat yg diberikan jaminan pelayanan kesehatan	22000 Orang	Rp 7,588,192,580	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah Masyarakat yg diberikan jaminan pelayanan kesehatan	22000 Orang	Rp 7,588,192,580
	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 850,000,000	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 850,000,000
	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 1,015,202,340	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 1,015,202,340
	Puskesmas Koto Katiak				Rp 563,999,800	Puskesmas Koto Katiak				Rp 563,999,800
	Puskesmas Gunung				Rp 650,000,000	Puskesmas Gunung				Rp 650,000,000

ff

1.02.0 2.2.02 .29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan penelitian kesehatan	1 Doku men	Rp 25,000,000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan penelitian kesehatan	1 Dokum en	Rp 24,999,350	
			Jumlah tatanan dan kelembagaan kota sehat	10 Tatan an				Jumlah tatanan dan kelembagaan kota sehat	10 Tatana n		
1.02.0 2.2.02 .33	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	12 Doku men	Rp 100,000,000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	12 Dokum en	Rp 99,998,000	
1.02.0 2.2.02 .33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Doku men	Rp 120,000,000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokum en	Rp 120,000,000	
	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 30,000,000	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 30,000,000	
	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan		Rp 30,000,000	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan		Rp 30,000,000	

			Puskesmas					Puskesmas			
	Puskesmas Koto Katiak		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 30,000,000	Puskesmas Koto Katiak		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 30,000,000	
	Puskesmas Gunung		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 30,000,000	Puskesmas Gunung		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 30,000,000	
1.02.0 2.2.02 .35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Rp 30,000,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Rp 30,000,200	
1.02.0 2.2.02 .38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem	1 Unit	Rp 1,038,647,697	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem	1 Unit	Rp 1,038,647,697	

			Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	65	Rp 130,000,000		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	65	Rp 130,000,450	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan	90	%	Rp 10,000,000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan	90	%	Rp 10,000,300
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Kesehatan	37 (Puskesmas, 6 Klinik, 2 RS, 25 Praktik mandiri)	Dokumen	Rp 10,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Kesehatan	37 (Puskesmas, 6 Klinik, 2 RS, 25 Praktik mandiri)	Dokumen	Rp 10,000,300

1.02.0 3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	40	%	Rp 120,000,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	40	%	Rp 120,000,150
1.02.0 3.2.03 .01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50	orang	Rp 120,000,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50	orang	Rp 120,000,150
1.02.0 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	76.7		Rp 38,000,000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	76.7		Rp 38,000,250

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikai Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikai Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	53	%	Rp 15,000,000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikai Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikai Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	85	%	Rp 15,000,050
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikai, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil penfngendalia n dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikai, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30	doku men	Rp 15,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikai, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil penfngendalia n dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikai, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30	dokum en	Rp 15,000,050

ff

			Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan dan pengawasan	30	sarana			Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan dan pengawasan	30	sarana		
1.02.0 4.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	75	%	Rp 8.000.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	75	%	Rp 8.000.200		

ff

1.02.0 4.2.03 .01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	30	P-IRT	Rp 8,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	30	P-IRT	Rp 8,000,200	
1.02.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	96.25	%	Rp 270,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	96.25	%	Rp 270,001,200	

1.02.0 5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	2	Keg	Rp 235,000,000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	2	Keg	Rp 235,000,700	
	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat						Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat						
1.02.0 5.2.01 .01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat		Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Dokumen	Rp 85,000,000	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat		Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Dokumen	Rp 85,000,700	
			Jumlah lembaga yang penerima	2	lembaga	Rp 150,000,000			Jumlah lembaga yang penerima hibah	2	lembaga	Rp 150,000,000	

			hibah								
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	16 kelurahan	Rp 35,000,000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	16 kelurahan	Rp 35,000,500	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1 Dokumen	Rp 35,000,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1 Dokumen	Rp 35,000,500	

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Periode 2024-2026, dimana bab selanjutnya memaparkan pagu indikatif serta indikator.

ff

			hibah								
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	16 kelurahan	Rp 35,000,000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	16 kelurahan	Rp 35,000,500		
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1 Dokumen	Rp 35,000,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1 Dokumen	Rp 35,000,500		

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Periode 2024-2026, dimana bab selanjutnya memaparkan pagu indikatif serta indikator.

ff

2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Sistem perencanaan sudah dimulai dari tingkat paling bawah dan menjangring seluruh aspirasi masyarakat. Seluruh usulan masyarakat di Kota Padang Panjang di evaluasi melalui pemantauan dan evaluasi ke lapangan, namun tidak seluruh aspirasi masyarakat tersebut dapat diakomodir disebabkan karena keterbatasan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan.

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024.

Sasaran strategis Kementerian kesehatan adalah :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya akses, kemandirian
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat 12 indikator yang harus dicapai Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sebesar 100%.
2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sebesar 100%.
3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 100%.
4. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 100%
5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
6. Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
7. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
8. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
9. Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
10. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 100%..

11. Persentase orang dengan Tuberculosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar sebesar 100%
12. Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar 100% :

Tingkat keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah sangat tergantung pada perangkat daerah. Untuk itu, Perangkat Daerah harus konsisten dengan target capaian kinerja dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai untuk penyusunan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2024 dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2024 diselaraskan dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.

Berikut ini Prioritas Pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2024 adalah :

1. Meningkatkan produktifitas ekonomi sector unggulan daerah.
2. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas infra struktur
6. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berakhlak.
7. Meningkatkan tatanan kehidupan social masyarakat yang tentram dan agamis.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran Dinas Kesehatan dengan prioritas pembangunan Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Dinas Kesehatan	Indikator
Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup Prevalensi stunting

11. Persentase orang dengan Tuberculosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar sebesar 100%
12. Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar 100% :

Tingkat keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah sangat tergantung pada perangkat daerah. Untuk itu, Perangkat Daerah harus konsisten dengan target capaian kinerja dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai untuk penyusunan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2024 dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2024 diselaraskan dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.

Berikut ini Prioritas Pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2024 adalah :

1. Meningkatkan produktifitas ekonomi sector unggulan daerah.
2. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas infra struktur
6. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berakhlak.
7. Meningkatkan tatanan kehidupan social masyarakat yang tentram dan agamis.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran Dinas Kesehatan dengan prioritas pembangunan Kota Padang Panjang sebagai berikut:..

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Dinas Kesehatan	Indikator
Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup Prevalensi stunting

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2004-2026, mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 diantaranya yaitu :

“ Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat “

dengan sasaran

“Meningkatkan Status Kesehatan Keluarga “

4 (Empat) Indikator sebagai berikut :

1. Persentase penurunan Kematian Ibu target 25 %
2. Persentase penurunan Kematian Bayi target 20 %
3. Indeks Keluarga Sehat dengan target 0,47
4. Persentase UHC target 99.00%

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) .Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang . Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Mengingat Dokumen Perencanaan Kota Padang Panjang tahun 2004-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2004-2026.

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi nya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan, maka untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2004- 2006 yaitu **Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing** perlu menetapkan tujuan, sasaran.Tujuan dari Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator :Angka Harapan Hidup sebesar 73,04 tahun dan Prevalensi Stunting diangka 11,05

Dengan sasaran Meningkatkan Status Kesehatan keluarga dengan indikator :.

1. Persentase penurunan Kematian Ibu target 25 %

- 2. Persentase penurunan Kematian Bayi target 20 %
- 3. Indeks Keluarga Sehat dengan target 0,45
- 4. Persentase UHC target 99,99%

Untuk Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKK Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dapat dilihatn pada Tabel 3.2.1 dan Tabel 3.2.2 berikut ini

Tabel 3.2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
DINAS KESEHATAN

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup		73.02	73.03	73.04	73.06
			Prevalensi Stunting		14.76	11.05	10.03	9.01
		Meningkatkan Status Kesehatan Keluarga	1 Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.44	0.47	0.49	0.51
			2 Persentase Penurunan Kematian Ibu	Persentase	33%	25%	25%	25%
			3 Persentase Penurunan Kematian Bayi	Persentase	18.2%	20%	20%	20%
			4 Presentase UHC	Persentase	98.90%	99.20%	99.20%	99.30%

Tabel 3.2.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS KESEHATAN
TAHUN 2024 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2021	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025
					2024	2025	2026	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
II	Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0.308	3.029	3.03	3.031	3.032	3.032
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91.98	81.311	83.311	85.311	87.311	87.311
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	85.268	82.916	83.916	84.916	85.916	85.916
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	91.887	82.651	84.651	86.651	88.651	88.651
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	64.148	77.154	77.654	78.154	78.654	78.654
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	%	94.127	81.598	82.598	83.598	84.598	84.598

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2021	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025
					2024	2025	2026	
	pelayanan kesehatan sesuai standar							
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	30.329	61.323	64.323	67.323	70.323	70.323
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	53.076	94.356	94.556	94.756	94.956	94.956
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	98.291	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	%	87.736	87.671	87.871	88.071	88.271	88.271

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIOD E RPD TAHUN 2021	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIOD E RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIOD E RPD TAHUN 2025
					2024	2025	2026	
	standar							
15	Prevalensi Stunting	%		14.76	11.05	10.03	9.01	9.01
16	Umur Harapan Hidup	Tahun		73.02	73.03	73.04	73.06	73.06
17	Indeks Keluarga Sehat	Indeks		0.44	0.47	0.49	0.51	0.51
18	Persentase Penurunan Kematian Ibu	%		33	25	25	25	25
19	Persentase Penurunan Kematian Bayi	%		18.2	20	20	20	20
20	Presentase UHC	%		98.9	99.28	99.2	99.3	99.3
21	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan (indikator baru)	%		NA	0,88	0,91	0,94	0,94
22	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (indikator baru)	%		NA	65	68,75	72,5	72,5
23	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum (indikator baru)	%		NA	76,66	83,33	90	90
24	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator	%		NA	0,9625	98,125	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2021	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025
					2024	2025	2026	
	baru)							
25	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%		NA	96,25	98,125	100	100
26	Rasio puskesmas, poliklinik, pusat persatuan penduduk	%		0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
27	Rasio dokter persatuan penduduk	%		0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
28	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%		1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
29	Indek Keluarga Sehat	indek		0,44	0,47	0,49	0,51	0,51

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

- 1) Pencapaian Standar pelayanan Minimal Bidang kesehatan; dan
- 2) Pencapaian Tujuan dan sasaran Pembangunan Tahun 2024

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 ada 5 (lima) Program 13 (tiga belas) Kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan dan untuk pelaksanaan kegiatan tersebar di 4 Puskesmas, IFK dan RSUD Kota Padang Panjang. Adapun anggaran

berdasarkan Pagu Indikatif sebesar Rp. 144.322.759.717,- yang meliputi Program dan kegiatan untuk Tahun 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

yang terdiri dari 7 Kegiatan yaitu :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Peningkatan Pelayanan BLUD

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

yang terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

yang terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

- a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota.
- b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan, Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

yang terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

yang terdiri dari 1 Kegiatan yaitu

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinsa Kesehatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Padang Panjang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					DINAS KESEHATAN				144,322,759,717					141,405,582,419
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				144,322,759,717					141,405,582,419
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan		100 persen	128,913,435,785			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan	100 persen	125,516,944,402

1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	60,051,653,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	56,818,248,402
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	493 Orag	60,051,653,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500Orag	56,818,248,402
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	247,500,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	150,000,000
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	493 Orang/Bulan	247,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	500 Orang /Bulan	150,000,000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		90 Persen	467,617,700			Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	95 Persen	417,661,550

1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	29,031,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	29,074,300
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	99,757,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	99,758,200
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Paket	38,828,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	38,829,050
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	250,000,000
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		80 Persen	119,434,000			Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	80 Persen	200,000,000

					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	150,000,000
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	119,434,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50,000,000
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 Persen	1,428,896,188			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	1,124,989,553
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	6,290,000
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua	180 Laporan	240,509,788	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	180 Laporan	220,510,113

						yang Disediakan	Kel/Desa					Diseciakan		
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Laporan	1,182,386,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	898,189,440
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		90 Persen	685,000,000			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 Persen	599,188,474
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35,000,000
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Unit	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	75 Unit	464,188,474

												Perizinannya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	40,000,000
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	3 Unit	60,000,000
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		1 BLUD	65,913,334,897			Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	66,206,856,423
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	65,913,334,897	Pendapatan cari BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	66,206,856,423
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas		88 Persen	14,971,321,782			Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas	91 Persen	15,358,638,017

					MASYARAKAT	Kesehatan						Kesehatan		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)		75 Persen	980,000,000			Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	80 Persen	734,249,350
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Pembelian Tanah untuk pembangunan Poskeskel Gumala	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	-	-
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		4 Unit	80,000,000			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit	80,000,000
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	2 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	- RSU	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	2 Unit	100,000,000

					Kesehatan	Kesehatan yang Disediakan	Semua Kel/Desa			Umum		Pelayanan Kesenatan yang Disediakan		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Obat, Bahan Habis Paka , Bahan Medis Habis Paka , Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesenatan yang disediakan	1 Paket	490,000,000
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	- Kota Padang Panjang. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-	-
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	82 Persen	13,991,321,782			Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	14,688,638,017
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua	1129 orang	20,000,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	1129 orang	35,876,550

						Sesuai Standar	Kel/Desa			Umum		Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1077 orang	19,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1077 orang	28,372,800
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1026 orang	35,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1026 orang	43,493,700
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3957 orang	25,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3957 orang	31,042,200
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12241 orang	35,000,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12241 orang	31,042,200

1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41185 orang	29,979,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41185 orang	30,670,650
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11567 orang	427,312,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4928 orang	372,100,000
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12234 orang	34,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12234 orang	40,000,000
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950 orang	19,999,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	950 orang	40,000,000

1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117 orang	14,999,700 ✓	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	117 orang	18,000,000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2331 orang	34,999,950 ✓	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2331 orang	35,000,000
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1533 Orang	29,999,700 ✓	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1533 Orang	35,000,000
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	19,999,700 ✓	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	12 orang	20,000,000

						Standar						Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Dokumen	299,990,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Orang	280,000,000
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	19,999,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	20,000,000
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	40,265,000
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Dokumen	319,122,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	354,400,000

1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Dokumen	10,667,394,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	60 Dokumen	11,478,311,617
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24,999,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1Dokumen	25,000,000
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	99,998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumer	100,000,000
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Dokumen	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	240,000,000
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Dokumen	548,833,615	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	440,064,300

1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	30,000,200 ✓	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 Unit	49,999,000
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1,038,647,697 ✓	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- BM Alat Kejut Jantung	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	900,000,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		65 Indeks	130,000,450 ✓			Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	68,75 Indeks	32,000,000
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan		90 Persen	10,000,300 ✓			Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan	92,5 Persen	12,000,000

1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Dokumen	10,000,300 L	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	37 Dokumen	12,000,000
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		40 Persen	120,000,150 ✓		Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	45 Persen	20,000,000
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 orang	120,000,150 ✓	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 orang	20,000,000

1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum		76.7 Indeks	38,000,500			Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	83,3 indeks	38,000,000
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		85 persen	15,000,050			Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90 persen	15,000,000
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	15,000,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	15,000,000

1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga		85 persen	8,000,200			Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	85 persen	8,000,000
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	8,000,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	30 Dokumen	8,000,000
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan		70 persen	15,000,250			Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana	80 persen	15,000,000

					Rumah Tangga	minuman Industri Rumah Tangga						Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga		
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Sarana	15,000,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Sarana	15,000,000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif		96.25 Persen	270,001,200			persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	98.13 Persen	460,000,000
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota		5 Kegiatan	235,000,700			Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	5 Kegiatan	375,000,000

1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	235,000,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Hibah untuk PMI	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	375,000,000
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas		16 Kelurahan	35,000,500			Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	16 Kelurahan	85,000,000
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	35,000,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	85,000,000

JR

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan untuk tahun 2024 sebesar Rp.144.322.759.717 Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026, yang secara rinci rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 table 4.1, sebagai berikut:

Kode					Urusan / Bidang, Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					DINAS KESEHATAN				144,322,759,717	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				144,322,759,717	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan		100 persen	128,913,435,785	
1	02	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	60,051,653,000	

1	02	01	20021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	493 Orag	60,051,653,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	2005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	247,500,000	
1	02	01	20052	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	493 Orang/Bulan	247,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	2006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah		90 Persen	467,617,700	
1	02	01	20061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	29,031,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	20064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	99,757,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	20000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Paket	38,828,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

			6	5		Disediakan				
1	02	01	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		80 Persen	119,434,000	
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit		
1	02	01	207	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	119,434,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 Persen	1,428,896,188	
1	02	01	208	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	02	01	20	0082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 Laporan	240,509,788	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	20	0084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Laporan	1,182,386,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	20	009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		90 Persen	685,000,000	
1	02	01	20	0091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	20	0092	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Unit	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	20	0096	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	02	01	20	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	01	21	00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		1 BLUD	65,913,334,897	
1	02	01	21	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	65,913,334,897	Pendapatan dari BLUD
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan		88 Persen	14,971,321,782	
1	02	02	20	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)		75 Persen	980,000,000	
1	02	02	20	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	20	01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan		4 Unit	80,000,000	

							Lainnya					
1	02	02	20014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1	02	02	200213		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1	02	02	200216		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1	02	02	2002		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 Persen	82 Persen	13,991,321,782			
1	02	02	20021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1129 orang	20,000,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

24

1	02	0 2	2 0 0 2	0 0 0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1077 orang	19,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	0 2	2 0 0 2	0 0 0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1026 orang	35,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	0 2	2 0 0 2	0 0 0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3957 orang	25,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	0 2	2 0 0 2	0 0 0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12241 orang	35,000,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	0 2	2 0 0 2	0 0 0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41185 orang	29,979,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	0 2	2 0 0 2	0 0 0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11567 orang	427,312,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

f 4

1	02	0 2	2 0 0 2	0 0 0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12234 orang	34,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	0 2	2 0 2	0 0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950 orang	19,999,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	0 2	2 0 2	0 0 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117 orang	14,999,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	0 2	2 0 2	0 0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2331 orang	34,999,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	0 2	2 0 2	0 0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1533 Orang	29,999,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	0 2	2 0 2	0 0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	19,999,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

24

							(KLB) Sesuai Standar				
1	02	02	20	00	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Dokumen	299,990,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	20	00	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	19,999,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	20	00	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	20	00	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Dokumen	319,122,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	20	00	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Dokumen	10,667,394,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	20	00	029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24,999,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

ff

1	02	02	2022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	99,998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	2023	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Dokumen	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	2024	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Dokumen	548,833,615	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	2025	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	30,000,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	02	2028	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1,038,647,697	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		65 Indeks	130,000,450	

ff

1	02	03	201		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan		90 Persen	10,000,300	
1	02	03	201	002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Dokumen	10,000,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	03	203		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		40 Persen	120,000,150	
1	02	03	203	001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 orang	120,000,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum		76.7 Indeks	38,000,500	

14

1	02	04	201		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		85 persen	15,000,050	
1	02	04	201	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro:Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	15,000,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	04	203		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga		85 persen	8,000,200	
1	02	04	203	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	8,000,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

						Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
1	02	04	206		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga		70 persen	15,000,250	
1	02	04	206	001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Sarana	15,000,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif		96.25 Persen	270,001,200	
1	02	05	201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat		5 Kegiatan	235,000,700	

						Kota				
1	02	05	20	00	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	235,000,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	02	05	20	02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas		16 Kelurahan	35,000,500	
1	02	05	20	00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	35,000,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, dan pendanaan. Untuk tahun 2023 Renja Dinas Kesehatan terdiri dari 5 program 10 kegiatan, dan 42 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 153.884.986.912,-(Seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Sedangkan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dengan 5 Program 13 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 144.075.259.717,-(Seratus empat puluh empat miliar tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah)

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Supaya program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka sinergintas.

Semua masukan dan pemecahan masalah diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dan kekurangan yang ada sekarang serta perencanaan yang akan datang. Dengan demikian diharapkan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, merupakan kebutuhan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan.

Padang Panjang, Agustus 2023

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Padang Panjang



dr. Faizah

NIP. 19671014 200212 2 001





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RENCANA KERJA (RENJA) 2024

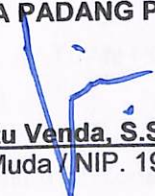
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta Ridho-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 telah dapat tersusun. Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini merupakan gambaran yang akan dijadikan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menjalankan program kerja selama 1 (satu) tahun, sehingga apa yang direncanakan dapat terwujud.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan dokumen Renja ini serta besar harapan kami semoga Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Padang Panjang, Agustus 2023
Plt.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG


I Putu Venda, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / NIP. 19770522 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15
2.4	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang)	22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	23
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	24
3.3	Program dan Kegiatan	25

BAB IV RENJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BAB V	PENUTUP	38
-------	---------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Tahun 2024 memuat hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan Renja serta pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif. Prakiraan pagu indikatif tersebut secara garis besar dipengaruhi oleh perubahan struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Substansi dalam Renja ini adalah mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPD Kota Padang Panjang, RKPD Pemerintah Kota Padang Panjang dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Langkah menyusun Renja ini juga sejalan dengan salah satu langkah awal dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Walikota dalam menegakkan Perda dan Perkada yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.



Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2024. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 memuat Program/ kegiatan tahun 2024, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2025.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama - sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah

Renja Satpol PP Dan Damkar 2024

24

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6):
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12):

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan dukungan pembiayaan dari APBD dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Renja Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antar fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif yang berkelanjutan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

f 9

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BAB V PENUTUP

ff

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Paamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Tercapai tidaknya pelaksanaan seluruh kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapai/ terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Kegiatan.

ff

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja ini dapat tercapai dengan beberapa langkah yang dilaksanakan:

1. Pelaksanaan operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim gabungan Unit Kecil Lengkap (UKL) yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya
2. Terlaksananya operasi Pengamanan pemilukada
3. Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan pelajar
4. Perekrutan tenaga harian lepas (THL) untuk Banpol PP dan Petugas Pemadam Kebakaran yang membantu dalam pelaksanaan operasional lapangan
5. Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan hari besar keagamaan, Operasi Tim Trantibum Kota
6. Kesiapsiagaan dari anggota operasional pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas

Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Tahun 2023 meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/ Kegiatan dan realisasi pelaksanaan. Untuk mengetahui pelaksanaan Renja tahun 2023 maka dilakukan pengukuran dan evaluasi Renja dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yang tergambar dalam Tabel 2.1



TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 0/0 TAHUN 2023

OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBakaran KOTA PADANG PANJANG

No	Usasan/ Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN 0/0 TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERIKRAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH 0/0 TAHUN GERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN 0/0 TAHUN GERJALAN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=9*7+0	11=10/4
	PROGRAM PENUNJANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	00%	00%	00%	00%		00%	00%	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%		2 laporan	67%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan rencana realisasi kinerja SKPD	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%		2 laporan	67%
	Administrasi Keuangan	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	00%	00%	00%	00%	100,00%	00%	00%	00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	127 orang	41 orang	41 orang	41 orang	100,00%	41 orang	62 orang	57%
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%		2 laporan	33%
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%		2 laporan	70%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%		2 laporan	70%
	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	00%	00%		00%		00%	00%	00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang diadatkan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang diadatkan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	2 paket	51%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang diadatkan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	2 paket	91%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang diadatkan	9 paket	1 paket	3 paket	1 paket	100,00%	3 paket	2 paket	48%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 laporan	21 laporan	15 laporan	21 laporan	140,00%	15 laporan	41 laporan	81%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	00%	00%	00%	00%	100,00%	00%	00%	01%
	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perakitan dan mesin lainnya yang diadatkan	5 unit	0 unit	6 unit	0%	100,00%		6 unit	91%
	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah	00%	00%	00%	00%	100,00%		0,9	61%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diadatkan	33 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	66,67%	11 laporan	22 laporan	63%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diadatkan	106 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	72 laporan	60%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diadatkan	33 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	100,00%	11 laporan	22 laporan	64%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	00%	00%	00%	00%	100,00%	2 unit	0,9	54%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	76 unit	26 unit	26 unit	26 unit	100,00%	26 unit	52 unit	48%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100,00%	2 unit	2 unit	112%

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=9+7+6	11=10/4
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terhindang dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	62%
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	7 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	100,00%	1 operasi	2 operasi	62%
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deklarasi dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diungkap melalui deklarasi diri dan cegah diri pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	240 kasus	44	80 kasus	141 kasus	119,58%	1 operasi	287 kasus	63%
	Pemberdayaan Perifindingan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan Perifindingan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban umum	3 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	24 laporan	1 dokumen	22%
	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah operasi penegakan Perda	4 operasi	1 operasi	0%	100%	100,00%	10 menit	1 operasi	94%
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Disajikan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wal Kota	24 laporan	24 laporan	0%	0%	100,00%	2 kegiatan	24 laporan	70%
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wal Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wal Kota	72 laporan	0	24 laporan	24 laporan	100,00%	10 laporan	24 laporan	11%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit		10 menit	62%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	4 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	100%	1 kali	2 kegiatan	62%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan konsep/pelaksanaan petugas pemadam kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	30 laporan	15 laporan	10 laporan	21 laporan	210,00%		36 laporan	81%
	Pengedatan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang ada dan legal sesuai standar teknis terkait	2 unit	0	2 unit	2 unit	100%	0	2 unit	99%
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	60%
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 orang	0%	50 orang	49 orang	98,00%	0%	49 orang	98%
	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	0%	100%	100%	100%			
	Pengedatan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Jumlah sarana prasarana untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	7 unit	0%	7 unit	7 unit	100,00%			
	Jumlah									

Keberhasilan suatu program perlu didukung dengan anggaran yang memadai, oleh sebab itu direncanakan pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang:

Kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja OPD ini diharapkan *outcome* perencanaan pembangunan akan semakin meningkat dalam rangka menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*. Realisasi program/kegiatan Renja Tahun 2022 yang tidak mencapai target, memenuhi target dan melebihi target adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 1. Dari keseluruhan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2022 terlaksana sebagaimana mestinya walaupun di antara kegiatan tersebut ada yang dilakukan perampangan anggaran karena Pandemi Covid 19 yang diiringi dengan penurunan target sub kegiatan pada renja perubahan yaitu:
 - a. Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dari target awal 72 kali dikurangi menjadi 66 kali dan semuanya terealisasi 100% dari segi capaian indikator sub kegiatan yaitu Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan yang pada akhir periode renstra ditargetkan 240 kasus terealisasi 287 kasus dan keseluruhannya terselesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dari target awal 24 kali dan semuanya terealisasi 100%
2. Realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan. Dari 3 program, 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan, yang ada semuanya memenuhi target pelaksanaan kegiatan.
3. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan. Dari 19 sub kegiatan ada 1 kegiatan yang melebihi target pelaksanaan kegiatan yaitu: Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan luar daerah yang direncanakan 15 laporan terealisasi 41 kali kegiatan dan jumlah makan minum yang terealisasi melebihi dari target.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
 - a. Pandemi covid 19 yang melanda negara Indonesia yang berdampak pada perampangan anggaran
 - b. Adanya aturan dan atau protokol kesehatan yang harus diikuti yang melarang pelaksanaan kegiatan yang menyangkut pengumpulan orang dalam jumlah banyak
 - c. Penundaan dan peniadaan kegiatan yang bersifat ceremonial terkait dengan adanya Pandemi covid 19.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah terhadap kegiatan yang tidak terlaksana yaitu kegiatan tersebut tidak dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak dapat bertindak secara sendiri karena berkaitan dengan organisasi lainnya baik swasta/lembaga lainnya. Untuk itu dalam penyelenggaraan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan pembinaan masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta penanggulangan kebakaran diantaranya melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan secara terus menerus, dalam upaya pemeliharaan trantibum dan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan tindakan di lapangan berserta aparat kepolisian, kejaksaan, TNI dan instansi terkait lainnya baik berupa operasi yustisi, patroli, pengawasan, monitoring serta operasi penertiban.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak dan lembaga terkait. Dalam penyelenggaraan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dilakukan kegiatan berupa penyuluhan, pembinaan sosialisasi, penertiban, pengawalan, monitoring, pengamanan serta operasi yustisi yang melibatkan TNI POLRI dan unsur terkait lainnya. Begitu juga dengan penanggulangan kebakaran dilakukan penyuluhan kepada masyarakat dan tindakan pelayanan pemadaman penanganan kebakaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
PERIODE PELAKSANAAN : 2021 - 2023

NO	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2	Jumlah laporan perencanaan			1 laporan	1 laporan			1 laporan	1 laporan			
3	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			1 laporan	1 laporan			1 laporan	1 laporan			
4	Persentase layanan keuangan perangkat daerah			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
5	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			43 orang	43 orang	574 Orang/ bulan	574 Orang/ bulan	41 orang	41 orang	574 Orang/ bulan	574 Orang/ bulan	
6	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			1 laporan	1 laporan			1 laporan	1 laporan			
7	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan			1 laporan	1 laporan			1 laporan	1 laporan			
8	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran			1 laporan	1 laporan			1 laporan	1 laporan			
9	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
10	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	12 paket	12 paket	1 paket	1 paket	12 paket	12 paket	
11	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	12 paket	12 paket	1 paket	1 paket	12 paket	12 paket	
12	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			3 paket	3 paket	12 paket	12 paket	3 paket	3 paket	12 paket	12 paket	
13	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			15 laporan	15 laporan	12 paket	12 paket	21 laporan	15 laporan	12 paket	12 paket	
14	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
15	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan			11 laporan	11 laporan	12 laporan	12 laporan	11 laporan	11 laporan	12 laporan	12 laporan	
16	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	
17	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			11 laporan	11 laporan	12 laporan	12 laporan	11 laporan	11 laporan	12 laporan	12 laporan	

NO	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
19	Jumlah kendaraan dinas Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	
20	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	
21	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum			1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	
23	Jumlah kasus gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli			80 kasus	80 kasus	80 kasus	80 kasus	146 kasus	80 kasus	80 kasus	80 kasus	
24	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban umum			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
25	Jumlah operasi penegakan Perda			1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	1 operasi	
26	Jumlah laporan pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			24 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	24 laporan	24 laporan	8 laporan	8 laporan	
27	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah			10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	
28	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran			2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	
29	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait			2 unit	-	-	-	2 unit	-	-	-	
30	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam an kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota			10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	
31	Jumlah kegiatan pemberdayaan			1 kali	100%	1 kali	100%	1 kali	100%	1 kali	100%	
32	Jumlah desa/ kelurahan yang terbantu dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya			0	16 kelurahan	16 kelurahan	16 kelurahan	0	16 kelurahan	16 kelurahan	16 kelurahan	
33	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			50 orang				49 orang				

NO	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
35	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia			0	5 laporan	12 laporan	12 laporan	0	5 laporan	12 laporan	12 laporan	
36	Jumlah sarana prasarana untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi		7 unit									

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

- Upaya – upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan sehingga terwujud peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- Dalam pencapaian suasana tentram dan tertib di masyarakat ada beberapa kendala antara lain :
 - a. Peran serta dan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan termasuk lembaga adat guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Masih adanya pelanggaran di fasilitas umum dan fasilitas sosial terutama pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bermobil, gepeng, anak jalanan, kelompok funk, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pesatnya perkembangan pembangunan dan peningkatan penduduk di Kota Padang Panjang sudah barang tentu positif dan negatif termasuk berakibat kepada penyediaan perumahan, jaminan kelayakan berusaha yang menimbulkan dampak masalah sosial yang memungkinkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, apalagi seringnya berpindah – pindah tempat .

ff

- d. Fungsi pembinaan dan pemberdayagunaan masyarakat terutama lembaga adat belum mendukung ketentraman dan ketertiban secara optimal.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur.
2. Masih perlunya penambahan anggaran
3. Sarana dan prasarana sebagai pendukung aktifitas untuk penertiban dan pengawasan penegakkan Peraturan Daerah masih belum memadai.
4. Kurangnya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran & Rescue, tidak sejalan dengan peningkatan kepadatan dan rapatnya rumah penduduk serta kepadatan arus lalu lintas sehingga dapat memperlambat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki 5 unit mobil pemadam kebakaran yang merupakan pembelian tahun 1970, 1980, 1998, 2006 dan perlu pembaruan. Untuk kondisi sarana prasarana yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran saat ini dapat tergambar pada tabel berikut:

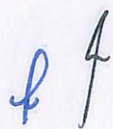
Tabel 2.3

**Kondisi Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran**

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	5 unit	Satu diantaranya merupakan pembelian tahun 2002 dan tidak layak pakai
2	Kendaraan Roda 6	6 unit	5 unit kendaraan damkar (pembelian tahun 1970, 1980, 1998, 2006 yang perlu untuk dilakukan pembaruan) dan 1 unit truk dalmas pol pp, (pembelian tahun 2016).
3	Kendaraan Roda 2 (motor)	5 unit	Berada dalam kondisi baik dan masih layak pakai
4	Sepeda	10 unit	Berda dalam kondisi baik dan masih layak pakai
5	Baju tahan panas	15 stel	Masih kurang dari kebutuhan sebanyak 40 stel

Sumber data: Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2023

Permasalahan yang ada perlu ditindak lanjuti dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah yang sebelumnya responsive menjadi preventif, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong



Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelayanan bahaya kebakaran. Adapun tantangan dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia.
2. Belum adanya peta rawan bencana
3. Jumlah penduduk yang heterogen berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

1. Koordinasi yang baik antar instansi dimana dengan terjalinnya koordinasi yang baik antar dinas/badan/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Pemanfaatan teknologi informasi.
3. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
4. Kerjasama dengan pihak luar.
5. Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Padang Panjang.
6. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung tupoksi.
7. Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemadam Kebakaran. Dalam pelaksanaannya terdapat isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian, isu-isu strategis yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat:

1. Penyempurnaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus menjadi perhatian khusus, karena Perda dan Perkada adalah landasan yang menjadi titik tolak Polisi Pamong Praja menentukan arah bertindak.;

Renja Satpol PP Dan Damkar 2024



2. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja terutama PPNS dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pemadam kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
3. Letak geografis Kota Padang Panjang yang berada diperlintasan didukung dengan potensi wisata yang ada di Kota Padang Panjang meningkatkan geliat perekonomian masyarakat disertai bertambahnya jumlah pengunjung ke Kota Padang Panjang berbanding lurus dengan potensi pelanggaran Perda dan trantibum..
4. Perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan..
5. Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), merupakan salah satu indikator pada standar pelayanan minimal. Kepadatan dan kerapatan rumah penduduk dapat memperlambat waktu tanggap layanan WMK, walaupun jarak tempuh tergolong dekat;
6. Dukungan peralatan pemadam kebakaran yang memadai dan memenuhi syarat akan sangat berpengaruh kepada tingkat keberhasilan upaya pemadaman dan sekaligus mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja bagi petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Program Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai Rancangan Awal RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024, hal tersebut agar dalam perencanaan tetap konsistensi dengan dokumen perencanaan yang ada pada RPD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024. Secara spesifik review Rancangan Awal Renja Tahun 2024 dan hasil kebutuhan yang meliputi program/ kegiatan, indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 2.4.



Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat	Program/ Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				Rp 10.730.781.170	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				Rp 10.730.781.170	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Padang Panjang	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan transibum	100,00%	4.195.073.200	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Padang Panjang	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan transibum	100,00%	4.195.073.200	
	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah operasi penanganan dan penanganan gangguan transibum	3 operasi	3.994.143.200	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah operasi penanganan dan penanganan gangguan transibum	3 operasi	3.994.143.200	
	Penegakan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Padang Panjang	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dideteksi Melalui Deteksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	60 kasus	3.691.703.200	Penegakan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Padang Panjang	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dideteksi Melalui Deteksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	60 kasus	3.691.703.200	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Padang Panjang	Jumlah Dokumen yang Memonstrasi Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	2 dokumen	324.440.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Padang Panjang	Jumlah Dokumen yang Memonstrasi Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	2 dokumen	324.440.000	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	8 laporan	8.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	8 laporan	8.000.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Padang Panjang	Jumlah operasi penegakan Perda	2 operasi	200.930.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Padang Panjang	Jumlah operasi penegakan Perda	2 operasi	200.930.000	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	24 laporan	200.930.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	24 laporan	200.930.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Padang Panjang	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 menit	1.308.603.750	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Padang Panjang	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 menit	1.308.603.750	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	4 kegiatan	1.235.618.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	4 kegiatan	1.235.618.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 laporan	1.035.618.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 laporan	1.035.618.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Baik dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Baik dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 unit	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 kegiatan	48.957.750	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 kegiatan	48.957.750	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Padang Panjang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	15 kelurahan	48.957.750	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Padang Panjang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	15 kelurahan	48.957.750	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Padang Panjang	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	25.975.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Padang Panjang	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	25.975.000	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	12 laporan	25.975.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	12 laporan	25.975.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	NON URUSAN	Padang Panjang			Rp 5.227.147.220	NON URUSAN	Padang Panjang			Rp 5.227.147.220	
	PROGRAM PEKUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Padang Panjang	Persentase penunjang urusan yang terlaksana	90%	5.227.147.220	PROGRAM PEKUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Padang Panjang	Persentase penunjang urusan yang terlaksana	90%	5.227.147.220	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	90%	4.293.724.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	90%	4.293.724.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	4.293.724.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	4.293.724.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Padang Panjang			29.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Padang Panjang			29.250.000	
	Pengadaan Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	29.250.000	Pengadaan Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		29.250.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90%	4.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90%	4.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	2.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	2.000.000	
	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	2.000.000	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	2.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%	118.443.300	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%	118.443.300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.483.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.483.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	10.364.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	10.364.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	8.694.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	8.694.600	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Panjang	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah	90%	132.800.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Panjang	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah	90%	132.800.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.600.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	35.684.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	35.684.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	93.518.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	93.518.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Panjang	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90%	648.628.220	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Panjang	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90%	648.628.220	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Porton Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Portonnya	26 Unit	597.263.570	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Porton Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Portonnya	26 Unit	597.263.570	
	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	18.605.600	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	18.605.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	45.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan baik dari atas kebawah (Top-down) atau dari bawah ke atas (Bottom-up). Menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah, ada satu tahapan yaitu pelaksanaan Musrenbang. Baik Musrenbang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Musrenbang Desa/Kelurahan.

Dari hasil Musrenbang Tahun 2023 tidak terdapat usulan dari kelurahan yang harus menjadi perhatian pada tahun 2024 yang akan datang.



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak dari komunitasnya/rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tujuan

Sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada Renja 2024 ini adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat”

Indikator:

“Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum”

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda

Indikator: Persentase Penegakan Perda

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran

Indikator: Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK

Dapat dilihat pada table 3.2 berikut:



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%
		1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%
		Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan dari beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

- a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:



- Pencapaian visi misi kepala daerah apabila dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi Perangkat Daerah pendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Padang Panjang yakni "terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis." Sasaran yang ditentukan yakni *Meningkatnya ketentraman dan ketertiban* umum dengan strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Arah kebijakan yang ditentukan Gerakan Sadar dan Taat Aturan dengan indikator kinerja sasaran Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi :
 1. Jumlah Program dan kegiatan :
Adapun jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebanyak 3 program dan sebanyak 10 kegiatan serta 19 sub kegiatan.
 2. Penyebaran lokasi program dan kegiatan :
Semua program dan kegiatan tersebut berada dilingkungan wilayah Kota Padang Panjang
 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya (APBD/APBN)
- b. Penjelasan jika rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD : sesuai.
- c. Rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

I PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- b Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

PT

- 2 **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**
 - a Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- II **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**
 - 1 **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - a Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - 2 **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**
 - a Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
 - 3 **Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia**
 - a Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa membahayakan dan atau mengancam keselamatan manusia
- III **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - 1 **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2 **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3 **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
 - 4 **Pengadaan Barang Milik Daerah**
 - a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 terdapat pada table 3.3 berikut:

pt

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu (Indikatif (Rp.))	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu (Indikatif (Rp.))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				10,730,781,170					9,386,071,600
1	URUSAN PEMERINTAHAN WALIS YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				10,730,781,170					9,386,071,600
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		100 Persen	5,227,147,220			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 Persen	6,185,602,100
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		90 Persen	4,293,724,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	90 Persen	4,338,496,330
1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	574 Orang/bulan	4,293,724,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/ bulan	4,388,496,330
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawalan perangkat daerah		100 Persen	29,250,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawalan perangkat daerah	0 Persen	-
1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39 Paket	29,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	-
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		90 Persen	122,443,200			Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 Persen	223,356,660
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	1,483,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	3,366,680
1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	14,364,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	40,000,000
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	6,594,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	15,000,000
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 laporan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	165,000,000
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		90 Persen	132,600,800			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 Persen	104,498,120
1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2025		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	36,684,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	26,888,120
1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	93,516,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	72,960,000
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		90 Persen	645,929,220			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 Persen	489,462,000
1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Unit	587,263,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	349,240,000
1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	16,665,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	60,000,000
1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	46,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	70,212,000
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum		100 Persen	4,185,073,200			Persentase warga negara yang terindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 Persen	2,861,489,000
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum		3 operasi	3,994,143,200			Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 operasi	2,883,840,000
1 05 02 2.01 0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	324,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	50,000,000
1 05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 laporan	3,881,703,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	55 laporan	2,803,840,000
1 05 02 2.01 0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Telayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Telayani	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 laporan	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Telayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Telayani	8 laporan	30,000,000
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda		2 operasi	200,930,000			Jumlah operasi penegakan Perda	1 operasi	107,849,000
1 05 02 2.02 0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	200,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Honor Tim SK4	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	8 laporan	107,849,000

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2025		
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah		10 Menit	1,303,560,780			Waktu tanggap (Respon Time Rate.) Daerah	10 Menit	1,303,780,400
1	05	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran		4 kegiatan	1,235,618,000			Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	3 kegiatan	1,138,780,400
1	05	04	2.01	0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	1,235,618,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 laporan	1,138,780,400
1	05	04	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan		2 kegiatan	48,967,750			Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 kegiatan	48,000,000
1	05	04	2.04	0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 kelurahan	48,967,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	16 kelurahan	45,000,000
1	05	04	2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia		100 Persen	25,975,000			Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 Persen	25,000,000
1	05	04	2.05	0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	25,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	25,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Program dan Kegiatan

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2024 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana terdapat pada tabel

4.1 berikut :



TABEL 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Target akhir Periode Rencana OPD	Rencana Tahun 2024						Kelompok Anggaran	Praktisitas Monev Tahun 2025 (Rp.)		Perangkat Daerah Pemangku Jawab			
				Lokasi output kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dana/Pagu Indikatif				
1				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAERAH												
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM REKREASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 Persen		100 Persen	5.227.147.220				100 Persen	5.155.502.100		
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	90 Persen		90 Persen	4.293.724.000				90 Persen	4.388.495.330		
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1722 orang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	574 Orang/bulan	4.293.724.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan	Satpol PP Damkar	574 Orang/bulan	4.388.495.330
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawain perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	20.250.000				0 Persen			
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80 paket	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39 Paket	20.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan	ASN di Lingkungan Satpol PP Damkar	0 paket	
1	05	01	2.05	0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90 Persen		90 Persen	4.000.000				90 Persen	10.000.000	
1	05	01	2.05	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 unit	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan	Satpol PP Damkar	1 unit	
1	05	01	2.05	0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 unit	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan	Satpol PP Damkar	10 unit	10.000.000

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024						Kelompok Resoran	Prediksi Mula Tahun 2025 (Rp.)		Pencapaian Daerah Penyelenggara Jawab
				Lokasi output kegiatan	Target Capaian Kinerja	Page Indikator (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dana Page Indikator	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen		90 Persen	110.443.200					90 Persen	213.350.050	
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	4 paket	1.483.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualttaa dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan	Satpol PP Damkar	4 paket	3.350.050	
1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	4 paket	10.304.800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualttaa dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan	Satpol PP Damkar	4 paket	30.000.000	
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	4 paket	6.594.500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualttaa dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan	Satpol PP Damkar	4 paket	16.000.000	
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	24 laporan	100.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualttaa dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan	Satpol PP Damkar	24 laporan	165.000.000	
1 05 01 2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 Persen		90 Persen	132.000.500					90 Persen	104.496.120	
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Jasa Surat M	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	12 Laporan	2.600.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualttaa dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan	Satpol PP Damkar	12 laporan	5.000.000	
1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	36 Laporan	30.694.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualttaa dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan	Satpol PP Damkar	36 laporan	28.538.120	
1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	12 Laporan	93.518.800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualttaa dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan	Satpol PP Damkar	12 laporan	72.960.000	
1 05 01 2.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berwujud baik	90 Persen		90 Persen	640.928.220					90 Persen	480.482.000	
1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	28 Unit	587.283.670	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualttaa dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan	Satpol PP Damkar	28 unit	348.240.000	
1 05 01 2.06 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	30 Unit	16.685.650	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualttaa dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan	Satpol PP Damkar	30 unit	60.000.000	
1 05 01 2.06 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	2 Unit	45.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualttaa dan Berdaya Saing	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan	Satpol PP Damkar	2 unit	70.212.000	

Kode	Unitas/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Target Akhir Periode Rastera (OPD)	Rencana Tahun 2024						Kelompok Eselon	Praktikasi Maja Tahun 2023/2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
				Lokasi output/kegiatan	Target (Capaian Kinerja)	Paga Indikasi (Rp)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dasar Paga (Indikasi)	
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan tantibum			100 Persen	4.195.073.200					100 Persen	2.991.489.000	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan tantibum			3 operasi	3.994.143.200					3 operasi	2.893.840.000	
1 05 02 2.01 0004	Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	324.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kota Padang Panjang	1 Dokumen	50.000.000	
1 05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 laporan	3.661.703.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kota Padang Panjang	55 laporan	2.893.840.000	
1 05 02 2.01 0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 laporan	8.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kota Padang Panjang	8 laporan	30.000.000	
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 operasi	260.930.000					1 operasi	107.849.000	
1 05 02 2.02 0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	200.930.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat Kota Padang Panjang	8 laporan	107.849.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Target akhir, Periode Renstra, OPD	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	Praktren Majo Tahun 2025 (Rp.)		Peningkat Daerah Pemanggang Jawab
				Lokas output kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah			10 Menit	1.308.560.750					10 Menit	1.308.560.400	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran			4 kegiatan	1.235.618.000					3 kegiatan	1.135.780.400	
1 05 04 2.01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Keselapsagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	15 Laporan	1.035.618.000	PENDAPATAN NASABLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Masyarakat Kota Padang Panjang	15 laporan	1.138.780.400	
1 05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pemadam Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Tertentu	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pemadam Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Tertentu	0	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	3 unit	200.000.000	PENDAPATAN NASABLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Masyarakat Kota Padang Panjang			
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan			2 kegiatan	40.987.750					2 kegiatan	45.000.000	
1 05 04 2.04 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	16 kecamatan	46.987.750	PENDAPATAN NASABLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Masyarakat Kota Padang Panjang	16 kecamatan	45.000.000	
1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Memerlukan Bantuan	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi memerlukan bantuan manusia			100 Persen	25.975.000					100 Persen	25.000.000	
1 05 04 2.05 0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Merugikan, Memerlukan Bantuan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	12 Laporan	25.975.000	PENDAPATAN NASABLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Masyarakat Kota Padang Panjang	12 Laporan	25.000.000	

BAB V

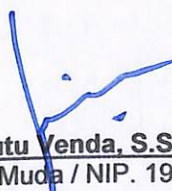
PENUTUP

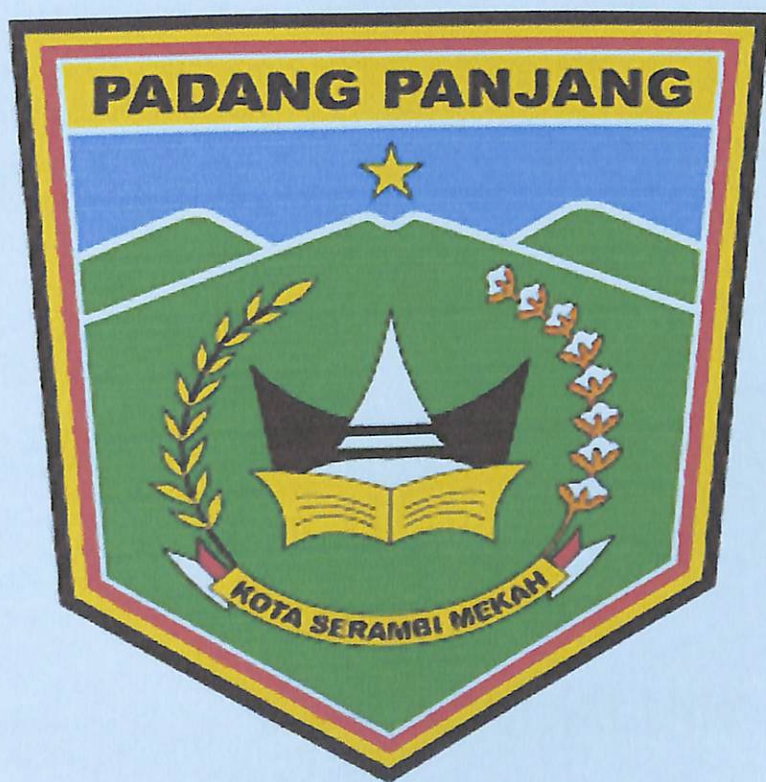
Demikian Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kota Padang Panjang tahun 2024 penyusunannya dilakukan berdasarkan Rencana Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024– 2026 (Pelaksanaan Tahun 2024) serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan/ pedoman bagi penyusunan Renja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Padang Panjang, Agustus 2023
Pt.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG


I Putu Yenda, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / NIP. 19770522 199511 1 001





PEMERINTAH

KOTA PADANG PANJANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	66
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	66
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.....	105
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	110
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	110
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	111
3.3 Program dan Kegiatan.....	114
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	153
BAB V PENUTUP.....	260



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna adalah pembangunan yang dilakukan dengan didasari sebuah perencanaan yang teknokratik, komprehensif dan terukur. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana, Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Keempat tahap tersebut merupakan tahapan yang mutlak dilaksanakan dalam proses pembangunan. Di samping itu, penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang harus berpedoman pada strategi dan kebijakan yang tepat, sehingga visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan terwujud.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di samping memperhatikan hasil perencanaan daerah berjenjang (Musrenbag Kelurahan, Kecamatan dan Kota).

Maka dari itu, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan lembaga teknis operasional dan sebagai penyelenggara pemerintah di tingkat daerah, perlu membuat Rencana Kerja, supaya kegiatan yang ada dapat terarah dan tersusun sesuai dengan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Secara legalitas formal, penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 ini didasarkan antara lain kepada :



- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif Terhadap Wanita (CEDAW);
- d. Undang Undang Nomor 68 tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- i. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- j. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- k. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- l. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- m. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- n. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan



Penurunan Stunting;

- o. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- s. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- t. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
- u. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang ;



- v. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
- w. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yaitu sebagai pedoman dan acuan dalam merencanakan penyusunan RKA yang memuat program dan kegiatan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya prioritas Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam turut mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah kedalam rencana kegiatan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang disusun dengan sistematika berikut ini :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun -1) , mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja.

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab ini merupakan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja serta Program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan.

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu , dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dana tau realisasi APBD untuk Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Lalu Dan Capaian Rencana strategis Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang melaksanakan 3 (tiga) urusan Wajib yang terdiri dari Urusan Sosial, Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan struktur organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang terdiri dari empat bidang dan satu sekretariat. Pada tahun 2022 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang melaksanakan 13 (tiga belas) program dengan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan. Realisasi pelaksanaan rencana kerja per urusan adalah sebagai berikut :

1. Non Urusan : Alokasi anggaran pada pada bidang Non Urusan yang dilaksanakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.5.646.568.200,- dengan realisasi sebesar Rp.5.542.336.135,- (98,15%) dengan realisasi fisik mencapai 100%;
2. Urusan Sosial : Anggaran yang mendukung pelaksanaan program urusan sosial adalah sebesar Rp.8.674.509.150 dengan realisasi keuangan pada Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.6.786.081.605,- (78,23%), dengan realisasi fisik mencapai 100%;
3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Alokasi anggaran penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.460.479.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.456.083.585,- (99,05 %), dengan realisasi fisik mencapai 100%;
4. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : Alokasi anggaran penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.2.608.137.350,- dengan realisasi sebesar Rp.2.288.368.671,- (87,73%), dengan realisasi fisik mencapai 100%;

Rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang pada tahun 2022 mencapai 86,68%. Namun masih terdapat beberapa subkegiatan dengan realisasi keuangan dibawah 75%.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2022



Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2022 antara lain :

- a. Secara umum tidak ada kendala dalam pencapaian kinerja Tahun 2022. Dapat dijelaskan pada kegiatan yang pencapaian realisasi keuangannya dibawah target misalkan Dana Inflansi Daerah yang jauh dari target karena data penerima dana DID tidak boleh menerima bantuan;
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak kepada kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi daerah;
- c. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia.

Disamping faktor penghambat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, juga terdapat faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja, diantaranya adalah:

- a. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- b. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ;
- c. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/badan/kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya;
- e. Semakin banyak masyarakat yang antusias untuk mengikuti sosialisasi - sosialisasi yang di adakan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sampai dengan tahun berjalan sesuai dengan tabel dibawah ini :

TABEL 2.1

**REKAPITULASI HASIL ÉVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 KOTA PADANG PANJANG**

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2023	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8(7/6)	9(=10)	10 (5+7+9)	11(10/4)
	URUSAN SOSIAL										
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penurunan rumah tangga miskin	4%	persen	4%	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE FM) perkotaan	Jumlah kelompok KUBE FM yang dibina	84	Kelompok	84	-	-	-	-	-	-

	Penanganan fakir miskin	Jumlah KK Miskin yang menerima bantuan selama 10 bulan	300	KK	300	-	-	-	-	-	-
	Penanganan fakir miskin dan Verifikasi Validasi data PMKS	Jumlah KK Miskin yang menerima bantuan selama 10 bulan	1500	KK	300	-	-	-	-	-	-
		Jumlah PSM dan TKSK yang dilatih dan dinilai	95	Orang	95	-	-	-	-	-	-
		Jumlah buku data kemiskinan yang diterbitkan	5	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan pembinaan KUBE FM	Jumlah kelompok KUBE FM yang dibina	93	Kelompok	0	-	-	-	-	-	-
	Dana DAK Bidang Sosial	Jumlah sarana dan prasana sosial yang diadakan	4	Paket	0	-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	75%	Persen		-	-	-	-	-	-
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Kelembagaan sosial yang aktif	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS dan kelembagaan sosial yang dibina	100	persen	-	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah PSM dan TKSK yang dibina	94	orang	94	94	94	100	94	94	100

Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM/ PSM	92	Orang	-	50	50	100	42	42	100
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok KUBE FM yang dibina dan difasilitasi Jumlah keluarga harapan yang di dampingi	93 kelompok 1309 KK	-	13 kelompok	-	-	-	-	-	13.98
		Jumlah data PPKS yang dibuat	1	dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah TK\$K yang dibuat	2	orang	2	2	2	100	2	2	100
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah galeri PKK yang dibuat	1		0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kelompok PKK yang mengikuti jambore PKK	18	kelompok	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kelompok PKK yang dibina	18	kelompok	18	-	-	-	-	-	-
		jumlah kelompok dasawisma yang aktif	685	kelompok	685	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Posyandu yang dibina	93	posyandu	93	-	-	-	-	-	-
		Jumlah LPM yang dinilai	16		16	-	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta Mukerda LPM	55	orang	55	-	-	-	-	-	-

		Jumlah inovasi TTG yang diciptakan oleh masyarakat	10	inovasi	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kelurahan yang dibina untuk mengikuti BBGRM Tk. Provinsi dan nasional	1	kelurahan	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kelurahan yang di nilai dalam penilaian kelurahan berprestasi	6	kelurahan	6	-	-	-	-	-	-
		Jumlah karang taruna yang dibina	19		19	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam penanggulangan kesejahteraan sosial	8		8	-	-	-	-	-	-
									-	-	-
		Jumlah gaferi PKK yang dibuat	1 unit		-	1 unit	0	0	1unit	1 unit	100
		Jumlah DPD LPM yang difasilitasi pelaksanaan kegiatannya	1 lembaga		-	1 lembaga	1 lembaga	100	1 lembaga	1 lembaga	100
		Jumlah Inovasi TTG yang Dibuat	6 inovasi		-	6 inovasi	6 inovasi	100	6 inovasi	6 inovasi	100
		Jumlah karang taruna yang dibina	19 kelompok		-	19 kelompok	19 kelompok	100	19 kelompok	19 kelompok	100
		Jumlah kelompok dasawisma aktif	685 kelompok		-	685 kelompok	685 kelompok	100	685 kelompok	685 kelompok	100
		Jumlah kelompok dasawisma yang mengikuti lomba dasawisma berprestasi	19 kelompok		-	19 kelompok	19 kelompok	100	19 kelompok	19 kelompok	100
		Jumlah kelompok PKK yang mengikuti Jambore	19 kelompok		-	19 kelompok	19 kelompok	100	19 kelompok	19 kelompok	100

		Jumlah kelompok PKK yang mengikuti lomba gerakan PKK	19 kelompok	-	19 kelompok	19 kelompok	100	19 kelompok	19 kelompok	100
		Jumlah kelurahan yang mengikuti BBGRM	16 kelurahan	-	16 kelurahan	16 kelurahan	100	16 kelurahan	16 kelurahan	100
		Jumlah LKKS yang aktif	1 lembaga	-	1 lembaga	1 lembaga	100	1 lembaga	1 lembaga	100
		Jumlah LKS, LKSA, Posdaya dan Legiun Veteran yang dibina	3 lembaga	-	3 lembaga	3 lembaga	100	3 lembaga	3 lembaga	100
		Jumlah LPM yang dinilai	16 lembaga	-	16 lembaga	16 lembaga	100	16 lembaga	16 lembaga	100
		Jumlah peserta sarasehan dan temu ramah pada peringatan hari pahlawan	45 orang	-	45 orang	45 orang	100	45 orang	45 orang	100
		Jumlah Pokjantal Posyandu yang dibina	3 kelompok	-	3 kelompok	3 kelompok	100	3 kelompok	3 kelompok	100
		Jumlah Posyantek yang dibina	2 posyantek	-	2 posyantek	2 posyantek	100	2 posyantek	2 posyantek	100
		Jumlah Veteran dan Janda Veteran yang diberikan paket sembako	36 orang	-	36 orang	36 orang	100	36 orang	36 orang	100
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	jumlah kelayakan yang dikonseling	55		55	39	70.91	0	55	100
		Persentase penanganan kasus kelayan	100					100	100	100
		Jumlah petugas LK3	5 orang		5	5	100	5	5	100
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase lansia yang tertangani	100%	persen	-	-	-	-	-	-

		Persentase penyandang disabilitas yang tertangani	100%	persen	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase korban bencana yang tertangani	100%	persen	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	100%	persen	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase pertanganan gelandangan, pengemis, PSKS dan korban penyalahgunaan NAPZA	60%	persen	-	-	-	-	-	-	-
	Pendampingan Asistensi sosial lanjut usia orang dengan kecacatan berat	Jumlah lansia dan orang dengan kecacatan berat yang difasilitasi dalam penerimaan bantuan	125	Orang	125	-	-	-	-	-	-
	Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah keluarga harapan yang didampingi	1309	KPM	1309	-	-	-	-	-	-
	Operasional LK3	Jumlah Klien yang dilayani	275	Orang		-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH)	Jumlah keluarga harapan yang didampingi	1309	KPM	1309	-	-	-	-	-	-
	Asistensi sosial lanjut usia dan Asistensi orang dengan kecacatan berat	Jumlah lansia dan orang dengan kecacatan berat yang difasilitasi dalam penerimaan bantuan	500	Orang	125	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang dibina	225	Orang	70	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Perda Disabilitas	1	Dokumen	0	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Produktifitas lansia	Jumlah Lansia Yang diberi paket bantuan kebutuhan harian	740	Orang	215	-	-	-	-	-	-

		jumlah perlengkapan kamar lansia yang diadakan	80	Paket	32	-	-	-	-	-	-
		jumlah pertemuan bulanan lansia yang diadakan	50	Kali	20	-	-	-	-	-	-
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	korban bencana yang tertangani	4	Tahun	1	-	-	-	-	-	-
		jumlah pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat yang terkena bencana pada dapur umum lapangan pasca bencana	4	Tahun	1	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan dan Penanganan Penyandang Penyakit Sosial	Waktu penyandang penyakit sosial yang ditangani	4	Tahun	1	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Rumah Healing	Jumlah rumah healing yang terbentuk dan difasilitasi	1	Unit	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana rumah healing	1	Paket	1	-	-	-	-	-	-
		Rumah singgah yang dikelola	1	Unit	1	-	-	-	-	-	-
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase lansia yang tertangani	100	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyandang disabilitas yang tertangani	100	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	100	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA	100	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarut, anak terlarut, lanjut usia terlarut, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Persentase penanganan terhadap orang terlarut, anak jalanan, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	101	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan pemakanan	Jumlah KK miskin yang menerima bantuan selama 10 bulan	200			-	-	-	-	-	-
		Jumlah orang dengan kecacatan berat yang menerima bantuan	35			-	-	-	-	-	-
		Jumlah lansia yang menerima bantuan	90			-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Pemakanan	Jumlah lansia yang diberi paket bantuan kebutuhan harian	90	%	-	90 orang	90 orang	100%		90 orang	100%
		jumlah orang dengan kecacatan berat yang difasilitasi dalam penerimaan bantuan	90	%	-	35 orang	35 orang	100%		35 orang	100%
		Persentase masyarakat kurang mampu yang melakukan isolasi mandiri Covid-19 yang dibantu	90	%	-	-	-		100	100	100
	Penyediaan sandang	Jumlah perlengkapan kamar lansia yang disediakan	16			16	16	100	0	0	0
		Jumlah pertemuan bulanan lansia yang difasilitasi	10			10	10	100	0	0	0

	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Persentase penanganan Penyandang penyakit sosial	1			-	-	-	-	-	-
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang dibina	45 orang		-	45 orang	45 orang	100	0	0	100
		jumlah perda disabilitas yang diterbitkan	1	dokumen	-	1 dokumen	0	0	0	0	100
		presentase penyandang penyakit sosial yang ditangani	100	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kelayan yang Dirujuk	55	kelayan	-	-	-	-	50 kelayan	55 kelayan	100
	Pengadaan perlengkapan menjahit, komputer desain, étalase, dan perlengkapan masak lainnya.	Kecamatan Padang Panjang Barat	1 paket						1 paket	1 paket	100
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah kegiatan kreatifitas lansia yang disediakan	1 kegiatan		-	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang dijangkau dalam penyediaan paket makanan sesuai standar gizi, paket sandang dan yang memanfaatkan alat bantu	55%			50%	47%	94.22	53%	55%	100
	Sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah rumah hearing yang terbentuk dan difasilitasi	1	unit	1	1	1	100	1	1	100

		Rumah singgah yang dikelola	1	unit	1	1	1	1		1	100
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia Terlarantar yang Menerima Bantuan Permakanan	283	orang	-	-	-	-	280 orang	283	100
		Jumlah penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan	259	orang	-	-	-	-	254	259	100
	Penyediaan Sandang	Jumlah Lansia Terlarantar yang Menerima Bantuan Sandang	283	Orang	-	-	-	-	16 paket	283 orang	100
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang Disediakan	1	paket	-	-	-	-	1	1	100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spirtual, dan Sosial	Rumah Kreatifitas Disable yang Terbentuk	1	unit	-	-	-	-		1	100
		Jumlah perlengkapan menjahit bagi difabel yang diadakan	1 paket	paket	-	-	-	-	1	1	100
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penurunan KK miskin	4%		-	3%	0.73%	24.33	3.50%	4.00%	-
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	8	unit	-	1	1	100.00	4	8	100
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku DTKS dan PMKS yang dibuat	30			-	-	-	-	-	-
		Jumlah aplikasi yang dibuat	1			-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang dibuat dan dimutakhirkan	1	aplikasi	-	1	1	100	1	1	100

		Jumlah dokumen DTKS yang diterbitkan	1	dokumen	-	1	1	100	1	1	100
		Jumlah Unit Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dikembangkan	7	unit	-	-	-	-	3	7	100
	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Graduasi	8	persen	-	7	6.8	97.14	7	8	100
	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok KUBE yang Dibina	13	kelompok	-	-	-	-	13 kelompok	13 kelompok	100
		Jumlah Kelompok KUBE e-WARONG yang Dibina	4	kelompok	-	-	-	-	4	4	100
	Program Peranganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100	%	100	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan social yang tersedia	44	orang	44	44	44	100	44	44	100
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase penanganan korban bencana	100		100	-	-	-	-	-	-
		Persentase pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat yang terkena bencana pada dapur umum lapangan paska bencana	100	persen	100	100	100	100	100	100	100

		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didampingi	1309		-	1200	1200	100	-	-	91.67
		Jumlah Peserta Pelatihan TAGANA	25	orang		-	-	-	25	0	0
		Jumlah Taruna Siaga Bencana yang Dibina	25	orang		-	-	-	25	25	100
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	100	persen	100-	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	1	unit	1	1	1	100	1	1	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	1	unit	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah hari besar nasional yang diperingati	2		2	-	-	-	-	-	-
		Rehab berat Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	unit		-	-	-	-	1	100
	Program Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100		100	-	-	-	-	-	-
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	korban bencana yang tertangani	1	Tahun	1	-	-	-	-	-	-

	Penyediaan dapur umum lapangan pasca bencana	jumlah pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat yang terkena bencana pada dapur umum lapangan pasca bencana	1	Tahun	1	-	-	-	-	-	-
	Program pembinaan anak terlantar	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	1			-	-	-	-	-	-
	Rumah Singgah	Jumlah anak jalanan yang dibina	1	Tahun	1	-	-	-	-	-	-
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, PSKS dan korban penyalahgunaan NAPZA	0.4			-	-	-	-	-	-
	Pelayanan dan Penanganan Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah penyandang penyakit sosial yang ditangani	1	Tahun	1	-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	0.9			-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan kegiatan LKKS	Jumlah pelaku usaha yang terjaring dalam penanggulangan kesejahteraan sosial	35	Pelaku usaha	35	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah karang taruna yang dibina	19	Karang taruna	19	-	-	-	-	-	-
	Optimalisasi data dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah buku data yang kemiskinan diterbitkan	1	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-

	Pelatihan peningkatan kapasitas PSM dan TKSK	Jumlah PSM dan TKSK yang dilatih dan dinilai	377	Orang	95	-	-	-	-	-	-
		Jumlah karang taruna yang dibina	57	Karang taruna	0	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Alat Pelindung Diri bagi Kader dan Pilar Pilar Kesejahteraan Sosial	Jumlah kader dan pilar-pilar kesejahteraan sosial yang diberikan APD	2000	Orang	2000	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan peningkatan peranan lembaga kesejahteraan sosial serta kesetiakawanan sosial	Jumlah pelaku usaha yang terjaring dalam penanggulangan kesejahteraan sosial	37	Pelaku usaha	6	-	-	-	-	-	-
		Jumlah karang taruna yang dibina	19	Karang taruna	19	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kelompok KUBE FM yang dibina	104	Kelompok	104	-	-	-	-	-	-
		jumlah hari besar nasional yang di selenggarakan	3	Hari besar Nasional	3	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan peningkatan peranan lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah pelaku usaha yang terjaring dalam penanggulangan kesejahteraan sosial	30	Pelaku usaha	0	-	-	-	-	-	-
	Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	jumlah hari besar nasional yang di selenggarakan	12	Hari besar Nasional	3	-	-	-	-	-	-
2	Program peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat	Persentase LPM Aktif	73.68%			-	-	-	-	-	-
		Persentase PKK Aktif	73.68%			-	-	-	-	-	-
		Persentase lembaga adat yang Aktif	6.00%			-	-	-	-	-	-

		Swadaya masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat program	6.00%			-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah peserta Mukerda DPD LPM	55	Orang	55	-	-	-	-	-	-
		Jumlah LPM yang dinilai	16	Kelurahan	16	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan peningkatan peranan perempuan pedesaan melalui kegiatan Jambore PKK	Jumlah kelompok PKK yang mengikuti jambore PKK	16	Kelompok	16	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok PKK yang aktif	5	Kelompok	5	-	-	-	-	-	-
	Pendataan keluarga melalui dasawisma	Jumlah kelompok dasawisma yang aktif	685	Kelompok	685	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	Jumlah peserta Mukerda DPD LPM	220	Orang	110	-	-	-	-	-	-
		Jumlah LPM yang dinilai	64	Kelurahan	32	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	Jumlah kelompok PKK yang mengikuti jambore PKK	64	Kelompok	16	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kelompok PKK yang aktif	64	Kelompok	16	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kelompok dasawisma yang aktif	2740	Kelompok	685	-	-	-	-	-	-
	Pencanangan, monitoring, evaluasi Bulan Bhakti gotong royong masyarakat dan penilaian kelurahan berprestasi	Jumlah kelurahan yang dibina untuk mengikuti BBGRM Tk. Provinsi dan nasional	4	Kelurahan	1	-	-	-	-	-	-

		Jumlah kelurahan yang dinilai dalam penilaian kelurahan berprestasi	24	Kelurahan	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah RT yang dinilai dalam penilaian RT berprestasi	24	RT	0	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan terhadap teknologi tepat guna	Jumlah inovasi TTG yang diciptakan oleh masyarakat	52	Inovasi	0	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Teknis Penguatan Kelembagaan Pokjantal Posyandu	Jumlah Pokjantal yang dibina	19	Kelompok	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Posyandu yang dibina	91	Kelompok		-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	0.04			-	-	-	-	-	-
	Pencanangan, monitoring dan evaluasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	Jumlah kelurahan yang dibina untuk mengikuti BBGRM Tk. Provinsi dan nasional	1	Kelurahan	1	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan masyarakat melalui kelurahan berprestasi	Jumlah kelurahan yang dinilai dalam penilaian kelurahan berprestasi	6	Kelurahan	6	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan terhadap teknologi tepat guna	Jumlah inovasi TTG yang diciptakan oleh masyarakat	8	Inovasi	8	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat	Persentase lembaga adat yang Aktif	0.5			-	-	-	-	-	-

	Peningkatan Pemberdayaan kelembagaan adat	Jumlah lembaga adat yang aktif	4	Lembaga	4	-	-	-	-	-	-
3	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	0.62			-	-	-	-	-	-
	Fasilitas pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan	Jumlah peserta pelatihan pengasuhan anak berbasis hak anak	30	Orang	30	-	-	-	-	-	-
	Capacity building forda	Jumlah peserta pemilihan duta anak	52	Orang	52	-	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta capacity building forda	30	Orang	30	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan kota layak anak	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dinilai	6	Faskes	6	-	-	-	-	-	-
		Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA yang dibina	12	Sekolah	12	-	-	-	-	-	-
	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	0.73			-	-	-	-	-	-
		Persentase Forum Anak yang Aktif	0.5789			-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, lingkungan dan perlindungan	Jumlah peserta pelatihan pengasuhan anak berbasis hak anak	120	Orang	30	-	-	-	-	-	-
		Jumlah PUSPAGA yang dibina	1	Lembaga	1	-	-	-	-	-	-

	Penyediaan dapur umum lapangan pasca bencana	jumlah pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat yang terkena bencana pada dapur umum lapangan pasca bencana	1	Tahun	1	-	-	-	-	-	-
	Program pembinaan anak terlantar	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	1			-	-	-	-	-	-
	Rumah Singgah	Jumlah anak jalanan yang dibina	1	Tahun	1	-	-	-	-	-	-
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, PSKS dan korban penyalahgunaan NAPZA	0.4			-	-	-	-	-	-
	Pelayanan dan Penanganan Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah penyandang penyakit sosial yang ditangani	1	Tahun	1	-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	0.9			-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan kegiatan LKKS	Jumlah pelaku usaha yang terjaring dalam penanggulangan kesejahteraan sosial	35	Pelaku usaha	35	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah karang taruna yang dibina	19	Karang taruna	19	-	-	-	-	-	-
	Optimalisasi data dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah buku data yang kemiskinan diterbitkan	1	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-

	Pelatihan peningkatan kapasitas PSM dan TKSK	Jumlah PSM dan TKSK yang dilatih dan dinilai	377	Orang	95	-	-	-	-	✓	-
		Jumlah karang taruna yang dibina	57	Karang taruna	0	-	-	-	-	✓	-
	Penyediaan Alat Pelindung Diri bagi Kader dan Pilar Pilar Kesejahteraan Sosial	Jumlah kader dan pilar-pilar kesejahteraan sosial yang diberikan APD	2000	Orang	2000	-	-	-	-	✓	-
	Pembinaan dan peningkatan peranan lembaga kesejahteraan sosial serta kesetiakawanan sosial	Jumlah pelaku usaha yang terjaring dalam penanggulangan kesejahteraan sosial	37	Pelaku usaha	6	-	-	-	-	✓	-
		Jumlah karang taruna yang dibina	19	Karang taruna	19	-	-	-	-	✓	-
		Jumlah kelompok KUBE FM yang dibina	104	Kelompok	104	-	-	-	-	✓	-
		jumlah hari besar nasional yang di selenggarakan	3	Hari besar Nasional	3	-	-	-	-	✓	-
	Pembinaan dan peningkatan peranan lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah pelaku usaha yang terjaring dalam penanggulangan kesejahteraan sosial	30	Pelaku usaha	0	-	-	-	-	✓	-
	Pelestarian nilai kearifan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	jumlah hari besar nasional yang di selenggarakan	12	Hari besar Nasional	3	-	-	-	-	✓	-
2	Program peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat	Persentase LPM Aktif	73.68%			-	-	-	-	✓	-
		Persentase PKK Aktif	73.68%			-	-	-	-	✓	-
		Persentase lembaga adat yang Aktif	6.00%			-	-	-	-	✓	-

		Swadaya masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat program	6.00%			-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah peserta Mukerda DPD LPM	55	Orang	55	-	-	-	-	-	-
		Jumlah LPM yang dinilai	16	Kelurahan	16	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan peningkatan peranan perempuan pedesaan melalui kegiatan Jambore PKK	Jumlah kelompok PKK yang mengikuti jambore PKK	16	Kelompok	16	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok PKK yang aktif	5	Kelompok	5	-	-	-	-	-	-
	Pendataan keluarga melalui dasawisma	Jumlah kelompok dasawisma yang aktif	685	Kelompok	685	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	Jumlah peserta Mukerda DPD LPM	220	Orang	110	-	-	-	-	-	-
		Jumlah LPM yang dinilai	64	Kelurahan	32	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	Jumlah kelompok PKK yang mengikuti jambore PKK	64	Kelompok	16	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kelompok PKK yang aktif	64	Kelompok	16	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kelompok dasawisma yang aktif	2740	Kelompok	685	-	-	-	-	-	-
	Pencanangan, monitoring, evaluasi Bulan Bhakti gotong royong masyarakat dan penilaian kelurahan berprestasi	Jumlah kelurahan yang dibina untuk mengikuti BBGRM Tk. Provinsi dan nasional	4	Kelurahan	1	-	-	-	-	-	-

		Jumlah kelurahan yang dinilai dalam penilaian kelurahan berprestasi	24	Kelurahan	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah RT yang dinilai dalam penilaian RT berprestasi	24	RT	0	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan terhadap teknologi tepat guna	Jumlah inovasi TTG yang diciptakan oleh masyarakat	52	Inovasi	0	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Teknis Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu	Jumlah Pokjanal yang dibina	19	Kelompok	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Posyandu yang dibina	91	Kelompok		-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	0.04			-	-	-	-	-	-
	Pencanangan, monitoring dan evaluasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	Jumlah kelurahan yang dibina untuk mengikuti BBGRM Tk. Provinsi dan nasional	1	Kelurahan	1	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan masyarakat melalui kelurahan berprestasi	Jumlah kelurahan yang dinilai dalam penilaian kelurahan berprestasi	6	Kelurahan	6	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan terhadap teknologi tepat guna	Jumlah inovasi TTG yang diciptakan oleh masyarakat	8	Inovasi	8	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat	Persentase lembaga adat yang Aktif	0.5			-	-	-	-	-	-

	Peningkatan Pemberdayaan kelembagaan adat	Jumlah lembaga adat yang aktif	4	Lembaga	4	-	-	-	-	-	-
3	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	0.62			-	-	-	-	-	-
	Fasilitas pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan	Jumlah peserta pelatihan pengasuhan anak berbasis hak anak	30	Orang	30	-	-	-	-	-	-
	Capacity building forda	Jumlah peserta pemilihan duta anak	52	Orang	52	-	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta capacity building forda	30	Orang	30	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan kota layak anak	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dinilai	6	Faskes	6	-	-	-	-	-	-
		Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA yang dibina	12	Sekolah	12	-	-	-	-	-	-
	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	0.73			-	-	-	-	-	-
		Persentase Forum Anak yang Aktif	0.5789			-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, lingkungan dan perlindungan	Jumlah peserta pelatihan pengasuhan anak berbasis hak anak	120	Orang	30	-	-	-	-	-	-
		Jumlah PUSPAGA yang dibina	1	Lembaga	1	-	-	-	-	-	-

		Jumlah peserta pelatihan (TOT) SDM pencegahan, pelayanan dan pendampingan korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di sekolah	120	Orang	30	-	-	-	-	-	-
		Jumlah PATBM yang dibina	2	Lembaga	2	-	-	-	-	-	-
	Capacity building forda	Jumlah peserta pemilihan duta anak	208	Orang	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta capacity building forda	120	Orang	30	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan kota layak anak	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dinilai	24	Faskes	6	-	-	-	-	-	-
		Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA yang dibina	30	Sekolah	30	-	-	-	-	-	-
	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	75%			65%	65.20%	100.31 %	70%	75%	100%
		Persentase forum anak yang aktif	52.6%			36.8%	36.8%	100.00 %	47.4%	52.6%	100%
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA	16	sekolah		-	-	-	16.0%	70.0%	100%
		Jumlah fasilitas kesehatan yang menginisiasi PRA	40	%		-	-	-	40.0%	80.0%	100%

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi yang Dilaksanakan (KLA, PRA, SRA)	3	kegiatan		-	-	-	3	3	100
		Jumlah Gugus Tugas KLA yang Mengikuti Bimtek	30	orang		-	-	-	30	30	100
		Jumlah Pertemuan Gugus Tugas KLA yang Dilaksanakan	4	kegiatan		-	-	-	4	4	100
		Jumlah peserta Desiminasi informasi tentang pola asuh anak pada pergasuhan alternatif di boarding school	60	%		-	-	-	60.0%	60.0%	100%
		Jumlah peserta pelatihan SRA	50	%		-	-	-	50.0%	50.0%	100%
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak yang dibina	19	form	19	19	19	100	19	19	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta capacity building forda	30			-	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta capacity bulding forda Jumlah peserta pemilihan duta anak	30 orang 52 orang		-	30 orang 52 orang	30 orang	100	-	30 orang 52 orang	100
		Jumlah Peserta Jambore Forum Anak	160	orang	-	-	-	-	-	160	100

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah faskes yang mengembangkan PRA	6			-	-	-	-	-	-
		Jumlah sekolah yang mengembangkan SRA	20			-	-	-	-	-	-
		Jumlah PATBM yang dibina	2			-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang dinilai Jumlah PATBM yang dibina Jumlah peserta pelatihan Pengasuhan anak berbasis hak anak Jumlah peserta pelatihan TOT SDM pencegahan pelayanan dan pendampingan korban kekerasan eksploitasi pelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak sekolah Jumlah PUSPAGA yang dibina Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA yang dibina	16 kelompok 32 orang 32 orang	-	6 lembaga 2 kelompok 30 orang 30 orang 1 lembaga 20 sekolah	6 lembaga 2 kelompok 30 orang 30 orang 1 lembaga 20 sekolah	100	16 kelompok 32 orang 32 orang	16 kelompok 32 orang 32 orang	100	
		Jumlah Kelompok Anak yang Mengikuti Jambore Forum Anak	16 kelompok	-	-	-	-	16 kelompok	16 kelompok	100	
		Jumlah Peserta Capacity Building Forda	32	Orang	-	-	-	32	32	100	
		Jumlah Peserta Pemilihan Duta Anak	52	orang	-	-	-	52	52	100	

	Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100		100	-	-	-	-	-	-
	Program perlindungan khusus anak	Persentase kasus anak korban kekerasan yang terselesaikan	100	%	100	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100	%	-	100	100	100	-	100	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang tertangani	100	%	100	100	100	100	100	100	100
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100	%	-	-	-	-	100	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan Anti Kekerasan perempuan dan anak yang Terbentuk	2	kelurahan	-	-	-	-	2	2	100
		Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan	4	kegiatan	-	-	-	-	4	4	100
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	90	Orang	-	-	-	-	90	90	100

		Pencegahan Terhadap Anak									
		Jumlah PATBM yang terbantu	16	PATBM	-	-	-	-	16	16	100
		Jumlah kader PATBM yang dibina	80	Orang	-	-	-	-	80	80	100
				-							
4	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase ARG terhadap APBD	6%	%	-	10	4.09	41	5	6	100
		Persentase organisasi perempuan aktif	100%		-	73	100	137	100	100	100
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah peserta sosialisasi PUG (pokja, focal point dan kelurahan, kecamatan)	101	Orang	101	-	-	-	-	-	100
	Penguatan kelembagaan PUG dan Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Jumlah peserta sosialisasi PUG (pokja, focal point dan kelurahan, kecamatan)	404	Orang	101	-	-	-	-	-	25
		Jumlah peserta BinteK bagi Tim PPRG dalam percepatan PUG	472	Orang	0	-	-	-	-	-	0
		Jumlah materi KIE KKG yang disediakan	3	Paket	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen profil gender dan anak	4	Dokumen	0	-	-	-	-	-	-
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil gender yang di buat	100	persen	-	100	100	100	100	100	100

	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah dokumen profil gender dan anak yang diterbitkan	1	dokumen	-	1	1	100	1	1	100
		Jumlah peserta bimtek bagi tim PPRG dalam percepatan PUG	118	orang	-	118	118	100	-	118	100
		Jumlah peserta sosialisasi PUG (Pokja, Fokal Poin, Kecamatan kelurahan)	101	orang	-	101	101	100	-	101	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	26	organisasi	-	26	26	100	26	26	100
	Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus dan anggota organisasi perempuan yang mengikuti bimtek	26	orang	-	26	26	100	26	26	100
		Jumlah pertemuan rutin yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar yang Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengurus dan anggota organisasi perempuan yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas pengurus organisasi perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	Jumlah PATBM yang terbentuk	2	Kelompok	2	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan organisasi perempuan	Kegiatan organisasi perempuan yang difasilitasi pelaksanaannya	5	Tahun	2	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Jumlah dokumen profil gender dan anak	1	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial	Jumlah Pimpinan organisasi publik yang mengikuti sosialisasi	80	Orang	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Perempuan partai politik yang mengikuti sosialisasi	60	Orang	0	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	1			-	-	-	-	-	-
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	1			-	-	-	-	-	-
	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT di sekolah	Jumlah peserta pelatihan (TOT) SDM pencegahan, pelayanan dan pendampingan korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di sekolah	30	Orang	30	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan	Persentase kasus yang tertangani	1	1	1	-	-	-	-	-	-

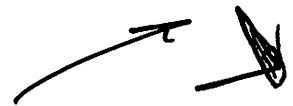
	dan anak terhadap tindak kekerasan										
	Sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak	Peserta sosialisasi Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak	100	Orang	100	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Peserta sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus P2TP2A (Penanganan kasus dan penanganan ABH)	50	Orang	50	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100	Persen	-	100	100	100	100	100	100
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	101	Persen	-	100	100	100	100	100	100
	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	persentase kasus yang tertangani	102	Persen	-	100	100	100	100	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan	4	kegiatan	-	-	-	-	-	4	100
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	90	persen	-	-	-	-	-	90	100

	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG terhadap APBD	5	%		-	-	-	-	✓	-
		Persentase organisasi perempuan aktif	73	%		-	-	-	-	✓	-
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					-	-	-	-	✓	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG	101			-	-	-	-	✓	-
		Jumlah peserta bimtek Tim PPRG	118			-	-	-	-	✓	-
		Jumlah dokumen profil gender yang dibuat	30			-	-	-	-	✓	-
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					-	-	-	-	✓	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	26			-	-	-	-	✓	-
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100			-	-	-	-	✓	-

	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang tertangani	100			100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus anak korban kekerasan yang terselesaikan	100	persen		100	100	100	100	100	100
	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100	persen		100	100	100	-	-	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaringan antar lembaga Penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang tertangani	100	persen		100	100	100	-	-	100
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100	persen	-	-	-	-	100	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan Anti Kekerasan perempuan dan anak yang Terbentuk	2	kelurahan	-	-	-	-	2	2	100

		Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan	4	kegiatan	-	-	-	-	4	4	100
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Terhadap Anak	90	orang	-	-	-	-	90	90	100
		Jumlah PATBM yang terbantu	16	PATBM	-	-	-	-	-	16	100
		Jumlah kader PATBM yang dibina	80	%	-	-	-	-	-	80	100
5	Program keluarga berencana	Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	41.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan KIE/Teknik motifasi dan konseling program KB/KS	Cakupan data basis kependudukan dan penyusunan program KKBPK	16	Kelurahan	16	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah kader yang dibina	322	Orang	322	-	-	-	-	-	-
		Jumlah penilaian KKG PKK KB Kes yang dilaksanakan	3	Kegiatan	3	-	-	-	-	-	-
	DAK Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana KB yang diadakan	1	Paket	1	-	-	-	-	-	-
	DAK Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Balai penyuluhan yang difasilitasi	2	Balai Penyuluhan	2	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kampung KB yang difasilitasi	3	Kampung KB	3	-	-	-	-	-	-

	Program kesehatan reproduksi remaja	Persentase kelompok PIK R jalur pendidikan dan masyarakat yang aktif	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemilihan Duta GenRe Jalur Pendidikan dan Jalur Masyarakat	Jumlah finalis yang mengikuti pemilihan Duta GenRe	60	Orang	60	-	-	-	-	-	-
	Ajang temu kreatifitas PIK Remaja melalui Jambore Saka Kencana	Jumlah pengurus PIK R yang mengikuti Jambore	300	Orang	300	-	-	-	-	-	-
	Program pelayanan kontrasepsi	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	0.5899			-	-	-	-	-	-
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi	Jumlah PUS yang dilayani	1017	PUS		-	-	-	-	-	-
	Program peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase keluarga sasaran yang menjadi anggota kelompok tribina mandiri	0.5652			-	-	-	-	-	-
	Pemantapan ketahanan keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang dibina dan penilaian Tribina berprestasi	133	Kelompok	133	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kelompok UPPKS yang dibina melalui monitoring dan lomba kelompok UPPKS berprestasi	25	Kelompok	25	-	-	-	-	-	-
		Jumlah gelar dagang yang diikuti	3	Kegiatan	3	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan pengendalian penduduk	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	1			-	-	-	-	-	-
	Grand pengendalian design	Jumlah dokumen rancangan pengendalian penduduk yang dibuat	1	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-



	kependudukan Padang Panjang	Kota										
	Program pengendalian penduduk dan KB	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	1			-	-	-	-	-	-	-
		Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	0.5833			-	-	-	-	-	-	-
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	0.6235			-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan pengendalian penduduk	Jumlah dokumen rancangan pengendalian penduduk	3	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-
		Cakupan pelaksanaan KIE Program KKBPK melalui media Mupen dan media lainnya	48	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen analisis program KKBPK	4	Dokumen	0	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah sekolah peduli kependudukan yang terbentuk	8	Sekolah	0	-	-	-	-	-	-	-
		Cakupan data basis kependudukan dan penyusunan program KKBPK	16	Kelurahan	16	-	-	-	-	-	-	-
		jumlah peserta sosialisasi program KKBPK kepada mitra kerja	140	Orang	0	-	-	-	-	-	-	-

		Jumlah dokumen kajian dan analisis dampak kependudukan	2	Dokumen	0	-	-	-	-	✓	-
		jumlah Kampung KB yang dibina	3	Kampung KB	3	-	-	-	-	✓	-
	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah penilaian KKG PKK KB Kes yang dilaksanakan	12	Penilaian	3	-	-	-	-	✓	-
		Jumlah kader KB/KS yang dibina	1398	Kader	347	-	-	-	-	✓	-
	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yang dibina	8	PKB	0	-	-	-	-	✓	-
		Jumlah Kegiatan skala provinsi dan nasional yang diikuti	40	Kegiatan	0	-	-	-	-	✓	-
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasespsi serta pelaksanaan pelayanan KB	Jumlah PUS yang dilayani	4133	PUS	2050	-	-	-	-	✓	-
		Jumlah petugas klinik KB dan bidan swasta yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi pelayanan KB	25	Orang	25	-	-	-	-	✓	-
	DAK Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana KB yang diadakan	4	Paket	2	-	-	-	-	✓	-
	DAK Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Balai penyuluhan yang difasilitasi	2	Balai Penyuluhan	2	-	-	-	-	✓	-

		Jumlah kampung KB yang difasilitasi	3	Kampung KB	3	-	-	-	-	-	-
	Program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga sasaran yang menjadi anggota kelompok tribina	0.5671			-	-	-	-	-	-
		Persentase kelompok PIK R jalur pendidikan dan masyarakat yang aktif	0.9143			-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang dibina dan penilaian Tribina berprestasi	532	Kelompok	133	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kelompok UPPKS yang dibina melalui monitoring dan lomba kelompok UPPKS berprestasi	100	Kelompok	25	-	-	-	-	-	-
		Jumlah gelar dagang yang diikuti	12	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah peserta GenRe Camp	300	Orang	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengurus PIK R yang mengikuti Jambore	1200	Orang	300	-	-	-	-	-	-
		Jumlah finalis yang mengikuti pemilihan Duta GenRe	240	Orang	60	-	-	-	-	-	-
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100			-	-	-	-	-	-

		Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	100	%		100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang memanfaatkan data basis bangga kencana sebagai acuan perencanaan	24	OPD		24	7	29.17	24	24	100
	Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah kader KB/KS yang dibina Jumlah penilaian KKG PKK KB Kes yang dilaksanakan	316 orang 3 kegiatan			316 orang 3 kegiatan	316 orang 3 kegiatan	100	-	-	-
		Jumlah kader KB/KS yang dibina							0	0	-
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Guru yang Mengikuti Orientasi Pembentukan Sekolah Peduli Kependudukan	20	orang		-	-	-	20	20	100
		Jumlah Sekolah Peduli Kependudukan yang Terbentuk	10	sekolah		-	-	-	6	10	100
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	70	%		71	70.5	99.30	70	70	100

Penduduk Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan										
Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Cakupan data basis kependudukan dan penyusunan program KKBPK cakupan pelaksanaan KIE Program KKBPK Melalui media Mupen dan media lainnya Jumlah dokumen analisis program KKBPK Jumlah dokumen rancangan Pengendalian penduduk Jumlah sekolah peduli Kependudukan yang terbentuk	16 kelurahan 12 kegiatan 0 dokumen 0 dokumen 4 sekolah				16 kelurahan 12 kegiatan 0 dokumen 0 dokumen 4 sekolah	16 kelurahan 12 kegiatan 0 dokumen 0 dokumen 4 sekolah	100	0	0	100
	Jumlah sekolah peduli kependudukan yang terbentuk	4				4	4	100	4	4	100
	Cakupan data basis kependudukan dan penyusunan program KKBPK	16				16	16	100	16	16	100
	Jumlah Kampung KB yang difasilitasi	3				3	3	100	3	3	100
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data yang Terbentuk	6	unit	-	-	-	-	-	5	6	100
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan yang Dibuat	12	laporan	-	-	-	-	-	12	12	100

		Jumlah Operator Statistik rutin	2	orang	-	-	-	-	2	2	100
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	0.61			0.61	0	0	0	1	100
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmet Need	22.5	%		11.75	23.15	197.02	22.8	22.5	100
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kampung KB yang difasilitasi	5			4	3	75	4	5	100
	Sub Kegiatan penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	Jumlah Media KIE yang Disediakan	1	paket	0	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	1	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan yang difasilitasi	2			-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Pertemuan Operasional Lini Lapangan	4 kegiatan			6 kegiatan			6 kegiatan	4 kegiatan	
		Jumlah Pertemuan Pokja Kampung KB	12 Kegiatan			12 Kegiatan			12 Kegiatan	0	
		Jumlah Pertemuan Poktan Kampung KB	12 Kegiatan			12 Kegiatan			12 Kegiatan	0	
		Jumlah orientasi lini lapangan	4 kegiatan							4 kegiatan	100
		Jumlah pelaksanaan penyuluhan KB	12 kegiatan							12 kegiatan	100
	Kegiatan Pendetayagunaan Tenaga Penyuluh	Jumlah PKB yang dibina	8			8	5	62.5	8	8	100

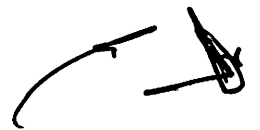
	KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)										
	Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pertemuan Kader IMP dan PLKB yang Dilaksanakan	12	kegiatan		-	-	-	12	12	100
		Jumlah kader IMP yang mengikuti kegiatan refitalisasi Program Bangga Kencana dan pencegahan stunting	50	%		-	-	-	-	50	100
	Sub Kegiatan pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Data Wilayah yang Dimutakhirkan	16	kelurahan		16	16	100	16	16	100
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PUS yang dilayani	69	peren		65	69.44	106.83	68	69	100
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan	Jumlah Faskes yang Difasilitasi Alokasi	6	faskes		6	6	100	6	6	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang dilayani	400			400	400	100	0	400	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS yang Dilayani	200	PUS		272	165	60.66	400	200	100

	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang KKBPK yang diadakan	1			1	1	100	1	1	100
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB yang aktif	100	%		100	100	100	100	100	100
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kegiatan Pelayanan KB yang Dilaksanakan dalam Momen-momen Strategis	4	kegiatan		4 kegiatan	-	0	4	4	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengolahan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan	11	kegiatan		0	0	0	0	11	100
		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB	2	kegiatan		-	-	-	-	2	100
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga sasaran yang menjadi anggota kelompok tribina	0.57			-	-	-	-	-	-
		Persentase kelompok PIK R jalur pendidikan dan masyarakat yang aktif	85,71%			-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					-	-	-	-	-	-

	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kelompok tribina yang dibina	133			-	-	-	-	✓	-
		Jumlah kelompok UPPKS yang dibina melalui monitoring dan lomba kelompok UPPKS berprestasi	25			-	-	-	-	✓	-
		Jumlah gelar dagang yang diikuti	3			-	-	-	-	✓	-
		Jumlah jinalis yang mengikuti pemilihan Duta GenRe	60			-	-	-	-	✓	-
		Jumlah pengurus PIK R yang mengikuti Jambore	300			-	-	-	-	✓	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga sasaran tribina yang ber KB	70.55	%		56.62	78.4	138.47	60.75	70.55	100
		Persentase kelompok PIK R yang aktif	75	%		86	71.43	83.06	73	75	100
		Persentase PUS keluarga sasaran BKB yang memperoleh pendampingan 1000 HP kelahiran	100	%		-	-	-	50	100	100

		Persentase kelompok PIK Remaja yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	100	%		-	-	-	100	100	100
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang dibina dan penilaian Tribina berprestasi	45	%		45	45	100.00	45	45	100
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi orang tua hebat. Generasi berencana, kelanjutan serta pengelolaan Keuangan keluarga)	Jumlah finalis yang mengikuti pemilihan duta GenRe Jumlah gelar dagang yang diikuti jumlah kelompok tribina yang dibina jumlah kelompok UPPKS yang di bina Jumlah pengurus dan pembinaan PIK R yang mengikuti ajang temu Kreatifitas PIK R Jumlah peserta GenRe camp	40 orang 2 kegiatan 55 kelompok 25 kelompok 300 orang 6 orang			40 orang 2 kegiatan 55 kelompok 25 kelompok 300 orang 6 orang	40 orang 2 kegiatan 55 kelompok 25 kelompok 300 orang 6 orang	100	-	-	100
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Finalisasi Duta Genre Tk. Kota	40	org	-	-	-	-	40	40	100
		Jumlah Gelar Dagang yang Diikuti	2	kegiatan	-	-	-	-	2	2	100
		Jumlah Kegiatan GenRe yang Difasilitasi	3	kegiatan	-	-	-	-	2	2	100

		Jumlah Lomba Bangsa Kencana yang Dilaksanakan	8	kegiatan	-	-	-	-	8	8	100
		Jumlah Peserta JAK GenRe Tingkat Kota	300	org	-	-	-	-	300	0	100
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Ketahanan Keluarga yang Diberikan Insentif	223	org	-	-	-	-	211	223	100
	Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok keluarga beresiko stunting yang didampingi	4 klmp		-	-	-	-	-	4 klmp	100
		Jumlah ibu hamil yang di dampingi	1125		-	-	-	-	-	1125	100
		jumlah Catin yang di dampingi	420		-	-	-	-	-	420	100
		Jumlah Audit Stunting yang dilaksanakan	2		-	-	-	-	-	2	100
		Jumlah minilok yang dilaksanakan	12		-	-	-	-	-	12	100



	Pelaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase stakeholder yang terlibat dalam percepatan penanggulangan stunting	100		-	-	-	-	-	100	100
	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Jumlah kader yang mengikuti workshop penanggulangan stunting	60		-	-	-	-	-	60	100
		Jumlah peserta yang mengikuti rakor stunting	70		-	-	-	-	-	70	100
		Jumlah rapat evaluasi percepatan penanggulangan penurunan stunting	4	kali	-	-	-	-	-	4	100
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90%			-	-	-	-	-	-
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	2	Jenis	2	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	17	Rekening	17	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan komponen dan jasa listrik, air dan komunikasi	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	17	Rekening	17	-	-	-	-	-	-

		Jumlah jenis komponen instalansi listrik yang disediakan	40	Jenis	20	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	205	Unit	82	-	-	-	-	-	-
		Jumlah tenaga harian sopir	35	Orang	14	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	30	Unit	12	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	20	Jenis	20	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	Jenis	5	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20	Jenis	5	-	-	-	-	-	-
		Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	8	Jenis	2	-	-	-	-	-	-
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	80	Jenis	20	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalansi listrik yang disediakan	10	Jenis	10	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum rapat dinas yang disediakan	5321	OK	2002	-	-	-	-	-	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	5	Tahun	2	-	-	-	-	-	-



	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kantor	Jumlah tenaga yang administrasi dipekerjakan	32	Orang	7	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6	Unit	6	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1	Tahun	1	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	27	Jenis	0	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	24	Unit	6	-	-	-	-	-	-
		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	4	Tahun	1	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0.2			-	-	-	-	-	-
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	30	Orang	6	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	1			-	-	-	-	-	-
	Penyusunan perencanaan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan Pelaporan	6	Laporan	6	-	-	-	-	-	-

	Penyusunan laporan kinerja keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	20	Laporan	20	-	-	-	-	-	-
	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	0.9			-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah					-	-	-	-	-	-
	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan yang disusun	12			-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	0.9			-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	33			-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun	1			-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran OPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang di susun	18			-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognóis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognóis yang di susun	1			-	-	-	-	-	-

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	0.9			-	-	-	-	-	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik yang disediakan	10			-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan pelatan kebersihan kantor yang disediakan	20			-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5			-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	70			-	-	-	-	-	-
		Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	800			-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyedia jasa penunjang pemerintah daerah	1			-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	5			-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	23			-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	0.9			-	-	-	-	-	-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	40			-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional dan lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	9			-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	34			-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	6			-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%			90%	90%	100	90%	90%	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%			100%	100%	100	100%	100%	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan yang Disusun	1			1	1	100	1	1	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	100%			100%	100%	100	100%	100%	100



	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	33	Org		33	33	100	33	37	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Jumlah Laporan yang Disusun	1	dokumen		1	1	100	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Seme steran OPD	Jumlah Laporan yang Disusun	1			1	1	100	1	1	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan yang Disusun	1			1	1	100	1	1	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%			100%	100%	100	100%	100%	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	10			10	10	100	10	10	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	20 jenis 2 jenis 8 orang			20 jenis 2 jenis 8 orang	20 jenis 2 jenis 8 orang	100	20 jenis 2 jenis 8 orang	20 jenis 2 jenis 8 orang	100
		Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan	20 Jenis			20 Jenis	20 Jenis	100	20 Jenis	20 Jenis	100
		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	20 Jenis			20 Jenis	20 Jenis	100	20 Jenis	20 Jenis	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 jenis			5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	5 jenis	100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah Makan Minum yang Disediakan	1086 ok			1086 ok	1086 ok	100	1086 ok	1086 ok	100
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti	1 tahun			1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
Penataan arsip dinamis	Jumlah arsip dinamis yang tertata						100			100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						100			100
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan						100			100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100			100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	5 rekening			5 rekening	5 rekening	100	5 rekening	5 rekening	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penjaga Malam yang Dipekerjakan	3 Orang			3 Orang	3 Orang	100	3 Orang	3 Orang	100
	Jumlah Tenaga Administrasi yang Dipekerjakan	8 orang			8 orang	8 orang	100	8 orang	8 orang	100
	Jumlah unut gedung yang digaja dan dibersihkan	6 unit			6 unit	6 unit	100	6 unit	6 unit	100
	Jumlah Tenaga Harian Sopir yang Dipekerjakan	7 orang			7 orang	7 orang	100	7 orang	7 orang	100
	Jumlah Tenaga Kebersihan yang Dipekerjakan	5 orang			5 orang	5 orang	100	5 orang	5 orang	100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100			100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	48 unit 7 orang			48 unit 7 orang	48 unit 7 orang	100	48 unit 7 orang	48 unit 7 orang	100
	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua yang Dipelihara	35 Unit			35 Unit	35 Unit	100	35 Unit	35 Unit	100
	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang Dipelihara	5 Unit			5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	5 Unit	100
	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Enam yang Dipelihara	1 Unit			1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dipelihara	1 tahun			1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	10 jenis 1 tahun			10 jenis 1 tahun	10 jenis 1 tahun	100	10 jenis 1 tahun	10 jenis 1 tahun	100
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	10 jenis 1 tahun			10 jenis 1 tahun	10 jenis 1 tahun	100	10 jenis 1 tahun	10 jenis 1 tahun	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	6 unit			6 unit	6 unit	100	6 unit	6 unit	100
	Rehab sedang kantor								1 unit	100

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan.

Keberhasilan kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Targer Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Angka PPKS			5.68	5.56	4.68	4.49	5.43		4.68	4.49	
Persentase PPKS yang tertangani			69.82	65	80	82.5	69.82		80	82.5	
Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif			90	90	100	100	90		100	100	
Indeks Pemberdayaan Gender			(69.44)	83.1	(71,44)	(73,05)	69.44		(71,44)	(73,05)	
Predikat KLA			Nindya	Nindya	Utama	Utama	Nindya		Utama	Utama	
Predikat APE			Pratama	Madya	Madya	Nindya	Pratama		Madya	Nindya	
Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar			79.85	75	83.5	87	79.85		83.5	87	
Prevalensi Stunting			16.80	15.50	14.00	12.60	25.42		14.00	12.60	

Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan			66.73	100	70	72.5	50.91		70	72.5	
Indeks Pembangunan Keluarga			54.13	55.5	57.5	58.5			57.5	58.5	
Rata-rata jumlah anak perkeluarga			2.40	2.25	2.35	2.3	2.4		2.35	2.3	



Pencapaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang pada tahun 2022 rata-rata dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- a. Masih banyak PPKS yang belum memperoleh bantuan dan kurangnya anggaran yang tersedia untuk penanganan PPKS;
- b. Masih belum optimal peranan dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak;
- c. Masih tingginya angka unmetneed;
- d. Belum semua PUS menyadari pentingnya 1000 HPK dalam pencegahan terjadinya stunting pada balita.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKP

Rancangan awal rencana kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dijadikan acuan dalam penyelenggaraan program , kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024. Rancangan Awal Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2024 - 2026, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan tidak berlangsung sesuai dengan rencana awal dikarenakan perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah dan keadaan keuangan daerah terkait dengan pemulihan ekonomi.

Melalui Rancangan Awal Renja Tahun 2024 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi : Penyesuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 dengan RPD Kota Padang Panjang dan Penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan, indicator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan capaian realisasi kinerja pembangunan Tahun 2023. Penyelarasan ini di sesuaikan dengan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan kodefikasi dan Nomengkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KOTA PADANG PANJANG

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD						Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			
			Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
					(2)	(4)	(3)	(4)	(5)	6	
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				8,630,443,537	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				10,774,446,355		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,211,560,000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8,972,974,128		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7,418,883,537	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8,972,974,128		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana,	100 %	5,069,445,262	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana,		100 %	6,066,496,798	

		Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak					Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 persen	4,055,93 0,882	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan keuangan perangkat daerah		100 persen	4,827,51 0,996	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ bulan	4,055,93 0,882	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	37 Orang/ bulan	4,827,51 0,996	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	18,000,0 00	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan a	- Kota Padan g Panjan g, Semua	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padan g Panjan g, Semua	37 Paket	18,000,0 00	

						Kecamatan, Semua Kel/Desa		Kecamatan, Semua Kel/Desa			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 persen	230,391,700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		100 persen	225,391,700	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Pading Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,391,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Pading Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Pading Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	5,391,700	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Pading Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	65,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Pading Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Pading Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Paket	60,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kota Pading Panjang, Semua	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kota Pading Panjang, Semua	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Pading Panjang, Semua	4 Paket	10,000,000	

	Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa		Kecamatan, Semua Kel/Desa			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	150,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	150,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		'Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	50,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		'Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100 persen	50,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	50,000,000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 persen	522,181, 680	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		100 persen	734,653, 102	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lapora n	53,893,6 80	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	3 Lapora n	53,893,6 80	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lapora n	468,288, 000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	4 Lapora n	680,759, 422	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		'Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	210,941, 000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		'Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		100 persen	210,941, 000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	111,525,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit	111,525,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	35,516,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Unit	35,516,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	23,900,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Unit	23,900,000	
Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang,	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	6 Unit	40,000,000	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang,	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	- Kota Padang Panjang,	6 Unit	40,000,000	

	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dipelihara/Dir ehabilitasi				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dipelihara/Dir ehabilitasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	75 %	1,069,679,700	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif		75 %	1,454,440,176	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	146 lembaga	1,069,679,700	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina		146 lembaga	1,454,440,176	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	267,222,800	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 Orang	363,973,550	

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	8,640,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	2 Orang	40,400,000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	700,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	60 Lembaga	946,500,000	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	93,816,900	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	5 Sertifikat	103,566,626	

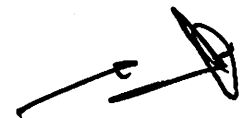
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS yang tertangani	90%	873,225,656	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS yang tertangani		90%	967,862,291	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 orang	499,514,256	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		750 orang	618,587,288	
Penyediaan Permakanan	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Ko ta	459 Orang	200,000,000	Penyediaan Permakanan	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Ko ta	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	459 Orang	179,000,000	
Penyediaan Sandang	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia	507 Orang	150,000,000	Penyediaan Sandang	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam	507 Orang	256,355,000	

	atan, Semua Kel/De sa	dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Ko ta				atan, Semua Kel/De sa	dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Ko ta	atan, Semua Kel/De sa			
Penyediaan Alat Bantu	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	22 Orang	80,000,000	Penyediaan Alat Bantu	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	22 Orang	71,000,000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Ko ta	50 Orang	49,514,256	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Ko ta	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	50 Orang	44,332,288	

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	150 Orang	20,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	150 Orang	67,900,000	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2628 orang	373,711,400	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		2628 orang	349,275,003	
Penyediaan Permakanan	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan	75 Orang	75,000,000	Penyediaan Permakanan	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan,	75 Orang	67,125,000	

	Semua Kel/De sa	Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Ko ta				Semua Kel/De sa	Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Semua Kel/De sa			
Penyediaan Sandang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75,000,000	Penyediaan Sandang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	75 Orang	67,125,000	
Penyediaan Alat Bantu	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	10,000,000	Penyediaan Alat Bantu	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	5 Orang	8,950,000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	120,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	30 Orang	107,400,000	

	Kel/De sa					Kel/De sa		Kel/De sa			
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Ko ta	8 Dokum en	93,711,4 00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Ko ta	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	8 Dokum en	98,675,0 03	
PROGRAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	86,98 %	228,029, 600	PROGRAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		86,98 %	223,130, 892	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupater/ko ta	8 layana n	228,029, 600	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ko ta		8 layana n	223,130, 892	



Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2169 Orang	79,320,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2169 Orang	83,019,000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Keluarga	133,709,600	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Keluarga	126,686,892	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 orang	15,000,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130 Orang	13,425,000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana	100 %	153,503,319	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana		100 %	238,668,971	

		yang tertangani					yang tertangani				
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		'Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 persen	80,000,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		'Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana		100 persen	71,600,000	
Penyediaan Makanan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	30,000,000	Penyediaan Makanan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	26,850,000	
Penyediaan Sandang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	300 Orang	30,000,000	Penyediaan Sandang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	26,850,000	

		Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
Pelayanan Dukungan Psikososial	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	20,000,000	Pelayanan Dukungan Psikososial	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	17,900,000		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah anggota TAGANA yang dibentuk	30 orang	73,503,319	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah anggota TAGANA yang dibentuk		30 orang	167,068,971		
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	30 Orang	73,503,319	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua	30 Orang	167,068,971		

	Kel/De sa	Kewenangan Kabupaten/Ko ta				Kel/De sa	Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Kel/De sa			
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang dipelihara	100 %	25,000,0 00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang dipelihara		100 %	22,375,0 00	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah makam yang dipelihara	98 Makam	25,000,0 00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah makam yang dipelihara		98 Makam	22,375,0 00	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	25,000,0 00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 Makam	22,375,0 00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,211,56 0,000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1,801,47 2,227	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				95,000,0 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					659,224, 977	

PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN		Persentase organisasi perempuan yang aktifProporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	100 %20 %	60,000,0 00	PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN		Persentase organisasi perempuan yang aktifProporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD		100 %20 %	163,928, 400	
Pelembagaan Pangarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a		1. Jumlah OPD yang memiliki data terpilah 2. Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	24 OPD	30,000,0 00	Pelembagaan Pangarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a		1. Jumlah OPD yang memiliki data terpilah 2. Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS		24 OPD	38,700,0 00	
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pangarusutama an Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Ko ta	24 Perang kat Daerah	30,000,0 00	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pangarusutama an Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Ko ta	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	24 Perang kat Daerah	38,700,0 00	

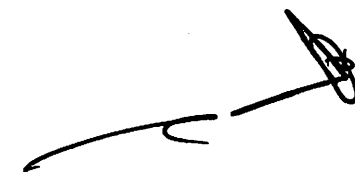
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50 Persen	30,000,000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota		50 Persen	15,000,000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	26 Lembaga	30,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Lembaga	15,000,000	

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 Persen	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus		100 Persen	110,228,400	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	-	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	110,228,400	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	-	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu		100 BTJ	147,229,290	



Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	-	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan		8 Lembaga	35,800,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	35,800,000	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan		Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 Persen	-	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan		Persentase kasus yang ditindaklanjuti		100 Persen	93,529,290	

Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Layanan	93,529,290	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	10 Layanan	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota		10 Layanan	17,900,000	



Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	-	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	17,900,000	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase indikator KLA yang terpenuhi	80 %	35,000,000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase indikator KLA yang terpenuhi		80 %	100,029,675	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	30 Lembaga	35,000,000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA		30 Lembaga	31,325,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	15 Dokumen	35,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	31,325,000	

		Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota				
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase forum anak aktif 2. Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA 3. Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	50 Persen	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase forum anak aktif 2. Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA 3. Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	50 Persen	68,704,675		
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	-	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	68,704,675	



PROGRAM PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ'	-	PROGRAM PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu		100 BTJ	248,037, 612	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a		Persentase kasus yang ditindak lanjuti	100 persen	-	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a		Persentase kasus yang ditindak lanjuti		100 persen	55,612,6 12	
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampinga n dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampinga n dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	10 Orang	19,812,6 12	

Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Dokum an	-	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	6 Dokum an	35,800,000	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a		Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Persen	-	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a		Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani		100 Persen	192,425,000	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 Orang	-	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	10 Orang	125,300,000	
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	- Kota Padan g Panjan g,	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	8 Orang	-	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	- Kota Padan g Panjan g,	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	- Kota Padan g Panjan g,	8 Orang	67,125,000	

	Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa					Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa					Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1,116,56 0,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1,142,24 7,250						
PROGRAM PENGENDALIA N PENDUDUK		Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependuduka n	100 %	147,650, 000	PROGRAM PENGENDALIA N PENDUDUK		Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependuduka n		100 %	123,450, 000					
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah dokumen kependuduka n yang dihasilkan	1 dokum en	-	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah dokumen kependuduka n yang dihasilkan		1 dokum en	35,800,0 00					

Advokasi sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur NonFormal dan informal	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan advokasi sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI, SLTP/MTS jalur Nonformal dan informal			-							
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	20 Kegiatan		-	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	- Kota Padan g Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	20 Kegiatan	35,800,000	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 unit	147,650,000		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah dataku yang dikembangkan		16 unit	87,650,000	

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	- Kota Padan g Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		20,000,000							
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	- Kota Padan g Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		40,000,000							
Pembentukan dari operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	- Kota Padan g Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dari Keluarga	16 Unit	87,650,000	Pembentukan dari operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	- Kota Padan g Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dari Keluarga	- Kota Padan g Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	16 Unit	87,650,000	garit noma

		Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk					
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase CPR	62 %	351,350,000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase CPR	62 %	319,158,250		
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2287 orang	75,000,000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2287 orang	17,900,000		
Pengendalian Program KKBPK	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	20,000,000	Pengendalian Program KKBPK	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	17,900,000	diprogram pengendalian penduduk

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dari Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	40,000,000								
Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dari Mitra Kerja	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dari Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	15,000,000								

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	99 orang	276,350,000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina		99 orang	246,350,000	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		30,000,000							
Pembinaan IMP dari Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	86 Organisasi	246,350,000	Pembinaan IMP dari Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86 Organisasi	246,350,000	

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	50 persen	-	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB		50 persen	54,908,250	
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	-	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Organisasi	54,908,250	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA		Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan	62 %	617,560,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA		Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan		62 %	699,639,000	

SEJAHTERA (KS)		Ketahanan Keluarga			SEJAHTERA (KS)		Ketahanan Keluarga				
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibentuk	114 kelompok	75,000,000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibentuk		114 kelompok	97,125,000	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutanusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutanusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	75,000,000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutanusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutanusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	97,125,000	

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	50 persen	542,560,000	Pelaksanaan dari Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB		50 persen	602,514,000	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dari Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	223 Organisasi	522.560,000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dari Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223 Organisasi	584,614,000	

		Keluarga/UPP KS)					Keluarga/UPP KS)				
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	20,000,000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	17,900,000	

2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan terhadap 1 usulan kegiatan yang diminta masyarakat ke Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat di akomodir dan terdapat 21 Pokok Pikiran Anggota Dewan DPRD Kota Padang Panjang yang telah di akomodir pada tahun 2024. Untuk beberapa usulan kegiatan yang tidak terakomodir karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 2.4

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
		Lokasi Output Kegiatan	Besaran / Volume	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif		386,000,000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina		386,000,000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Sosial Pekerja Masyarakat Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40,000,000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26,000,000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320,000,000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani		172,155,000	

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		172,155,000	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122,155,000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50,000,000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani		96,056,700	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina		96,056,700	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96,056,700	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan		25,000,000	
Pemetaan Pengendalian Cakupan Kabupaten/Kota	Perkiraan Penduduk Daerah	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	25,000,000	
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR		15,000,000	
Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tenaga yang dibina	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	15,000,000	

Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga		30,000,000	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok dan ketahanan keluarga yang dibina		30,000,000	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30,000,000	
JUMLAH			724,211,700	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Beberapa isu Strategis Nasional Tahun 2024, yaitu :

1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam (Menipisnya Cadangan Minyak dan Gas);
2. Peningkatan Populasi Penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan;
3. Efektifitas tata kelola sumber daya ekonomi (rendahnya pertumbuhan ekonomi);
4. Transformasi structural berjalan lambat :
 - a. Produktivitas rendah
 - b. Kualitas SDM tenaga Kerja Rendah;
5. Revolusi industry 4.0 dan ekonomi digital.

Target Pembangunan daerah Tahun 2024 : yaitu :

1. Tujuan1 adalah : terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing dengan indicator : indesk pembangunan manusia dengan target 2024 : 79,02 Indeks;
2. Tujuan 2 adalah : terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan indicator : Indeks reformasi birokrasi : 57,62 indeks;
3. Tujuan 3 adalah terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimbangan dengan indicator laju pertumbuhan ekonomi 5,52 %;



4. Tujuan 4 adalah : terwujudnya tatanan kehidupan social masyarakat yang tentran dan agamis dengan indicator : indeks rasa aman : 86,39 indek (Aman);
5. Tujuan 5 adalah : terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas dengan indicator : indeks kualitas layanan infrastruktur (IKLI) 90,53 % dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) : 66,80 %.

Dari target pembangunan daerah tahun 2024 diatas, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang telah menetapkan pada Rencana Kerja (Renja) 2024 program/kegiatan priuntuk menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 4,99%.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sesuai Rencana Startegis yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indicator : persentase penurunan stunting dengan target 11.05 %;
2. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB dengan indicator Indeks Pembangunan Keluarga 57,5 %;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dengan indicator IDG 71.44 dan prediket Kota Layak Anak Utama;
4. Menurunnya masalah kesejahteraan social dengan indicator : angka PPKS 5,25 %.

Sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, untuk mendukung capaian tujuan perangkat daerah ditetapkan beberapa sasaran strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting dengan indicator persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000HPK dengan target 70 %;

2. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indicator Rata-rata jumlah anak perkeluarga dengan target 2,35;
3. Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dengan indicator Predikat APE Madya ;
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan indicator persentase indicator KLA yang terpenuhi sesuai standar 83,5 %;
5. Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan social dengan indicator persentase PPKS yang tertangani 80 % ;
6. Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dengan indicator persentase lembaga social kemasyarakatan yang aktif 100 %.



3.3. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala daerah serta untuk memenuhi target SPM dan IKK pada Tahun 2024, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan urusan wajib yang diemban, yang terdiri dari :

1. Urusan Sosial melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan;
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 14 sub kegiatan;
3. Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, melaksanakan 3 program, 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan.

Program dan Kegiatan Dinas Sosial pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **tabel di bawah ini** :



TABEL 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Padang Panjang

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				10,774,446,355					13,274,133,663
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8,972,974,128					11,742,824,663
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial,		100 Persen	6,066,496,798			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial,	100 Persen	9,192,900,644

	perangkat daerah						perangkat daerah		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	37 Paket	18,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100 persen	225,391,700			Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	327,916,200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera	4 Paket	5,391,700	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,391,700

	perangkat daerah						perangkat daerah		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semu a Kecamatan Semu a Kel/De sa	37 Paket	18,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100 persen	225,391,700			Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	327,916,200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semu a Kecamatan Semu a	4 Paket	5,391,700	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,391,700

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan Semua Kel/Desa	4 Paket	60,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	65,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan Semua Kel/Desa	12 Paket	10,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	24,499,500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	- Kota Padang Panjang,	24 Laporan	150,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	80 Laporan	233,025,000

	dan Konsultasi SKPD	Semu a Keca riatan , Semu a Kel/De sa					dan Konsultasi SKPD		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 persen	50,000,000			Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Perse n	20,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semu a Keca riatan , Semu a Kel/De sa	13 Unit	50,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20,000,000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 persen	734,653,102			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	522,181,680
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Keci matan , Sumatera Kel/De sa	36 Laporan	53,893,680	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	53,893,680
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Keci matan , Sumatera Kel/De sa	12 Laporan	680,759,422	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	468,288,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		100 persen	210,941,000			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen	210,941,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Sumatra Barat, Kecamatan, Sumatra Barat, Kel/Desa	21 Unit	111,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	111,525,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Sumatra Barat, Kecamatan, Sumatra Barat, Kel/Desa	27 Unit	35,516,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	35,516,000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Sumatera Keci matan , Sumatera Kel/De sa	55 Unit	23,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	23,900,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	- Kota Padang Panjang, Sumatera Keci matan , Sumatera Kel/De sa	6 Unit	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	6 Unit	40,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase sumber kesejahteraan sosial dari kelembagaan sosial yang aktif		75 Persen	1,454,440,176			Persentase sumber kesejahteraan sosial dari kelembagaan sosial yang aktif	80 Persen	1,269,679,700



Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibangun		146 Lembar	1,454,440,176		Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibangun	148 Lembar	1,269,679,700
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 Orang	363,973,550	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	267,222,800
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	40,400,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	8,640,000

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	60 Lembaga	946,500,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	900,000,000
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	5 Sertifikat	103,566,626	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	93,816,900
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani		90 Persen	967,862,291		Persentase PPKS yang tertangani	90 Persen	873,711,400



Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlaritar, Anak Terlaritar, Lanjut Usia Terlaritar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlaritar, anak terlaritar, lanjut usia terlaritar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		750 orang	618,587,288		Jumlah penyandang disabilitas terlaritar, anak terlaritar, lanjut usia terlaritar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 Orang	500,000,000
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459 Orang	179,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	459 Orang	200,000,000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan	75 Orang	256,355,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	75 Orang	150,000,000

	Tahun Kewenangan Kabupaten/K ota	Semu a Kel/De sa					Tahun Kewenangan Kabupaten/K ota		
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatka n Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/K ota	- Kota Padan g Panja ng, Semu a Keca mian Semu a Kel/De sa	22 Orang	71,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatka n Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/K ota	22 Orang	80,000,000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/K ota	- Kota Padan g Panja ng, Semu a Keca mian Semu a Kel/De sa	50 Orang	44,332,288	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/K ota	50 Orang	50,000,000

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlar, Anak Terlar, Lanjut Usia Terlar, serta Gelandangan Perigemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlar, Anak Terlar, Lanjut Usia Terlar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Keciatan, Sumatera Kel/Desa	50 Orang	67,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlar, Anak Terlar, Lanjut Usia Terlar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	20,000,000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pariti Sosial	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		2628 orang	349,275,003		Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 Orang	373,711,400
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	- Kota Padang Panjang, Sumatera Keciatan, Sumatera	75 Orang	67,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	75 Orang	75,000,000

	Kewenangan Kabupaten/K ota	a Kel/De sa					Kewenangan Kabupaten/K ota		
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dari kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semu a Kecamatan Semu a Kel/Desa	75 Orang	67,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75,000,000
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semu a Kecamatan Semu a Kel/Desa	5 Orang	8,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	10,000,000

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	107,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	120,000,000
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	98,675,003	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	93,711,400
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		86,98 Persen	223,130,892			Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	87,97 Persen	228,029,600

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		8 layanan	223,130,892			Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	17 layanan	228,029,600
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2169 Orang	83,019,000	PENDATAAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2119 KK	79,320,000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua	1300 Keluarga	126,686,892	PENDATAAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1271 Keluarga	133,709,600



		Kel/De sa							
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130 Orang	13,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	15,000,000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani		100 Persen	238,668,971			Persentase korban bencana yang tertangani	100 Persen	153,503,319
Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana		100 persen	71,600,000			Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 Persen	80,000,000

		Kel/De sa							
Fasilitasi Bantuan Pengembangani Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangani Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130 Orang	13,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	15,000,000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani		100 Persen	238,668,971			Persentase korban bencana yang tertangani	100 Persen	153,503,319
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	'Persentase pemenuhan' makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana		100 persen	71,600,000			'Persentase pemenuhan' makanan, sandang dan dukungan psikososial' kepada korban bencana	100 Persen	80,000,000

Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Keci mntan , Semu a Kel/De sa	300 Orang	26,850,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	30,000,000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dari Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Keci mntan , Semu a Kel/De sa	300 Orang	26,850,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	30,000,000
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan	- Kota Padang Panjang, Semu	300 Orang	17,900,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan	300 Orang	20,000,000

	Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	a Kecamatan, Semu a Kel/Desa					Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina		30 orang	167,068,971			Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 Orang	73,503,319
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semu a Kecamatan Semu a Kel/Desa	30 Orang	167,068,971	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	73,503,319
	Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA		1 Unit				Pemeliharaan dari rehap bangunan markas komando TAGANA		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara		100 Persen	22,375,000			Persentase TMP yang dipelihara	100 Persen	25,000,000

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawari Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang dipelihara		98 Makam	22,375,000			Jumlah makam yang dipelihara	98 Makam	25,000,000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawari Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Keci mian , Sumatera Kel/De sa	98 Makam	22,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	25,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				659,224,977					711,869,000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi perempuan yang aktif		100 Persen	163,928,400			Persentase organisasi perempuan yang aktif	100 Persen	219,580,000
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD		20 Persen				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 Persen	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah		23 OPD	38,700,000			Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	23 OPD	40,000,000

	Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS		23 OPD				Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	23 OPD	
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan	23 Perangkat Daerah	38,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	23 OPD	40,000,000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik,		50 Persen	15,000,000			Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik,	50 Persen	30,000,000

	<i>hukum, sosial dan ekonomi kabupaten/k ota</i>						<i>hukum, sosial dan ekonomi kabupaten/k ota</i>		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	- Kota Padang Panjang, Sumatera Keci riatan Semu a Kel/De sa	26 Lemba ga	15,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	26 Lemba ga	30,000,000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang		100 Perse ri	110,228,400			Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang	100 persen	149,580,00 0

	penanganan kasus						penanganan kasus		
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kiri, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, Kepulauan Selayar, Kepulauan Karimata, Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Kepulauan Taka, Kepulauan Sempu, Kepulauan Selayar, Kepulauan Karimata, Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Kepulauan Taka, Kepulauan Sempu	15 Dokumen	110,228,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	149,580,000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu		100 BJT	147,229,290			Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BJT	149,532,000



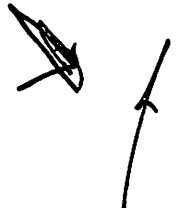
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan		8 Lembaga	35,800,000			Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	30,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	6 Dokumen	35,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	30,000,000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti		100 Persen	93,529,290			Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 Persen	104,502,000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Keci matan , Sumatera Kel/De sa	10 Layan an	93,529,290	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduari yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 layana n	104,502,000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota		10 Layan an	17,900,000		Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	10 Layan an	15,030,000
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Keci matan , Sumatera	15 Doku men	17,900,000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	15 Doku men	15,030,000

	Kabupaten/Kota	Kel/Desa					Kabupaten/Kota		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi		80 Perse n	100,029,675			Persentase indikator KLA yang terpenuhi	83 Perse n	120,620,000
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA		30 Lembaga	31,325,000			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	35 Lembaga	43,855,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	15 Dokumen	31,325,000	PENDATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	43,855,000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak aktif		50 Perse n	68,704,675			Persentase forum anak aktif	70 Perse n	76,765,000

	Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA		100 Persen				Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA	70 Persen	
	Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA		100 Persen				Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	70 Persen	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Orang	68,704,675	PENDATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Anak	76,765,000

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu		100 BTJ	248,037,612			Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	222,137,000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti		100 persen	55,612,612			Persentase kasus yang ditindak lanjuti	30 Lembar	62,137,000
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kiri Semua Kel/Desa	10 Orang	19,812,612	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	22,137,000



Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	6 Duku man	35,800,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Duku men	40,000,000
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani		100 Perse n	192,425,000			Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Perse n	160,000,000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	10 Orang	125,300,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	40,000,000



Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	67,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Orang	120,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1,142,247,250					819,440,000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan		100 Persen	123,450,000			Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 Persen	53,000,000

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan		1 dokumen	35,800,000			Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 Dokumen	23,000,000
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	20 Kegiatan	35,800,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	25 Kegiatan	23,000,000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan		16 unit	87,650,000			Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 Unit	30,000,000

Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan	16 Unit	87,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	30,000,000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR		62 Persen	319,158,250		Persentase CPR	65 Persen	193,880,000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif		2287 orang	17,900,000		Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	0 Akseptor	-

Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	17,900,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	0 Laporan	-
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina		99 orang	246,350,000			Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	99 Orang	137,880,000
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86 Organisasi	246,350,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan	40 Organisasi	137,880,000



	oleh PKB/PLKB						oleh PKB/PLKB		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB		50 persen	54,908,250			Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	50 Persen	56,000,000
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Kota Padang Panjang, Sumatera Keci mian , Semu a Kel/De sa	3 Organi sasi	54,908,250	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organi sasi	56,000,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga		62 Perse n	699,639,000			Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 Perse n	572,560,000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina		114 kelompok	97,125,000			Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	114 Kelompok	30,000,000
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	- Kota Padang Panjang, Sumatra Barat, Kota Padang Panjang, Sumatra Barat	3 Laporan	97,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	30,000,000

Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan , Sumatera Kel/Desa	1 Laporan	17,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	20,000,000
---	--	---	-----------	------------	------------------------------	--	--	-----------	------------



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Berdasarkan struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang menangani tiga urusan wajib yang terdiri dari Urusan Sosial, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kinerja Urusan Sosial diukur dari keberhasilan mengentaskan jumlah PPKS dan Peningkatan Pemberian jaminan sosial kepada keluarga sasaran penerima jaminan sosial. Sementara pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari peningkatan IDG dan prediket Kota Layak Anak. Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur dari penurunan angka TFR dan prevalensi stunting.

Untuk mendukung capaian kinerja per urusan diatas, telah ditetapkan sasaran Rencana Kinerja (Renja) yang mendukung sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

1. Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting dengan indicator persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000HPK dengan target 70 %;
2. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indicator Rata-rata jumlah anak perkeluarga dengan target 2,35;
3. Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dengan indicator Predikat APE Madya;

4. Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan indicator persentase indicator KLA yang terpenuhi sesuai standar 83,5 %;
5. Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan social dengan indicator persentase PPKS yang tertangani 80 % ;
6. Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dengan indicator persentase lembaga social kemasyarakatan yang aktif 100 %.

Pendanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang ditetapkan dengan cara perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program.

Program dan Kegiatan Dinas Sosial pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosinya yang terdapat pada Renja sipd-ri.kemedagri.go.id dapat dilihat pada **tabel di bawah ini :**



TABEL 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang Tahun 2024

Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Kelo mpo k Kerj a	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Lokas i Outpu t Kegiat an	Targe t Capai an Kinerj a	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Priorit as Nsion al	Priorit as Daera h		Tolok Ukur	Targe t	Kebutuhan Dana/Pag u Indikatif (Rp.)
(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)			(8)	(9)	(10)	11
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				10,774,446,355							13,274,133,663
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8,972,974,128							11,742,824,663
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial, Pengendali an Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberday aan		100 Perse n	6,066,496,798					Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial, Pengendali an Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberday aan	100 Perse n	9,192,900,644

	Perempuan Dan Perlindungan Anak								Perempuan Dan Perlindungan Anak		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	4,827,510,996		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4,055,930,882

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	518 Orang /bulan	4,827,510,996	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp orkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang /bulan	4,055,930,882
-----------------------------------	---	---	------------------	---------------	--------------------------------	--	--	---	------------------	---------------

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	18,000,000		Mempertukarkan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0 Persen	-
---	--	--	------------	------------	--	---	--	--	----------	---

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Pada ng Panjang, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa	37 Paket	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-
--	--	---	----------	------------	------------------------------	---	--	--	---------	---



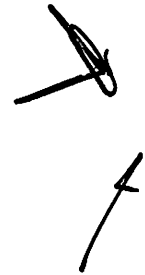
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100 persen	225,391,700		Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, terampil dan berdaya saing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	327,916,200

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	5,391,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,391,700
--	--	---	---------	-----------	------------------------------	---	--	--	---------	-----------

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	4 Paket	60,000,00 0	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pildan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	65,000,00 0

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	24,499,500
---	---	--	----------	------------	------------------------------	---	--	---	----------	------------

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	24 Laporan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	233,025,000



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaa n	100 perse n	50,000,00 0	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaa n	100 Perse n	20,000,00 0



Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	13 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tenta m	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20,000,000
---------------------------------------	---	---	---------	------------	------------------------------	--	---	---	--------	------------

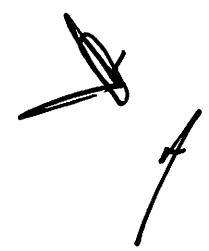
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen	734,653,102	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	522,181,680
--	--	------------	-------------	---	--	--	------------	-------------

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	36 Laporan	53,893,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	53,893,680
---	--	---	------------	------------	------------------------------	--	--	--	------------	------------



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kel/Desa	12 Laporan	680,759,422	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	468,288,000
---------------------------------------	--	---	------------	-------------	------------------------------	---	--	--	------------	-------------

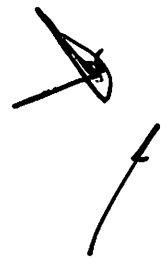
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		100 perse n	210,941,0 00		Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pildan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Perse n	210,941,0 00
--	---	--	-------------------	-----------------	--	---	---	---	-------------------	-----------------



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	21 Unit	111,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, terampil dan berdaya saing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	111,525,000
---	--	---	---------	-------------	------------------------------	---	--	--	---------	-------------

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	27 Unit	35,516,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	35,516,000
---	--	---	---------	------------	------------------------------	---	---	--	---------	------------

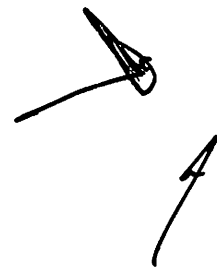
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Unit	23,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	23,900,000
--	--	--	---------	------------	------------------------------	---	--	--	---------	------------



Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Pada ng Panjanng, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa	6 Unit	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuahkan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertentram	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	40,000,000
--	--	--	--------	------------	------------------------------	--	--	--	--------	------------

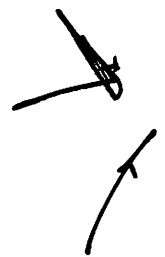


PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif		75 Persen	1,454,440,176		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	80 Persen	1,289,679,700

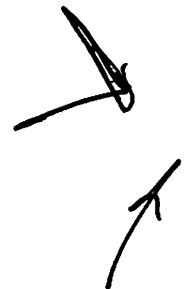


Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina		146 lembaga	1,454,440,176	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	148 Lembaga	1,269,679,700
--	--	--	-------------	---------------	---	--	--	-------------	---------------

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	92 Orang	363,973,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang terkemuka	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	267,222,800
---	---	--	----------	-------------	------------------------------	---	---	---	----------	-------------



Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	40,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	8,640,000
---	---	--	---------	------------	------------------------------	---	---	---	---------	-----------



Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Lembaga	946,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertentram	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	900,000,000
--	--	--	------------	-------------	------------------------------	---	--	--	------------	-------------

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Sertifikat	103,566,626	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Sertifikat	93,816,900
---	--	--	--------------	-------------	------------------------------	---	---	--	--------------	------------

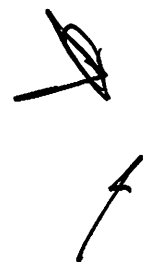
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani		90 Perse n	967,862,2 91		Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m		Persentase PPKS yang tertangani	90 Perse n	873,711,4 00



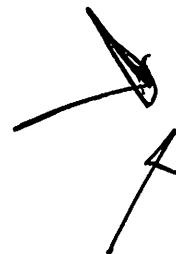
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		750 orang	618,587,288		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, terampil dan berdaya saing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 Orang	500,000,000
--	--	--	-----------	-------------	--	---	--	--	-----------	-------------

Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	459 Orang	179,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pemenuhan Kebutuhan Permakana n Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenanga n Kabupaten/ Kota	459 Orang	200,000,000
------------------------	---	---	-----------	-------------	-------------------------------	--	--	---	-----------	-------------

Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	75 Orang	256,355,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	75 Orang	150,000,000



Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Orang	71,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pemertahanan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	22 Orang	80,000,000
-----------------------	--	--	----------	------------	------------------------------	--	--	--	----------	------------



Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada Panjangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	44,332,288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, berkeadilan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertata	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	50,000,000
--	---	--	----------	------------	------------------------------	---	--	---	----------	------------

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/ Kota	- Kota Pada Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	50 Orang	67,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuahkan Ekonomi Untuk Pembangunan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpe ngeta huan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentram	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	20,000,000
---	--	--	----------	------------	------------------------------	--	--	---	----------	------------

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		2628 orang	349,275,0 03		Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 Orang	373,711,4 00
---	--	--	---------------	-----------------	--	---	---	--	---------------	-----------------



Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	67,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertentram	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	75 Orang	75,000,000

Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	75 Orang	67,125,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	75 Orang	75,000,000
--------------------	---	---	----------	------------	-------------------------------	--	--	---	----------	------------



Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	8,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Orang	10,000,000
-----------------------	--	--	---------	-----------	------------------------------	---	--	--	---------	------------

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	107,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 Orang	120,000,000
--	---	--	----------	-------------	------------------------------	---	--	---	----------	-------------

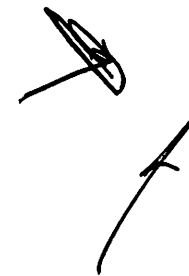
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	98,675,003	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, terampil dan berdaya saing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertentram	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	10 Dokumen	93,711,400
---	--	--	-----------	------------	------------------------------	---	--	--	------------	------------

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	86,98 Persen	223,130,892	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertentram	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	87,97 Persen	228,029,600
---	---	--------------	-------------	---	--	---	--------------	-------------

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	8 layanan	223,130,892	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertentram	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	17 Layanan	228,029,600
---	--	-----------	-------------	---	--	--	------------	-------------



Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2169 Orang	83,019,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2119 KK	79,320,000
--	---	---	------------	------------	------------------------------	---	--	---	---------	------------



Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	1300 Keluarga	126,686,892	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, terampil dan berdaya saing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1271 Keluarga	133,709,600
--	---	--	---------------	-------------	------------------------------	---	--	---	---------------	-------------

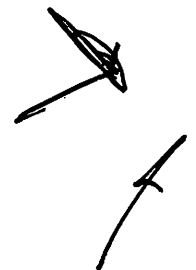
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	130 Orang	13,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuahkan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	130 Orang	15,000,000
--	---	---	-----------	------------	------------------------------	--	---	---	-----------	------------

PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100 Persen	238,668,971	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Persentase korban bencana yang tertangani	100 Persen	153,503,319

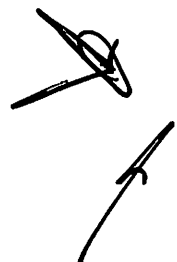


Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 persen	71,600,000	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 Persen	80,000,000
---	--	------------	------------	---	--	--	------------	------------

Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakana n 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsi an) Kewenanga n Kabupaten/ Kota	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	300 Orang	26,850,00 0	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berkeadilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah Orang yang Mendapatka n Permakana n 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsi an) Kewenanga n Kabupaten/ Kota	300 Orang	30,000,00 0
--------------------	--	---	-----------	-------------	--------------------------------	---	--	---	-----------	-------------

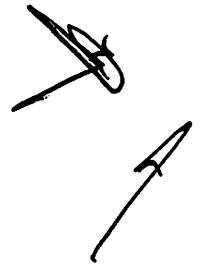


Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsi an) dan Pasca Bencana Kewenanga n Kabupaten/ Kota	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	300 Orang	26,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pildan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pakaian dan Kelengkapa n Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsi an) dan Pasca Bencana Kewenanga n Kabupaten/ Kota	300 Orang	30,000,000
--------------------	--	---	-----------	------------	------------------------------	--	---	--	-----------	------------



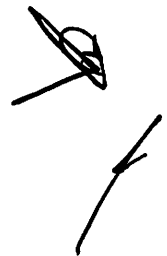
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	300 Orang	17,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuahkan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	300 Orang	20,000,000
--------------------------------	--	--	-----------	------------	------------------------------	--	--	--	-----------	------------

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina		30 orang	167,068,9 71		Memp erkuat Keta h anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m		Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 Orang	73,503,31 9



Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanak an Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaa n Taruna Siaga Bencana Kewenanga n Kabupaten/ Kota	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	30 Orang	167,068,971	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah Orang yang Melaksanak an Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaa n Taruna Siaga Bencana Kewenanga n Kabupaten/ Kota	30 Orang	73,503,319
	Pemelihara an dan rehap bangunan markas komando TAGANA		1 Unit					Pemelihara an dan rehap bangunan markas komando TAGANA		

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara		100 Persen	22,375,000		Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Persentase TMP yang dipelihara	100 Persen	25,000,000
--	--------------------------------	--	------------	------------	--	---	--	--------------------------------	------------	------------

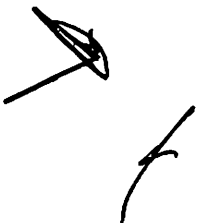


Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang dipelihara		98 Maka m	22,375,00 0		Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah makam yang dipelihara	98 Maka m	25,000,00 0
--	---------------------------------------	--	-----------------	----------------	--	---	---	---------------------------------------	-----------------	----------------

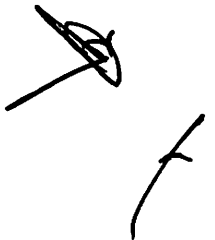
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 Makam	22,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuahkan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	98 Makam	25,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				659,224,977						711,869,000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi		100 Persen	163,928,400				Persentase organisasi	100 Persen	219,580,000

	perempuan yang aktif							perempuan yang aktif		
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD		20 Perse n			Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pildan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 Perse n	

Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah		23 OPD	38,700,00 0		Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m		Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	23 OPD	40,000,00 0
	Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS		23 OPD						Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	23 OPD	



Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada Daerah Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/D esa	23 Peran gkat Daerah	38,700,00 0	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuhan Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	23 OPD	40,000,00 0
--	---	--	-------------------------------	----------------	---	---	---	---	-----------	----------------



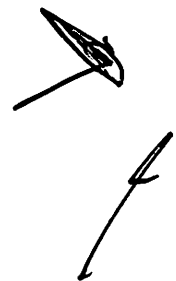
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota		50 Persen	15,000,000		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, berkeadilan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50 Persen	30,000,000
--	--	--	-----------	------------	--	---	--	--	-----------	------------

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	26 Lemb aga	15,000,00 0	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	26 Lemb aga	30,000,00 0
--	---	---	-------------	-------------	--------------------------------	--	--	---	-------------	-------------



Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penangan n kasus		100 Perse n	110,228,4 00		Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m		Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penangan n kasus	100 perse n	149,580,0 00
--	--	--	-------------------	-----------------	--	---	---	--	--	-------------------	-----------------

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	110,228,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	149,580,000
---	--	--	------------	-------------	------------------------------	---	--	--	------------	-------------



PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu		100 BTJ	147,229,2 90		Mempertu- kuat Ketah- anan Ekono- mi Untuk Pertu- mbuh- an Yang Berku- alitas dan Berke- adilan	Menin- gkatk- an kualit- as Sumb- er Daya Manu- sia yang sehat, berpe- ngeta- huan, teram- pil dan berda- ya saing Menin- gkatk- an tatan- an kehid- upan sosial masya- rakat yang tentra- m		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BJT	149,532,0 00
--------------------------------	---	--	------------	-----------------	--	---	--	--	---	------------	-----------------



Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan		8 Lembaga	35,800,000		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	30,000,000
--	--	--	-----------	------------	--	---	--	--	-----------	------------

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	35,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang tertentram	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	30,000,000
---	---	--	-----------	------------	------------------------------	---	---	---	-----------	------------



Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti		100 Persen	93,529,290		Mempertahankan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertata	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 Persen	104,502,000
--	---------------------------------------	--	------------	------------	--	--	--	---------------------------------------	------------	-------------

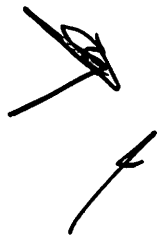
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	10 Layan an	93,529,290	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenga n Kabupaten/ Kota	12 layan an	104,502,000
---	---	---	-------------	------------	-------------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota		10 Layan an	17,900,00 0		Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m		Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	10 Layan an	15,030,00 0
--	---	--	-------------------	----------------	--	---	---	--	---	-------------------	----------------

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	15 Dokumen	17,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15,030,000
--	---	---	------------	------------	------------------------------	---	--	---	------------	------------



PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi		80 Persen	100,029,675		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	83 Persen	120,620,000
----------------------------------	---	--	-----------	-------------	--	---	--	---	-----------	-------------



Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA		30 Lembaga	31,325,000		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	35 Lembaga	43,855,000



Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	31,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	43,855,000
--	---	--	------------	------------	------------------------------	---	--	---	------------	------------

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak aktif		50 Perse n	68,704,67 5		Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Persentase forum anak aktif	70 Perse n	76,765,00 0
	Persentase lembaga pendidikan yang telah mengemba ngkan SRA		100 Perse n					Persentase lembaga pendidikan yang telah mengemba ngkan SRA	70 Perse n	

	Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA		100 Persen						Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	70 Persen	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	35 Orang	68,704,675	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	35 Anak	76,765,000

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu		100 BTJ	248,037,6 12		Mempertu- kuat Ketah- apan Ekono- mi Untuk Pertu- mbuh- an Yang Berku- alitas dan Berke- adilan	Menin- gkatk- an kualit- as Sumb- er Daya Manu- sia yang sehat, berpe- ngeta- huan, teram- pil dan berda- ya saing Menin- gkatk- an tatan- an kehidu- pan sosial masy- araka- t yang tentra- m		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	222,137,0 00
----------------------------------	--	--	------------	-----------------	--	---	--	--	--	------------	-----------------



Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti		100 persen	55,612,612		Mempertuahkan Peranan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Persentase kasus yang ditindak lanjuti	30 Lembar	62,137,000
---	--	--	------------	------------	--	--	--	--	-----------	------------

Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	19,812,612	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertentram	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	22,137,000
--	--	---	----------	------------	------------------------------	---	--	--	----------	------------

Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	6 Doku man	35,800,00 0	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Doku men	40,000,00 0
--	--	---	------------	-------------	--------------------------------	--	--	--	------------	-------------

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani		100 Persen	192,425,000		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, berkeadilan, terampil dan bersaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertata	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Persen	160,000,000
---	---	--	------------	-------------	--	---	---	---	------------	-------------

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	125,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, berkeadilan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	40,000,000
---	--	---	----------	-------------	------------------------------	---	--	--	----------	------------

Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	67,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Orang	120,000,000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

1,142,247,
250

Memp
erkuat
Ketah
anan
Ekono
mi
Untuk
Pertu
mbuh
an
Yang
Berku
alitas
dan
Berke
adilan

Menin
gkatk
an
kualit
as
Sumb
er
Daya
Manu
sia
yang
sehat,
berpe
ngeta
huan,
teram
pil
dan
berda
ya
saing
Menin
gkatk
an
tatan
an
kehid
upan
sosial
masy
araka
t yang
tentra
m

819,440,0
00



PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan		100 Persen	123,450,000		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 Persen	53,000,000

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan		1 dokumen	35,800,000		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, berkeadilan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 Dokumen	23,000,000
---	---	--	-----------	------------	--	---	---	---	-----------	------------

Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Kegiatan	35,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertata	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	25 Kegiatan	23,000,000
--	--	--	-------------	------------	------------------------------	---	---	--	-------------	------------

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah
rumah
dataku yang
dikembangk
an

16
unit

87,650,00
0

Memp
erkuat
Ketah
anan
Ekono
mi
Untuk
Pertu
mbuh
an
Yang
Berku
alitas
dan
Berke
adilan

Menin
gkatk
an
kualit
as
Sumb
er
Daya
Manu
sia
yang
sehat,
berpe
ngeta
huan,
teram
pil
dan
berda
ya
saing
Menin
gkatk
an
tatan
an
kehid
upan
sosial
masy
araka
t yang
tentra
m

Jumlah
rumah
dataku yang
dikembangk
an

16
Unit

30,000,00
0

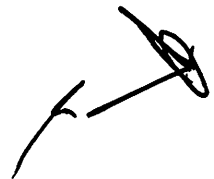


Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	87,650,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	30,000,000
---	---	--	---------	------------	-------------------------------	---	--	---	---------	------------

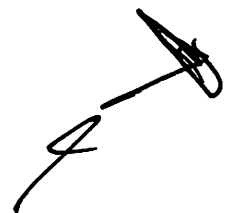
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR		62 Perse n	319,158,2 50		Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Persentase CPR	65 Perse n	193,880,0 00
--	-------------------	--	------------------	-----------------	--	---	---	-------------------	------------------	-----------------



Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif		2287 orang	17,900,000		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	0 Akseptor	-
---	---	--	------------	------------	--	---	--	---	------------	---



Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	4 Laporan	17,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menin gkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpe ngetahuan, terampil dan berdaya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy arakat yang tentra m	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	0 Laporan	-
----------------------------	---	--	-----------	------------	------------------------------	--	---	---	-----------	---



Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	99 orang	246,350,000		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	99 Orang	137,880,000
---	-----------------------------------	----------	-------------	--	---	--	-----------------------------------	----------	-------------



Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	86 Organisasi	246,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangu nan Keluarga, Kependudu kan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40 Organisasi	137,880,000
---	---	---	---------------	-------------	------------------------------	--	--	---	---------------	-------------

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB		50 persen	54,908,250		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	50 Persen	56,000,000
---	---	--	-----------	------------	--	---	---	---	-----------	------------




Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatka n Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyara katan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaa n Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan . Semu a Kel/D esa	3 Organ isasi	54,908,25 0	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah Organisasi yang Mendapatka n Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyara katan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaa n Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organ isasi	56,000,00 0
---	---	--	---------------------	----------------	---	---	---	---	---------------------	----------------



PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga		62 Perse n	699,639,0 00		Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pildan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 Perse n	572,560,0 00
---	--	--	------------------	-----------------	--	---	---	--	------------------	-----------------

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina		114 kelompok	97,125,000		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, berkeadilan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertata	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	114 Kelompok	30,000,000
---	--	--	--------------	------------	--	---	--	--	--------------	------------




Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	3 Laporan	97,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaa n Keuangan Keluarga)	3 Laporan	30,000,000
--	---	---	-----------	------------	------------------------------	--	--	--	-----------	------------




Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100 Persen	602,514,000		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100 Persen	542,560,000
--	---	------------	-------------	--	---	---	---	------------	-------------

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	- Kota Pada ng Panja ng, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	23 Organ isasi	584,614,0 00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memp erkuat Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuh an Yang Berku alitas dan Berke adilan	Menin gkatk an kualit as Sumb er Daya Manu sia yang sehat, berpe ngeta huan, teram pil dan berda ya saing Menin gkatk an tatan an kehid upan sosial masy araka t yang tentra m	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkata n Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyara katan dalam Pengelolaa n Program Ketahanan dan Kesejahtera an Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	23 Organ isasi	522,560,0 00
--	--	---	----------------	--------------	--------------------------------	--	--	---	----------------	--------------

Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	17,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertuahkan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	20,000,000
---	--	--	-----------	------------	------------------------------	--	--	--	-----------	------------

IV-255 | RENJA DSPPKBPPPA

A handwritten signature, possibly the letter 'P', is written below the text.

Apa yang menjadi prioritas nasional sejalan dan beriringan dengan prioritas daerah Kota Padang Panjang yang diurutkan dalam tujuan dan sasaran pada masing – masing Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Poemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Demikian juga yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Poemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada tahun 2023-2026 bahwasanya akan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan seiring dengan prioritas daerah Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis.



BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan pencajabaran dari visi dan misi Rencana Strategis yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Adapun nomenklatur program, kegiatan serta subkegiatan pada dokumen rencana kerja ini didasarkan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini sudah melalui tahap-tahap yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 ini menjadi tanggungjawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat inikatif sehingga dalam pelaksanaannya akan

Psangat tergantung pada kondisi regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran bersangkutan.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, yaitu sebagai berikut :

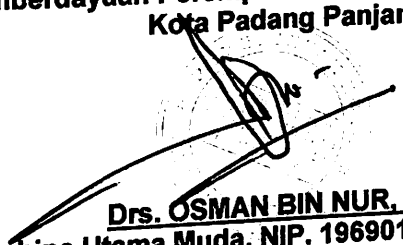
1. Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024. RKA tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2024;
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang melakukan monitoring dan evalausai pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan;
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2024 yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis , target program dan kegiatan dapat lebih focus, terintegrasi serta dapat mencapai

sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tidak terlepas dari prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Padang Panjang, Agustus 2023

**Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang**



Drs. OSMAN BIN NUR, M. SI
Pembina Utama Muda, NIP. 19690120 198902 1 001